



WALI KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah Kota Kendari serta mendorong penyusunan kebijakan berbasis bukti, diperlukan perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan kebijakan daerah;
- b. bahwa untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Kota Kendari, diperlukan tata kelola riset dan inovasi daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025–2030;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025–2030;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2030.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kota kendari.

1. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2030 yang selanjutnya disebut RIPJPID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD dan selama masa transisi pemerintahan daerah.
7. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

8. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Pasal 2

RIPJPID disusun berdasarkan:

- a. program prioritas pembangunan Daerah yang tercantum di dalam RPJMD;
- b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. isu-isu strategis yang berkembang;
- d. kebijakan nasional; dan
- e. ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

- (1) RIPJPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab i pendahuluan;
 - b. bab ii gambaran umum dan kondisi Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. bab iii tantangan dan peluang Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. bab iv analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. bab v strategi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. bab vi peta jalan Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - g. bab vii penutup.
- (2) Uraian RIPJPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) RIPJPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidencebased policy*); dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal ...

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

Diundangkan di Kendari

pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

AMIR HASAN

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ... NOMOR....

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2030



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah mengamanahkan perangkat daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang mendukung pendekatan berbasis riset dalam kebijakan, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran IPTEK atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan daerah (Pasal 26 Ayat (1) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah). Rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah ini disusun untuk jangka waktu tertentu disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki hubungan strategis dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) dalam upaya mendorong pembangunan berbasis inovasi. RIPJPID menjadi panduan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, Integrasi antara RPJMD dan RIPJPID memastikan bahwa pengembangan sektor IPTEK selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga mampu mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan memperkuat kapasitas inovasi masyarakat, dengan demikian RPJMD yang didukung RIPJPID dapat menciptakan pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis pengetahuan untuk menjawab tantangan masa depan.

Fungsi riset dan inovasi di daerah mencakup berbagai kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023. Dalam konteks ini, penelitian memiliki tujuan utama, yaitu: (1) meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah; (3) memberdayakan masyarakat dan mengaktifkan partisipasinya; (4) meningkatkan daya saing daerah; dan (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara pengembangan bertujuan untuk melanjutkan Langkah-langkah yang diambil dari hasil penelitian tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. Lebih lanjut, pengkajian merupakan proses analisis dan perencanaan yang mencakup beberapa tahapan, seperti: (1) pengujian; (2) pengembangan teknologi; (3) perancangan dan pembangunan; serta (4) operasionalisasi. Terakhir, program penerapan mencakup kegiatan seperti: (1) transfer teknologi; (2) intermediasi teknologi; (3) penyebaran pengetahuan ilmiah dan teknologi; serta (4) komersialisasi teknologi.

Di Kota Kendari, riset dan inovasi menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 sebagai visi tercapainya rencana strategis dan program prioritas pembangunan Kota Kendari hingga tahun 2029. Salah satu program bidang riset dan inovasi, mampu mendorong penguatan daya saing daerah, membangkitkan perekonomian, menyelesaikan permasalahan atau isu strategis, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Percepatan pencapaian target perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil telaah terhadap target dan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, serta hasil evaluasi capaian RPJMD nantinya untuk mewujudkan Kendari sebagai kota yang layak huni, maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ini sangat penting dilakukan untuk mendukung Pemerintah Kota Kendari menapaki babak baru dalam perencanaan pembangunan setelah diserahkannya dokumen

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD Tahun 2025–2029 yang digelar Senin (14/7/2025).

1.2 Dasar Hukum

Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Kendari, secara hierarki dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Tahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti;
- 16) Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
- 19) Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Tahun 2024-2026;
- 20) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari;
- 21) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2045; dan
- 22) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Kendari secara umum bermaksud:

- a. Sebagai petunjuk bagi penyedia jasa yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas Penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Kendari.
- b. Dalam penugasan ini, penyedia jasa diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam KAK ini. Sehingga secara substansi, dokumen ini diharapkan dapat menjadi peta jalan untuk mengharmoniskan agenda-agenda riset dan inovasi di daerah.

Sedangkan tujuan dan nilai penting kegiatan ini adalah terciptanya keterpaduan, keberlanjutan dan tepat sasaran dalam memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Sehingga secara terperinci, tujuan penyusunan dokumen, yaitu:

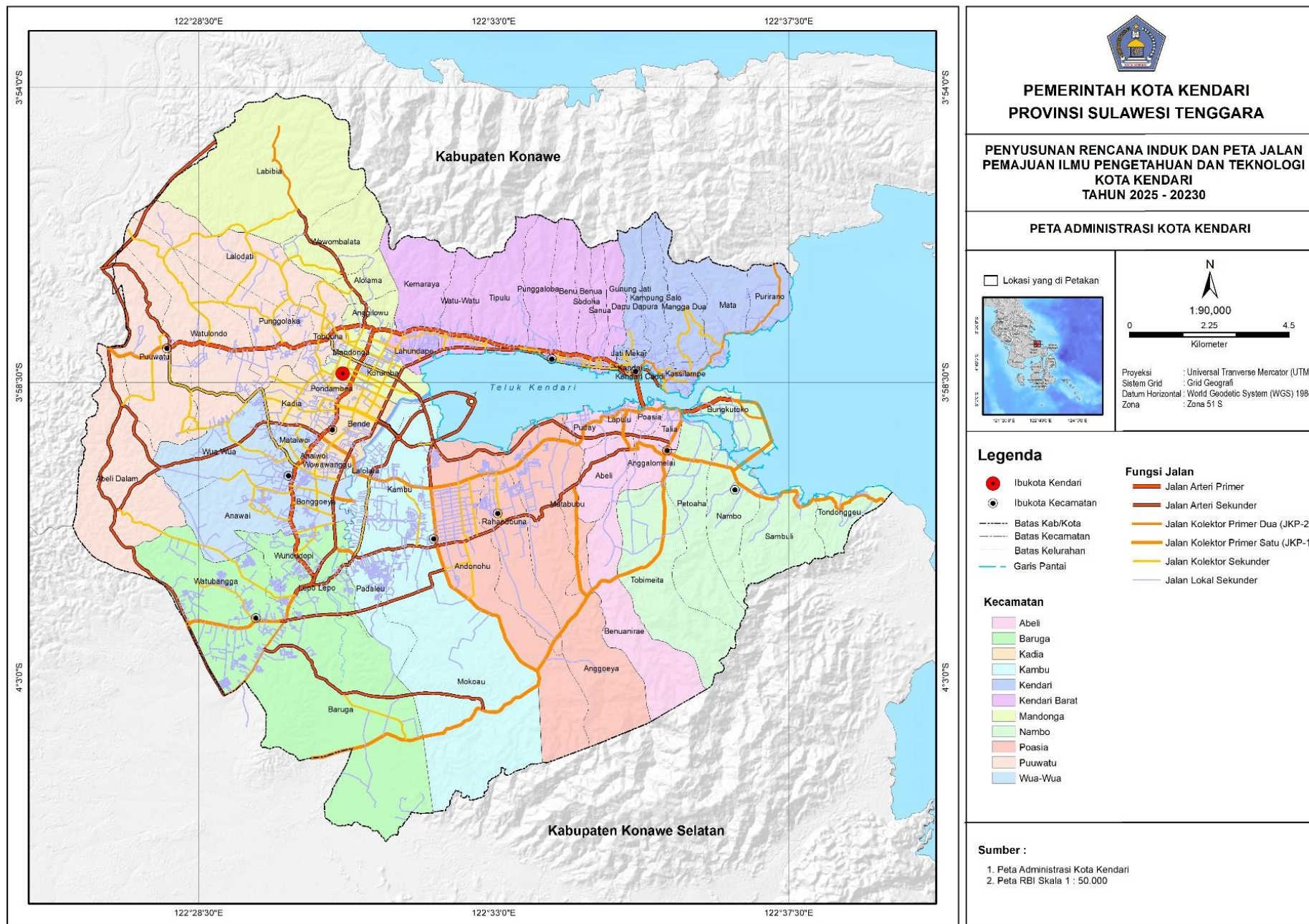
- a. Menjelaskan gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi daerah Kota Kendari;

- b. Menyediakan informasi tema prioritas riset dan inovasi di daerah Kota Kendari;
- c. Mengidentifikasi tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah Kota Kendari;
- d. Menjelaskan permasalahan utama pembangunan daerah Kota Kendari dan potensi pemecahannya;
- e. Merekomendasi strategi dan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah Kota Kendari; dan
- f. Menetapkan dan menjelaskan peta jalan program kegiatan prioritas riset dan inovasi daerah yang relevan, terpadu, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Lingkup Wilayah

Lingkup Wilayah dalam kajian ini mencakup seluruh Daerah Kota Kendari, yang secara administratif terdiri dari 11 kecamatan yakni, Kecamatan Mandonga, Kec. Baruga, Kec. Puuwatu, Kec. Kadia, Kec. Wua-Wua, Kec. Poasia, Kec. Abeli, Kec. Kambu, Kec. Nambo, Kec. Kendari, dan kecamatan Kendari Barat. Berikut disajikan pada peta administrative berikut.



1.4.2 Lingkup Studi

Studi dalam kajian ini berpedoman sepenuhnya pada Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di daerah, sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL DAN DAFTAR-DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DAERAH

- 2.1 Gambaran Umum Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografis
 - 2.1.2 Aspek Kependudukan
 - 2.1.3 Aspek Ketenagakerjaan
 - 2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.2 Tema Prioritas : Daya Saing
 - 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Berdaya Saing
 - 2.2.2 Sektor Unggulan
 - 2.2.3 Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - 2.2.4 Tata Kelola Pemerintahan

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DAERAH

- 3.1 Tantangan
- 3.2 Peluang

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

- 4.1 Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Di Daerah
- 4.2 Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah
- 4.3 Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah
- 4.4 Budaya Riset dan Inovasi di Daerah
- 4.5 Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah
- 4.6 Penyelarasan Dengan Perkembangan Global

BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

- 5.1 Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Di Daerah
- 5.2 Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah
- 5.3 Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah
- 5.4 Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah
- 5.5 Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah
- 5.6 Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global
- 5.7 Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DAERAH

- 6.1 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari (Tahun 2025-2030)
- 6.2 Program Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari (Tahun 2025-2030)
 - 6.2.1 Klaster Riset Inovasi : Pertumbuhan Ekonomi Berdaya Saing
 - 6.2.2 Klaster Riset Inovasi : Pengembangan Produk Unggulan Daerah
 - 6.2.3 Klaster Riset Inovasi : Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - 6.2.4 Klaster Riset Inovasi : Tata Kelola Pemerintahan
- 6.3 Program, Rencana Aksi, dan Target Riset dan Inovasi Daerah Kota kendari (Tahun 2025-2030)

BAB VII PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA



GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografis

Kota Kendari sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, terbentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 yang disahkan pada tanggal 3 Agustus 1995 dengan status Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari. Secara astronomis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa berada di antara 3°54'40" dan 4°5'05" Lintang Selatan (LS) dan membentang dari Barat ke Timur diantara 122°26'33" dan 122°39'14" Bujur Timur (BT). Kota Kendari Berdasarkan posisi geografisnya terletak di bagian Tenggara Pulau Sulawesi, memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Konawe;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Laut Kendari;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan; dan
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan

Wilayah daratan terdapat di daratan Pulau Sulawesi mengelilingi Teluk Kendari, dengan luas wilayah daratan mencapai 266,11 km² atau sekitar 0,7 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Memiliki satu pulau yakni Pulau Bungkutoko, dan secara administrasi, terdiri atas 11 kecamatan dan 65 kelurahan, dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Baruga (47,73 km²) atau sekitar 17,94% dari total luas Kota Kendari. Sementara kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kadia (6,66 km²). Administrasi pada tingkat kelurahan tergolong wilayah bukan pesisir yang jumlahnya mencapai 35

kelurahan dengan topografi wilayah sebagian besar merupakan kelurahan yang terletak di dataran, sedangkan lainnya tergolong wilayah pesisir sebanyak 30 kelurahan. Untuk mengamati sebaran dan keberadaan wilayah kecamatan di Kota Kendari, berikut disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Kendari Tahun 2025

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase (%)
1.	Mandongga	Wawombalata	23,81	8,947
2.	Baruga	Watubangga	47,73	17,94
3.	Puuwatu	Puuwatu	40,01	15,04
4.	Kadia	Kadia	6,66	2,503
5.	Wua-Wua	Anawai	11,74	4,412
6.	Poasia	Rahandouna	35,43	13,31
7.	Abeli	Anggalomelai	15,41	5,791
8.	Kambu	Padaleu	22,00	8,267
9.	Nambo	Nambo	25,78	9,688
10.	Kendari	Kandai	15,42	5,795
11.	Kendari Barat	Punggaloba	22,11	8,309
Total Kota kendari			266,11	100,00

Sumber: Ranhir RPJMD Kota Kendari (2025-2029) divalidasi Tim Ahli 2025

2.1.2 Aspek Kependudukan

Data kependudukan sangat penting karena menjadi dasar dalam berbagai aspek perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan tertentu, tidak terkecuali urusan pengembangan riset dan inovasi di daerah. Data ini mencakup informasi penting tentang jumlah penduduk, persebaran, karakteristik demografis, serta berbagai peristiwa dalam dimensi kependudukan yang ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan serta program prioritas pemajuan IPTEK dan era digitalisasi, isu global untuk menunjang riset dan inovasi daerah Kota Kendari secara berkelanjutan. Heterogenitas masyarakat yang sangat membanggakan adalah masyarakatnya selalu ingin hidup

berdampingan dengan damai menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dengan baik. Hal ini merupakan modal dasar untuk melakukan pembangunan demi kemajuan dan perkembangan kota dimasa sekarang dan yang akan datang.

Data demografi merupakan suatu hal penting dalam perencanaan pembangunan untuk memberikan dasar informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan solusi yang sesuai. Badan Pusat Statistik mencatat penduduk Kota Kendari tahun 2024 sebanyak 366.454 ribu jiwa atau sekitar 12,75 persen dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 2,75 juta jiwa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak disbanding kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jumlah penduduk terbanyak terletak di Kecamatan Poasia sebanyak 45.444 jiwa. Jika dibandingkan dengan penduduk 2023 maka jumlah penduduk Kota Kendari mengalami peningkatan sebesar 15.369 ribu jiwa yang saat itu berjumlah 351.085 ribu jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Kendari juga meningkat menjadi 1.356 jiwa per km² pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 kepadatan penduduk sebesar 1.299 jiwa per km². Serta peningkatan pada rasio jenis kelamin semula sebesar 100,84 pada tahun 2023 menjadi 101,25 pada tahun 2024.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kendari Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Presentase (%)	Kepadatan (Jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1.	Mandongga	37.550	10,25	1.588	100,04
2.	Baruga	40.541	11,06	913	101,67
3.	Puuwatu	44.812	12,23	1.123	102,05
4.	Kadia	36.783	10,04	5.616	98,51
5.	Wua-Wua	34.403	9,39	2.911	101,23
6.	Poasia	45.444	12,40	1.212	102,13
7.	Abeli	18.428	5,03	1.147	103,18
8.	Kambu	24.871	6,79	981	102,32

9.	Nambo	12.641	3,45	478	103,92
10.	Kendari	29.124	7,95	1.685	102,00
11.	Kendari Barat	41.857	11,42	1.969	98,97
2024		366.454	100,00	1.356	101,25
2023		351.085	100,00	1.299	100,84
2022		356.747	100,00	1.320	101,28
2021		350.267	100,00	1.289	101,47
2020		345.110	100,00	1.270	101,68

Sumber: BPS Kota Kendari Dalam Angka, 2025

Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kematian, kelahiran dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk diukur sebagai persentase pertumbuhan jumlah penduduk selama periode tertentu. Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, rumusan laju pertumbuhan penduduk menggunakan laju pertumbuhan tahunan agar terlihat bagaimana kondisi pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk meningkat sangat signifikan pada tahun 2024 yaitu sebesar 4,38 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 hanya sebesar 1,70 persen.

Hasil proyeksi penduduk tahun 2025-2030 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk di semua kelompok umur, baik kelompok 0-14 tahun, 15-64 tahun ataupun 65 tahun ke atas. Namun dari sisi persentase terlihat adanya pola yang berbeda untuk kelompok usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Penduduk kelompok usia 0-14 tahun terlihat persentasenya semakin menurun, sementara kelompok usia 65 tahun ke atas persentasenya semakin meningkat. Pada kelompok penduduk usia produktif, kelompok usia 15-64 tahun, persentasenya cenderung stabil pada kisaran 68 persen. Hal ini menyebabkan dependency ratio meskipun meningkat namun masih tetap pada kisaran angka 45. Dengan demikian pada periode 2025 hingga 2030 Kota Kendari diproyeksikan akan menikmati bonus demografi yang ditandai dengan tingginya angka penduduk usia produktif (15-65) yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2027 serta rendahnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu

dibawah 50. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Kendari untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut agar bermanfaat bagi pembangunan. Melimpahnya penduduk kelompok usia produktif jika tidak dikelola dengan optimal dapat berpotensi memunculkan berbagai permasalahan sosial, termasuk meningkatnya pengangguran.

Tabel 2.3 Proyeksi Penduduk Kota Kendari Tahun 2025-2030

Parameter Penduduk	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	190.090	193.310	196.480	199.610	202.680	205.690
Perempuan	187.180	190.400	193.590	196.740	199.840	202.900
Total	377.270	383.710	390.070	396.350	402.520	408.590
Sex Ratio (%)	101,550	101,528	101,439	101,459	101,421	101,380
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,73	1,68	1,63	1,58	1,54	1,48

BPS Kota Kendari, 2025; diolah (RPJMD, 2025-2029)

Adapun rasio jenis kelamin pada proyeksi penduduk 2025-2030 mengindikasikan adanya penurunan rasio jenis kelamin hingga mencapai 101,38 pada tahun 2030. Kondisi ini menjadikan jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan semakin mendekati sehingga lebih mudah dalam penyusunan dan implementasi program pengarusutamaan gender. Pada tahun 2020 jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun tercatat sebanyak 95,090 jiwa atau sebesar 27,60 persen. Jumlah kelompok usia ini semakin meningkat diproyeksikan menjadi 99,520 jiwa pada tahun 2025, namun persentasenya menurun menjadi 26,38 persen. Pada tahun 2030 diproyeksikan penduduk kelompok usia ini sedikit meningkat menjadi 102,020 ribu jiwa dengan persentase sebesar 24,97 persen. Hal ini merupakan dampak dari proyeksi angka kelahiran total -*total fertility rate* (TFR) yang semakin menurun. TFR didefinisikan sebagai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang Perempuan selama masa usia subur (15-49 tahun). Pada tahun 2020 berdasarkan hasil Proyeksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga TFR Kota Kendari tercatat sebesar 2,0 di tahun 2025. Angka ini diharapkan akan tetap bertahan hingga tahun 2030.

Keberadaan masyarakat adat di Kota Kendari merupakan bagian yang penting dari identitas sosial dan kultural daerah. Sebagai wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan administrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari tetap menjadi tempat tinggal bagi sejumlah komunitas adat, khususnya yang berasal dari etnis Tolaki, Muna, dan Buton, yang memiliki akar sejarah dan peran penting dalam pembentukan kota. Meskipun arus urbanisasi dan modernisasi terus berkembang pesat, masyarakat adat masih mempertahankan nilai-nilai lokal, praktik sosial budaya, serta kearifan tradisional, baik dalam pola permukiman, pengelolaan lahan, maupun sistem nilai kemasyarakatan. Namun demikian, keberadaan masyarakat adat di tengah dinamika pembangunan kota menghadapi tantangan yang kompleks. Tekanan terhadap lahan adat, perubahan fungsi ruang, dan lemahnya pengakuan formal terhadap hak-hak adat dalam perencanaan kota berpotensi mengikis eksistensi mereka. Selain itu, warisan budaya dan tradisi lokal belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan, pendidikan, dan pariwisata kota. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengarusutamakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat melalui pengakuan hak, pelestarian budaya, serta pelibatan aktif dalam proses perencanaan pembangunan Kota Kendari secara inklusif dan berkeadilan. Jumlah penduduk Kota Kendari pada tahun 2023 akan mencapai 356.657 jiwa.

2.1.3 Aspek Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja inilah yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Berikut disajikan Tabel Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Kendari Tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.4 Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Kendari tahun 2020-2024

Uraian Indikator	Perkembangan PAK Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,60	65,34	65,48	66,87	68,45
--	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: BPS Kota kendari Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Kendari terus mengalami tren pertumbuhan. hal ini seiring dengan terbukanya usaha-usaha swasta sebagai dampak menggeliatnya industri pertambangan di daerah-daerah sekitar Kota Kendari. Angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Cakupan aspek kesejahteraan masyarakat di sini mencakup fokus kesejahteraan, pemerataan perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa kondisi kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun terakhir ini cukup rentan sebagai dampak pandemi *Covid-19* dan setelahnya disusul dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah. Hal ini cukup terlihat jelas dari adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga dampak negatif lainnya terhadap masyarakat dari ketenagakerjaan hingga sosial. Namun, di Kota Kendari khususnya pasca penanganan dan pemulihan pandemi, mampu bangkit dan terus berupaya mengembalikan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Kendari diuraikan sebagai berikut.

A. Kesejahteraan Ekonomi

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kota Kendari antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi, ketimpangan kesejahteraan, kemiskinan hingga ketenagakerjaan masyarakat. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan

dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu aspek mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur berdasarkan pada kontribusi setiap sektor pada komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan nilai PDRB suatu daerah menunjukkan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah. menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Kendari berdasarkan harga konstan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Terjadi gejolak ekonomi pada tahun 2020 dengan LPE sebesar -1,30 persen dikarenakan pandemi *Covid-19*. Pemulihan terjadi pada tahun 2021 dengan LPE meningkat menjadi 3,86 persen. Kemudian di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Kendari menjadi 4,94 persen, hal ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah Kota Kendari mengatasi masalah ekonomi dalam masa pandemi tersebut. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kota Kendari sebesar 3,29 persen, mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar 4,94 persen, juga lebih rendah dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara sebesar 5,35 persen dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5,05 persen.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Kendari Tahun 2020-2024 (%)

No.	Parameter Penduduk	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,36	1,15	9,16	11,21	2,78
2.	Pertambangan dan Penggalan	-2,78	1,70	3,16	-1,60	8,56
3.	Industri pengolahan	-5,41	1,86	3,96	-34,3	2,27
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,05	2,89	8,99	8,37	0,48
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,39	1,37	-1,27	9,33	-8,42
6.	Konstruksi	-2,76	6,32	0,32	0,06	4,73

7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-5,08	7,31	6,10	7,25	4,22
8.	Transportasi dan Pergudangan	-5,00	0,44	4,51	8,28	5,39
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minuman	-6,43	4,96	7,40	5,32	3,97
10.	Informasi dan Komunikasi	8,80	0,30	9,34	8,57	9,31
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,02	6,49	2,97	8,51	-0,21
12.	Real Estate	0,05	0,03	2,62	4,38	5,64
13.	Jasa Perusahaan	-3,87	1,92	12,44	8,51	6,91
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,57	4,08	6,05	9,01	10,73
15.	Jasa Pendidikan	3,76	4,15	5,10	11,02	5,96
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,87	6,76	4,62	1,46	12,76
17.	Jasa lainnya	-5,02	5,78	6,60	19,04	-6,33
Jumlah		-1,30	3,86	4,94	3,29	4,81

BPS Kota Kendari Dalam Angka, 2025

2) Indeks Gini

Ukuran pemerataan pendapatan berdasarkan kelas pendapatan merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah yang dapat dilihat dari indeks ketimpangan atau gini ratio. Sehingga *gini ratio* merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan, dengan *range* antara 0 sampai 1. Semakin koefisien *gini ratio* mendekati 0 maka ketimpangan semakin rendah, sebaliknya apabila koefisien *gini ratio* mendekati 1 maka ketimpangan semakin tinggi. Berikut merupakan data periodik perkembangan *Gini Ratio* Kota Kendari.

Tabel 2.6 Perkembangan *Gini Ratio* Kota Kendari Dibandingkan dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Daerah	Perkembangan <i>Gini ratio</i> Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota kendari	0,374	0,362	0,390	0,387	0,367
Prov. Sulawesi Tenggara	0,389	0,390	0,390	0,371	0,370
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,389	0,381

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, divalidasi BPS Kota Kendari (2020-2025)

Berdasarkan data Tabel 2.6, diketahui koefisien *Gini Ratio* Kota Kendari masih berada di bawah 0,4 point yakni sebesar 0,374 pada tahun 2020. Terjadi penurunan ketimpangan pada tahun 2021 menjadi 0,362 kemudian meningkat menjadi 0,390 pada tahun 2022. Peningkatan ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan terjadinya perlambatan perekonomian dalam berbagai sektor. *Gini rasio* menggambarkan penurunan pada tahun 2023 menjadi 0,387 yang terus menurun menjadi 0,367 pada tahun 2024.

3) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, sejak tahun 2010 IPM dihitung dengan komponen metode baru yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Tabel 2.7 di bawah ini menggambarkan perbandingan nilai IPM tingkat nasional, provinsi, dan daerah Kota Kendari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.7 Perkembangan IPM Kota Kendari Dibandingkan dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Daerah	Perkembangan IPM Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota kendari	84,21	84,83	85,19	85,51	85,97
Prov. Sulawesi Tenggara	71,61	71,82	72,38	72,94	73,62
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, divalidasi BPS Kota Kendari (2020-2025)

Berdasarkan Tabel 2.7, perkembangan IPM Kota Kendari menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2020, IPM Kota Kendari sebesar 84,21

dan meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 85,97 dimana angka tersebut menjadikan Kota Kendari berada di peringkat tertinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berada pada urutan kelima dari Kabupaten/Kota Se- Indonesia. Adapun indikator-indikator pembentuk IPM Kota Kendari dalam kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kendari Berdasarkan Komponen Penyusun Tahun 2020-2024

Komponen Penyusun / Indikator IPM	Perkembangan <i>Gini ratio</i> Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Rerata Lama Sekolah	12,20	12,21	12,52	12,53	12,55
b. Harapan Lama Sekolah	16,62	16,89	16,90	16,91	16,92
c. Angka harapan Hidup	75,10	75,15	75,23	75,34	75,47
d. Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)	14,355	14,356	14,765	15,116	15,651

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, divalidasi BPS Kota Kendari (2020-2025)

4) Angka Kemiskinan

Persoalan mendasar saat ini yang menjadi pusat perhatian tiap pemerintahan daerah adalah permasalahan kemiskinan. Persentase angka kemiskinan wilayah studi pada tahun 2020 sebesar 4,37 persen mengalami peningkatan menjadi 4,87 persen pada tahun 2021. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya gejolak perekonomian yang diakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan, semakin tingginya tingkat inflasi, dan lain sebagainya. Angka kemiskinan berhasil mengalami penurunan menjadi 4,57 persen walaupun sempat kembali sedikit meningkat menjadi 4,59 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 angka kemiskinan berada di angka 4,23 persen. Garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dapat dilihat di tabel sebagai berikut. Tabel 2.9 berikut menggambarkan perbandingan garis kemiskinan tingkat daerah, provinsi dan nasional tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.9 Kondisi Garis Kemiskinan Kota Kendari Dibandingkan dengan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Daerah	Perkembangan Garis Kemiskinan Daerah Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024

Kota kendari	4,34	4,87	4,57	4,59	4,23
Prov. Sulawesi Tenggara	11,00	11,66	11,17	11,43	11,21
Nasional	9,78	10,14	9,54	9,36	8,57

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, divalidasi BPS Kota Kendari (2020-2025)

Secara detail untuk mengamati bagaimana garis kemiskinan, presentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan di wilayah studi tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Perkembangan Garis Kemiskinan, Presentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Dan Keparahannya Kemiskinan di Wilayah Studi Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks keparahan Kemiskinan (P2)
2020	384.379	4,34	0,67	0,16
2021	423.653	4,87	0,84	0,23
2022	454.846	4,57	0,73	0,15
2023	503.369	4,59	0,64	0,13
2024	516.809	4,23	0,70	0,14

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, divalidasi BPS Kota Kendari (2020-2025)

5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran Terbuka Kota Kendari selama kurun waktu 2020-2024 menunjukkan tren yang positif dimana dari grafik yang menyatakan perkembangan cenderung mengalami penurunan. Angka TPT Kota Kendari di Tahun 2020 sebesar 7,08 persen yang kemudian mengalami penurunan hingga di angka 5,67 persen di Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dimana penyerapan tenaga kerja di Kota Kendari meningkat dalam beberapa periode pembangunan seiring dengan terbukanya lapangan kerja baik dalam Kota Kendari maupun daerah sekitar Kota Kendari dengan menggeliatnya *industry* pertambangan. Angka TPT Kota Kendari masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan angka provinsi dan nasional, diperlukan metode penanganan yang tepat agar TPT di Kota Kendari dapat ditekan. Tabel 2.10 menjelaskan perbandingan TPT tingkat daerah Kota

Kendari, provinsi dan nasional ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 2.11 Perkembangan TPT Wilayah Studi dibandingkan dengan TPT Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Daerah	Perkembangan TPT Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota kendari	7,08	5,19	5,23	5,18	5,67
Prov. Sulawesi Tenggara	4,58	3,92	3,36	3,15	3,09
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, divalidasi BPS Kota Kendari (2020-2025)

Untuk memastikan kondisi tingkat pengangguran terbuka kaitannya dengan penduduk berusia 15 tahun ke atas bekerja menurut jenis kegiatan dalam hal ini Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja, disajikan pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berusia 15 tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis kelamin di Kota kendari Tahun 2024

Kegiatan Utama	Jenis kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
▪ Angkatan Kerja	111.545	75.249	186.794
1. Bekerja	105.928	70.278	176.206
2. Pengangguran Terbuka	5.617	4.971	10.588
▪ Bukan Angkatan Kerja	25.745	60.367	86.112
1. Sekolah	10.381	11.882	22.263
2. Mengurus Rumah Tangga	10.294	46.929	57.223
3. Lainnya	5.070	1.556	57.223
Jumlah	137.290	135.616	272.906

Sumber: BPS Kota Kendari Dalam Angka (2025)

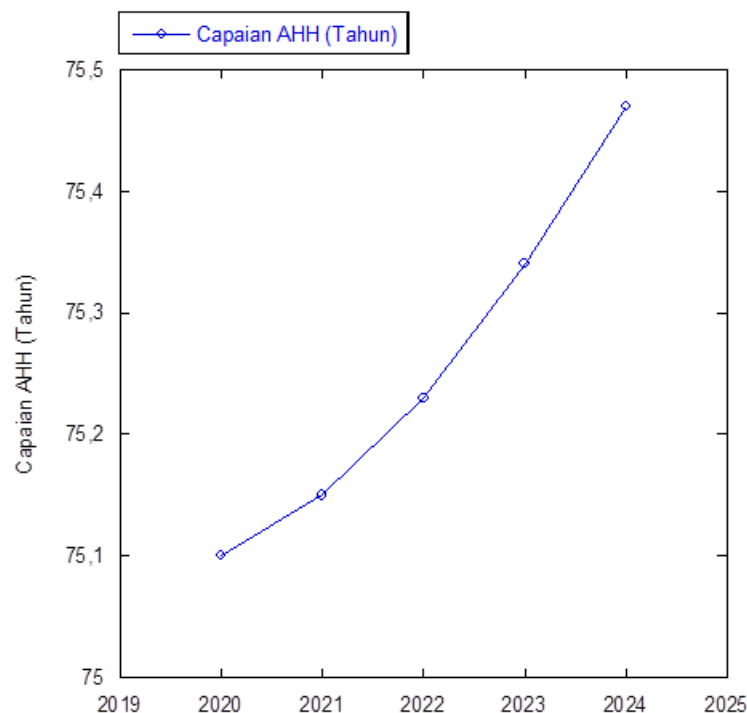
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa jumlah pengangguran terbuka di Kota Kendari berdasarkan jumlah angkatan kerja menurut jenis kelamin, maka dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran laki-laki lebih kecil dari Perempuan dimana laki-laki berjumlah 5,04 persen dan perempuan berjumlah 6,61 persen berdasarkan data BPS tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa adanya

peningkatan jumlah pengangguran perempuan di tahun 2024 sedangkan pengangguran laki-laki menurun, sehingga lowongan kerja untuk perempuan di Kota Kendari masih perlu ditingkatkan lagi.

B. Kesehatan Untuk Semua

1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup sebagai indikasi dari derajat kesehatan masyarakat, diketahui mengalami kenaikan pada Tahun 2024 mencapai 75,47 tahun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan pada tahun 2024 mempunyai harapan hidup mencapai umur 75-76 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2023. Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan menjadi indikator penentu Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) di Kota Kendari. Jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional, AHH Kota Kendari memiliki capaian yang lebih baik. Di tahun 2024 AHH Sulawesi Tenggara berada pada angka 71,88, sedangkan nasional mencapai angka 72,50. Berikut disajikan perkembangan AHH Kota Kendari tahun 2020 hingga 2024 pada Gambar 2.1.

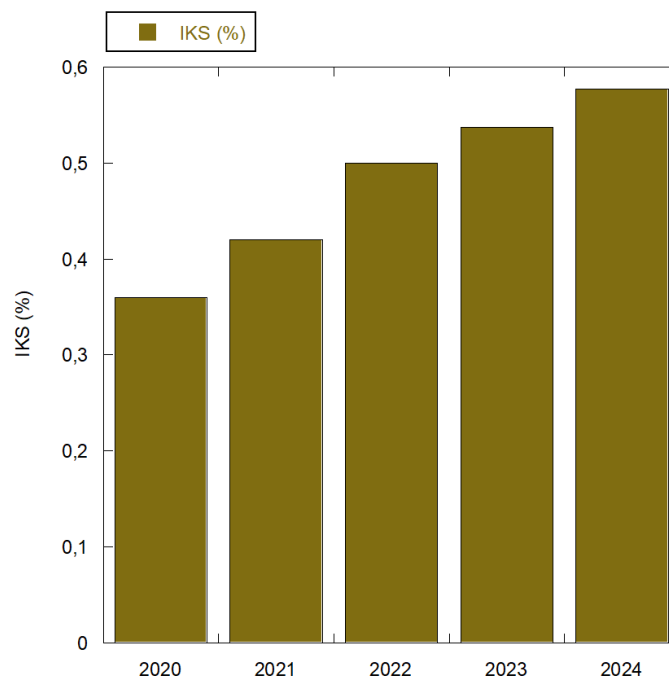


Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Kota Kendari Tahun 2020-2024

2) Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk

mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 13 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Keluarga sehat memiliki tiga kategori kelompok yang dibagi dalam tiga penilaian yaitu kategori Keluarga Sehat dengan lebih besar dari 0.8, Keluarga Pra Sehat dengan nilai IKS 0.5 – 0.8 dan Keluarga Tidak Sehat dengan nilai dibawah 0.5. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa separuh dari keluarga yang ada di Kota Kendari masih berada pada kategori pra sehat. Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah yang menggambarkan perkembangan IKS Kota Kendari dari tahun 2020-2024. Perkembangan indeks keluarga sehat Kota Kendari Tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Gambar 2.2 sebagai berikut.



Gambar 2.2 Perkembangan Indeks Keluarga Sehat Kota Kendari Tahun 2020-2024

3) Stunting

Diketahui bahwa kondisi stunting pada tahun 2020 tertinggi berada di Kecamatan Puuwatu yaitu sebesar 8,8 persen dan Kecamatan Kendari Barat sebesar 8,7 persen, sedangkan sebesar 3,4 persen. Walaupun sempat mengalami penurunan tajam di tahun 2021 dan 2022, prevalensi stunting Kota Kendari sedikit meningkat di tahun 2023 dengan 1,7 persen. Hal ini berkorelasi dengan meningkatnya jumlah balita yang ditimbang menyebabkan

semakin banyak balita yang teridentifikasi stunting atau mengalami gizi buruk maupun gizi kurang. Dibawah ini disajikan data terkait prevalensi gizi buruk dan kurang di Kota Kendari.

Tabel 2.13 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Kendari Tahun 2020-2024

Indikator	Perkembangan ST. Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita Dengan Status Gizi Buruk dan Kurang	352	292	428	255	182
Jumlah Balita yang Ditimbang	30.059	20.872	26.006	24.277	27.980
Presentase	1,17	1,4	1,65	1,05	0,65

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kendari, 2025

Didasarkan pada klasifikasi standar WHO (1999) yang mengelompokkan kondisi gizi buruk dalam 4 kelompok, yaitu rendah dengan nilai dibawah 10%, sedang 10-19%, tinggi 20-29% dan sangat tinggi 30 %. Sedangkan prevalensi gizi buruk Kota Kendari masih berada dibawah angka 5 %. Namun demikian, hal ini tetap menjadi fokus pemerintah sebab status gizi anak terutama pada 1.000 HPK yang sangat krusial dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak, yang mana jika hal ini diabaikan maka akan menyebabkan stunting.

4) Jaminan Kesehatan penduduk

Jaminan kesehatan merupakan bagian dari sistem jaminan nasional yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap orang baik yang bersifat mandiri maupun yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Data peserta JKN per 31 Maret 2024 mencapai 355.156 jiwa meningkat signifikan dari tahun 2020 yang hanya menapai 207.064 jiwa.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1) Indeks Pendidikan

Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat daya saing SDM adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sebagai komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia diperlihatkan pada Tabel

2.14.

Tabel 2.14 Perkembangan Indeks Pendidikan Kota Kendari tahun 2020-2024

Indikator	Perkembangan IP Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata Lama Sekolah	12,2	12,51	12,52	12,53	12,55
Harapan Lama Sekolah	16,62	16,89	16,9	16,9	16,92
Indeks Pendidikan	86,83	88,62	88,68	88,71	88,83

Sumber: BPS Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kota Kendari yang berusia 25 tahun keatas telah mengenyam pendidikan hingga bangku pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU). Pada tahun 2024, usia rata-rata lama sekolah Kota Kendari sebesar 12,55 tahun. Harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024 usia harapan lama sekolah Kota Kendari sebesar 16,92 tahun. Adapun indeks pendidikan pada tahun 2024 sebesar 88,83.

2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan Laporan akhir kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional menunjukkan bahwa Nilai IPLM 2022 sebesar 64,48 (konversi 13,55) masuk dalam kategori sedang. Pada tahun 2023 nilai IPLM menunjukkan kenaikan sebesar 14,54 yaitu 79,02 namun menurun pada tahun 2024 yaitu 72,70. Angka ini lebih tinggi dibandingkan nilai IPLM Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 67,53 persen.

D. Perlindungan Sosial Adaptif dan Kebudayaan Maju

Diketahui terjadi kompleksnya variasi PPKS di Kota Kendari sehingga

pemerintah perlu melakukan penanganan agar tercipta kondisi sosial yang lebih baik di Kota Kendari. Sebagai perbandingan dengan kasus PPKS dari tahun sebelumnya, berikut merupakan persentase penanganan terhadap kasus PPKS di Kota Kendari yang dilihat berdasarkan jumlah PPKS yang ada dan PPKS yang ditangani, disajikan pada Tabel 2.14 sebagai berikut.

Tabel 2.15 Perkembangan Penanganan PPKS Kota Kendari tahun 2020-2024

Uraian	Perkembangan Penanganan PPKS Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PPKS sebenarnya	71.628	155.606	160.889	147.171	160.060
Jumlah PPKS ditangani	65.610	87.617	106.556	125.943	138.439
PPKS Tertangani (%)	92,00	56,31	66,23	85,58	86,49

Sumber: Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2025

Tabel di atas diketahui bahwa jumlah PPKS yang ada di Kota Kendari dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan. Hal ini diakibatkan meningkatnya jumlah PPKS yang ditangani setiap tahun. Jika dilihat pada persentase tahun 2020 ke tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari 92,00% menjadi 86,49%. Tren penurunan mengindikasikan masih terdapat gap antara PPKS yang ditangani dan PPKS yang ada di Kota Kendari. Hal ini perlu perhatian lebih dari pemerintah Kota Kendari khususnya pada pemenuhan SPM bidang sosial, sehingga persentase PPKS yang ditangani dapat meningkat secara kuantitas maupun kualitas.

Kesejahteraan sosial budaya di Kota Kendari menjadi fokus penting dalam pembangunan jangka menengah daerah, dengan penekanan pada pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan penguatan peran agama sebagai landasan spiritual serta moral masyarakat. Pendekatan ini tercermin dalam strategi Pembangunan yang berbasis sosial budaya, yang bertujuan untuk memperkuat identitas local dan kearifan tradisional sebagai panduan dalam merancang kebijakan pembangunan. Kawasan Kota Lama Kendari, misalnya, diidentifikasi memiliki potensi sosial budaya yang signifikan, dan upaya penataan kawasan ini diarahkan untuk mempertahankan warisan budaya sambil mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pendampingan masyarakat dalam

pembangunan, yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, guna meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui integrasi nilai-nilai budaya dalam perencanaan pembangunan, Kota Kendari berupaya menciptakan masyarakat yang sejahtera secara sosial dan budaya, dengan karakter yang kuat dan jati diri yang teguh.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Jika dibandingkan dengan Pembangunan Gender (IPG), IDG Kota Kendari masih berada dibawah IPG. Data yang tersedia diatas menunjukkan bahwa IPG di Kota Kendari cenderung stabil yang berada di kisaran angka 94. Untuk IDG cenderung meningkat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dimana terdapat perempuan sebanyak 10 (*sepuluh*) orang atau 28,57 persen dari total anggota DPRD sebanyak 35 (*tiga puluh lima*) orang. Namun pada tahun 2024 angkanya menurun karena partisipasi perempuan dalam parlemen berkurang dimana jumlah anggota DPRD perempuan hanya 7 (*tujuh*) orang atau 20 persen.

Hal-hal yang mempengaruhi angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Kendari antara lain: perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi sejalan dengan peningkatan persentase perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin dan melahirkan anak lahir hidup dalam 2 tahun terakhir di puskesmas yaitu sebesar 19,46 persen pada tahun 2022 yang meningkat menjadi 32,93 persen pada tahun 2023 (13,47 persen poin). Perbaikan dimensi pemberdayaan terlihat pada perubahan persentase perempuan umur 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA mengalami peningkatan dari tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar 1,72 persen poin. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan proporsi pendidikan minimal SMA perempuan umur 25 tahun ke atas dibandingkan dengan laki-laki umur 25 tahun ke atas yang mengalami peningkatan sebesar 0,92 pada tahun 2022 menjadi 0,97 pada tahun 2023 (meningkat 0,05 persen poin).

2.2 Tema Prioritas: Daya Saing

2.2.1 Ekonomi Hijau dan Biru Berdaya Saing

Implementasi Pembangunan daerah Kota Kendari salah satunya melalui penerapan ekonomi hijau dan biru yang terus didorong dalam pembangunan perekonomian daerah. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Dalam perjalanannya, penerapan ekonomi hijau dan biru di Kota Kendari dapat terlihat pada aktivitas perekonomian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Secara umum, terjadi penurunan daya saing sektor tersebut dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya yang terlihat pada penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap struktur ekonomi Kota Kendari. Peningkatan terlihat dari pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang kontraksi pada tahun 2020 sebesar -1,36 persen hingga 2023 meningkat menjadi 11,21 persen. Menurun pada tahun 2024 menjadi 2,78 persen. Capaian perekonomian sektor pertanian tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16 Perkembangan Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kota Kendari Tahun 2020-2024

Indikator	Perkembangan IP Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	-1,36	1,15	9,06	11,21	2,78

Sumber: BPS Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2025

Target Indeks Ekonomi Hijau Daerah Kota Kendari tahun 2025 pada angka 80,80, hal ini sebagai cerminan komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, efisien sumber daya, dan berkelanjutan. Di saat yang sama, Indeks Ekonomi Biru ditetapkan pada angka 41,88, mencerminkan fokus pembangunan yang mengoptimalkan potensi kelautan dan pesisir secara lestari, termasuk sektor perikanan, pariwisata bahari, dan jasa kelautan. Kedua target ini menunjukkan arah transformasi Kota Kendari menuju model ekonomi yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga responsif terhadap tantangan perubahan iklim dan pelestarian ekosistem.

2.2.2 Sektor Unggulan Daerah

Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, industri pengolahan, serta gerbang konektivitas kawasan timur Indonesia, Kota Kendari memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berorientasi pada transformasi ekonomi, penguatan sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta kelestarian lingkungan. Melalui optimalisasi potensi sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, Kota Kendari diarahkan untuk menyusun agenda pembangunan daerah yang terintegrasi dengan misi nasional, guna mempercepat terwujudnya masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dalam penyelenggaraannya, ditetapkan Asta Cita, Program Prioritas dan Quick Wins RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2.2.3 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Mereka yang digolongkan dalam kelompok umur bekerja adalah berumur 15 tahun ke atas sampai dengan umur 64 tahun. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun keatas digolongkan dalam usia beban ketergantungan. Angka ketergantungan di Kota Kendari selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka ketergantungan tercatat sebesar 50,95, lalu mengalami penurunan berturut-turut menjadi 50,73 di tahun 2021 dan 50,57 pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa beban penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif (anak-anak dan lansia) relatif menurun, yang mencerminkan potensi demografis yang menguntungkan.

Namun demikian, tren ini berubah pada tahun 2023 dan 2024, dimana angka ketergantungan kembali meningkat cukup signifikan menjadi 51,96 dan 54,88. Peningkatan ini mengindikasikan bertambahnya beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk usia produktif. Kondisi ini bisa disebabkan oleh meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia, tingginya angka kelahiran di kelompok usia muda, atau berkurangnya efektivitas kelompok usia kerja dalam mendukung ekonomi rumah tangga. Angka ketergantungan ini kemudian disajikan pada Tabel 2.17 sebagai berikut.

Tabel 2.17 Perkembangan Angka Ketergantungan Kota Kendari Tahun 2020-2024

Uraian	Perkembangan Ketergantungan Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kelompok Usia 0-14	95.249	95.573	96.300	97.867	103.870
Kelompok Usia 60+	21.236	22.307	23.513	26.668	25.980
Usia Kerja	228.622	232.387	236.934	239.684	236.604
Angka Ketergantungan	50,95	50,73	50,57	51,96	54,88

Sumber: BPS Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2025

2.2.4IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Arah pembangunan dalam rangka mewujudkan IPTEK dan Inovasi di Kota Kendari menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka menengah maupun panjang. Diketahui pada distribusi PDRB ADHB Industri Pengolahan mengalami penurunan dari 9,89% pada tahun 2020 menjadi 6,37% pada tahun 2024. Sementara itu, Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK Industri Pengolahan juga menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dimulai dari pertumbuhan negatif sebesar -5,41% pada tahun 2020 dan sedikit meningkat menjadi 2,27% di tahun 2024. Penurunan distribusi PDRB dapat diindikasikan sebagai akibat dari melemahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total perekonomian daerah, yang bisa disebabkan oleh penurunan permintaan, kurangnya investasi, atau gangguan rantai pasok. Di sisi lain, meskipun pertumbuhan sektor ini sempat jatuh drastis pada 2023 (-34,26%), pemulihan pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan operasional atau kebijakan pendukung industri yang mulai membuahkan hasil. Distribusi dan pertumbuhan ekonomi PDRB Industri Pengolahan Kota Kendari Tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Perkembangan Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi PDRB untuk Industri Pengolahan Kota Kendari Tahun 2020-2024

Uraian	Perkembangan PDRB untuk Industri Pengolahan Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Distribusi PDRB ADHB	9,89	9,84	9,84	6,29	6,37
Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK	-5,41	1,86	3,96	-34,26	2,27

Sumber: BPS Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2025

Distribusi PDRB ADHB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Kendari mengalami penurunan tipis dari 1,17% pada tahun 2020 menjadi 1,13% pada tahun 2024, mencerminkan stagnasi kontribusi sektor ini

terhadap keseluruhan PDRB. Sementara itu, Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK sektor ini meningkat dari kondisi negatif sebesar -6,43% di tahun 2020 menjadi 3,97% pada tahun 2024. Penurunan distribusi dapat disebabkan oleh meningkatnya dominasi sektor lain dalam struktur ekonomi, sedangkan peningkatan pertumbuhan menunjukkan adanya pemulihan pasca pandemi COVID-19, didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas pariwisata, serta adaptasi pelaku usaha kuliner dan akomodasi terhadap pola konsumsi baru masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Inovasi diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, secara konsisten Kota Kendari meraih predikat Inovatif sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Adapun data Indeks Inovasi Daerah Kota Kendari dapat dilihat pada Tabel 2.17 sebagai berikut.

Tabel 2.19 Perkembangan Indeks Inovasi daerah Kota Kendari tahun 2020-2024

Uraian	Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota kendari	31,00	54,04	57,28	47,06	55,62
Kategori Indeks	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: BAPPEDA Kota Kendari, 2025

2.2.5 Transformasi Digital dan Penyesuaian Perkembangan Global

Transformasi digital memainkan peran penting dalam pembangunan, baik di kancah daerah, regional, maupun nasional. Hal ini terkait peran transformasi digital mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat daya saing global. Dengan mengadopsi teknologi digital, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang melalui *e-commerce*, *fintech*, dan inovasi teknologi lainnya. Infrastruktur digital yang kuat juga mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah, sehingga mempercepat distribusi informasi, barang, dan jasa. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan berkualitas, baik melalui platform pembelajaran

daring maupun sistem telemedicine. Pembangunan yang berbasis digital juga mendorong keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam serta menciptakan solusi ramah lingkungan. Perkembangan capaian perekonomian sektor informasi dan komunikasi di wilayah studi tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel 2.20 sebagai berikut.

Tabel 2.20 Perkembangan Capaian Perekonomian Sektor Informasi dan Komunikasi Kota Kendari Tahun 2020-2024

Uraian Indikator	Capaian Perkembangan Perekonomian Daerah Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	8,80	0,30	9,34	8,57	9,31

Sumber: BPS Kota Kendari Dalam Angka, 2025

Mengamati data Tabel di atas, Pertumbuhan Ekonomi Kategori Informasi dan Komunikasi diketahui sempat mengalami kontraksi pada tahun 2021 menjadi 0,30 persen yang semula sebesar 8,80 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 9,34 persen dan sempat kembali mengalami penurunan menjadi 8,57 persen di tahun 2023. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 9,31 persen. Pemerintah Kota Kendari hanya memiliki 1 website resmi yang dikelola sendiri untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat dan terdapat sistem informasi lain yang digunakan oleh seluruh OPD se-Kota Kendari dan semua itu berasal dari instansi pusat dan instansi provinsi. Untuk itu setelah diterbitkannya Rencana Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan semua aplikasi dan situs yang digunakan dapat diratakan dalam hal platform data base dan bahasa pemrograman sehingga tercipta integrasi antara sistem.

2.2.6 Aspek Pelayanan Umum dan Tata Kelola Pemerintahan

A. Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Publik. Hasil survey IKM menjadi salah satu indikator ukuran keberhasilan

Pemerintah Kota Kendari dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Adapun survey yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari tahun 2021 menunjukkan rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap mutu pelayanan instansi kelurahan di Kota Kendari adalah baik, berikut disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Beberapa Mutu Pelayanan Instansi di Kota Kendari Tahun 2021

No.	Instansi / OPD	Nilai Indeks	Nilai Konversi	Pelayanan	Keterangan
1	Kecamatan Poasia	3,50	87,69	B	Baik
2	RSUD	3,34	83,50	B	Baik
3	Dinas Kependudukan dan Capil	2,54	85,50	B	Baik
4	DPMPTSP	3,53	86,87	A	Sangat Baik
5	PDAM	2,83	70,91	C	Kurang Baik

Sumber: BAPPEDA Kota Kendari, 2025

Pelayanan DPMPTSP Kota Kendari mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat karena berhubungan langsung dengan perizinan dan pelayanan usaha. Selama lima tahun terakhir, hasil Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP menunjukkan tren yang stabil dan positif, yaitu 88,31 pada tahun (2020) 86,87 (2021) 88,90 (2022), 89,71 (2023), dan 89,82 pada tahun 2024, dengan kategori “Sangat Baik”. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan DPMPTSP cukup baik dan terus mengalami perbaikan. Kemudian ukuran penilaian tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun penilaian untuk instansi Pemerintahan Kota Kendari Penilaian evaluasi SAKIP selama 5 tahun dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut ini.

Tabel 2.22 Perkembangan Hasil Penilaian SAKIP Kota Kendari tahun 2020-2024

No.	Capaian Perkembangan Penilaian SAKIP Tahun-					
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2	Nilai Evaluasi SAKIP	62,02	60,02	64,43	62,86	63,67

Sumber: Inspektorat Kota kendari, 2025

Data di atas menjelaskan nilai evaluasi SAKIP Kota Kendari mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun masih berada pada tingkat akuntabilitas kinerja B. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja pemerintah Kota Kendari masih perlu perbaikan pelayanan instansi pemerintah terhadap masyarakat di Kota Kendari. Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah yang disusun setiap tahun dan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk Kota Kendari, data LPPD tahun 2020 tidak dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak tersedia dalam rekaman penilaian resmi. Namun demikian, pada tahun 2021 nilai LPPD tercatat sebesar 2,51, kemudian mengalami penurunan menjadi 2,04 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, nilai ini kembali meningkat menjadi 2,59, adapun data 2024 dalam proses rilis. Berdasarkan hal ini, telah mengindikasikan adanya perbaikan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja. Fluktuasi nilai tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Kendari untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

B. Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada 4 kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK untuk Kota Kendari pada tahun 2024 kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini audit ini diterbitkan

berdasarkan hasil penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari bebas dari salah saji yang material, kecukupan informasi yang memadai dalam penyajian laporan keuangan dan tidak terdapat kesalahan dalam tata kelola keuangan yang terjadi secara masif. Hal ini dapat diperoleh melalui peningkatan tata kelola program pelaksanaan kegiatan dan keuangan serta realisasi anggaran dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Dengan predikat ini, maka Kota Kendari telah memperoleh WTP sebanyak tiga belas kali berturut-turut.

Selanjutnya rata-rata penyerapan anggaran kegiatan pemerintah Kota Kendari dari tahun 2020 sampai dengan 2024 diketahui meningkat dari angka 87,08 pada Tahun 2022 dan menjadi 91,61 pada tahun 2024. Gambaran keuangan daerah dapat dilihat melalui Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). IKAD Kota Kendari tahun 2024 mencapai 6,43, menempatkan Kota Kendari dalam kategori akses keuangan yang cukup baik. Nilai tersebut mencerminkan ketersediaan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan formal seperti perbankan, lembaga keuangan mikro, serta menunjukkan potensi meningkatnya inklusi keuangan di semua lapisan masyarakat.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan di daerah, salah satunya aspek pendidikan dan pelatihan struktural PNS. Dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara, BKN juga mengeluarkan Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) yang disebutkan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 dimana IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Perkembangan Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) di wilayah studi diketahui pada Tahun 2020 mencapai angka 77,92, meningkat menjadi 75,71 pada tahun 2023, dan menurun menjadi 63,92 tahun 2024. Namun keberhasilan Reformasi Birokrasi pada suatu

instansi pemerintah di Kota Kendari nampak memperlihatkan tren terbaik, berikut disajikan pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Kendari tahun 2020-2024

Uraian Indikator	Capaian Perkembangan Indeks RB Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks reformasi Birokrasi	62,05 (B)	62,05 (B)	62,43 (B)	58,70 (CC)	71,34 (BB)

Sumber: KemenPAN-RB, 2025

D. Pengawasan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa unsur dalam SPIP yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. SPIP Kota Kendari berada pada level tiga dengan skor 3.103 disajikan pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Penilaian Evaluasi SPIP Kota Kendari Tahun 2020-2024

Jumlah OPD yang Dinilai					Skor				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
43	43	15	15	43	3.080	3.016	3.396	3.414	3.103

Sumber: Inspektorat Kota kendari, 2025

E. Standar Pelayanan Minimal

1) Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sebagai ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan. Hal ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang wajib dan berhak diperoleh oleh setiap peserta didik secara minimal. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan mencakup berbagai aspek, termasuk fasilitas, kurikulum, tenaga pendidik, dan layanan pendidikan, disajikan pada Tabel 2.25 berikut ini.

Tabel 2.25 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kota Kendari tahun 2020-2022

No.	Indikator	Stauan	Perkembangan Tahun-
-----	-----------	--------	---------------------

			2020	2021	2022
1	Pendidikan Dasar				
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket A	%	86,48	86,48	98,27
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B	%	75,55	75,55	77,77
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,25	0,25	0,03
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs.	%	0,51	0,51	0,06
	Angka Kelulusan SD/MI	%	96,94	96,94	100
	Angka Kelulusan SMP/MTs.	%	97,02	97,02	100
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs.	%	96,43	96,43	100,33
	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	87,75	87,75	100
2	Pendidikan Kesetaraan				
	Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf	%	99,85	99,85	99,96
3	Pendidikan Anak Usia Dini				
	Tingkat Partisipasi WN Usia 5-6 Tahun Berpartisipasi dalam PAUD	%	38,76	38,76	52,59

Sumber: Indikator SPM Bidang Pendidikan Kota Kendari, 2025

Pada perkembangan penilaian SPM bidang Pendidikan tahun 2023 dan 2024, banyak indikator yang telah menjadi penilaian secara kompleks. Berikut disajikan pada Tabel 2.26 berikut.

Tabel 2.26 Perkembangan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kota Kendari tahun 2023-2024

No.	Indikator	Stausan	Perkembangan	
			2023	2024
1	Jumlah WN Usia 7-18 Tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	%	17,96	24,28
2	Iklim Keamanan SMP	%	71,40	71,98
3	Iklim Kebihnekaan SD	%	73,20	71,84

4	Iklim Kebhinekaan SMP	%	74,72	72,02
5	Iklim Inklusivitas SD	%	54,05	59,19
6	Iklim Inklusivitas SMP	%	58,00	59,57
7	Iklim Keamanan SD	%	70,43	72,54
8	Rerata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	55,42	55,17
9	Rerata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	40,47	46,41
10	Rerata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	69,31	74,41
11	Rerata Kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	60,75	63,58
12	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	75,58	77,56
13	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D-IV	%	78,73	78,74
14	Tingkat Partisipasi WN Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar	%	97,67	99,22
15	Tingkat Partisipasi WN Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	69,95	68,37

Sumber: Indikator SPM Bidang Pendidikan Kota Kendari, 2025

Hal tersebut di atas menunjukkan capaian SPM bidang Pendidikan Kota Kendari cukup bervariasi. Terdapat indikator-indikator yang sudah sangat baik seperti tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar yang mencapai angka 97,67%. Indikator iklim keamanan dan iklim kebhinekaan baik SD dan SMP juga menunjukkan capaian yang baik, yaitu berada diatas 70%. Namun demikian terdapat indikator-indikator yang masih membutuhkan perhatian seperti Iklim inklusivitas SD dan SMP, Rata-rata kemampuan literasi SD, serta Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.

2) Bidang Kesehatan

SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar di bidang kesehatan. Ini adalah standar minimal yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada warga negara. SPM Kesehatan mencakup berbagai layanan, termasuk pelayanan kesehatan

ibu hamil, pelayanan bayi baru lahir, pelayanan pada usia pendidikan dasar, hingga pelayanan bagi penderita hipertensi dan diabetes melitus 1. Jadi, SPM Kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan dasar kesehatan yang memadai. Berikut disajikan Tabel 2.27 yang menggambarkan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.27 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Kendari tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	%	94,39	95,30	90,75	84,99	93,88
2	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Difasilitas Pelayanan KS	%	95,79	99,78	94,90	92,73	95,25
3	Jumlah bayi Baru lahir 0-28 hari yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai dengan Standar	%	97,90	91,41	94,41	71,37	98,83
4	Jumlah Balita Usia 12-23 Bulan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	%	73,21	77,55	96,87	140,09	93,37

	Standar + Jumlah Balita Usia 24-35 Bulan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar + Balita Usia 36-59 Bulan Mendapatkan Pelayanan						
5	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	Covid/ Tdk Dilakukan	50,20	84,57	0,00	95,66
6	Jumlah Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Mendapat Pelayanan Skrining Kesehatan Standar	%	70,06	93,13	78,77	61,20	86,72
7	Jumlah WN Berusia 60 Thn /Lebih yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Standar Minimal Sekali	%	73,71	67,46	82,95	61,67	85,58
8	Jumlah Penderita Hipertensi Usia di Atas 15 Tahun pada Wilayah	%	19,45	74,83	77,85	48,19	79,67

	Kerjanya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						
9	Jumlah Penderita Diabetes Melitus Usia Sama Dengan Di atas 15 tahun Wilayah Kerjanya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	11,39	90,06	109,45	89,39	99,98
10	Jumlah ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	87,70	77,97	83,08	84,27	91,47
11	Jumlah Orang Terduga TBC yang Dilakukan Pemeriksaan Sesuai Standar	%	51,17	91,89	125,85	88,25	99,54
12	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan	%	44,63	114,90	103,16	78,89	75,92

	Sesuai Standar						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

Sumber: Indikator SPM Bidang Kesehatan Kota Kendari, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menunjukkan capaian yang berfluktuasi pada hampir semua indikator Namun rata-rata capaian indikator sudah cukup baik yang menggambarkan pelayanan kesehatan masyarakat juga baik.

3) Bidang Sosial

Pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib. Dalam bidang sosial, SPM mencakup pelayanan untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan-pengemis, dan korban bencana. Pelayanan dasar tersebut meliputi rehabilitasi sosial di dalam dan di luar panti, serta berbagai layanan yang mendukung kesejahteraan kelompok rentan tersebut. Jadi, SPM bidang sosial bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh pelayanan dasar minimal yang layak. Berikut disajikan pada Tabel 2.28 sebagai berikut.

Tabel 2.28 Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kota Kendari Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Perkembangan				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar panti	%	N/A	41,48	80	95,55	96,92
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar panti	%	N/A	100	150	96,56	98,33
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut Usia Terlantar di Luar panti	%	N/A	100	16	95,38	96,92
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya	%	N/A	100	150	93,33	98,33

	Gelandangan dan pengemis di Luar panti						
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kota	%	N/A	67,00	N/A	95,00	88,00

Sumber: Indikator SPM Bidang Sosial Kota Kendari, 2025

Tabel di atas menunjukkan capaian indikator bidang sosial dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dapat dilihat bahwa secara umum capaian pada setiap indikator terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali untuk indikator Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti yang mengalami penurunan drastis di tahun 2022, yang menurun dari 100 persen menjadi 16 persen, akan tetapi angka ini kembali naik di kisaran 96,92 persen di tahun 2024. Terdapat juga capaian yang melebihi angka 100 persen yaitu pada indikator Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.



TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DAERAH

3.1 Tantangan dan Peluang Penentu Keberhasilan Riset dan Inovasi di Daerah

Pembangunan daerah merupakan upaya strategis yang bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah tertentu. Proses ini melibatkan berbagai aspek dan sektor dengan tujuan menciptakan dampak positif yang luas bagi penduduk setempat. Salah satu fokus utama pembangunan daerah adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut. Selain itu, pembangunan daerah juga melibatkan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup secara langsung, tetapi juga membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan daerah berperan penting dalam

meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang baik bagi masyarakat.

Pengembangan daerah juga melibatkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan pelestarian alam, perlindungan sumber daya alam, upaya mitigasi terhadap perubahan iklim, manajemen limbah yang efisien, dan pelestarian ekosistem. Untuk mencapai kemajuan pembangunan yang berhasil di suatu wilayah, kerjasama erat antara entitas pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional sangatlah penting. Dengan menerapkan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dan mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh, pembangunan daerah dapat menciptakan dampak yang positif yang dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi penduduk di wilayah tersebut.

Pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dan memengaruhi satu sama lain dalam berbagai cara. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seringkali menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan daerah. Ketika sektor-sektor ekonomi berkembang, lapangan pekerjaan tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan investasi dalam infrastruktur serta layanan publik menjadi mungkin. Ini meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Sebaliknya, pembangunan daerah yang berhasil juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Kualitas infrastruktur yang baik, seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi, membantu perusahaan lokal dan internasional untuk beroperasi dengan lebih efisien. Selain itu, kebijakan yang mendukung investasi dan kewirausahaan dapat mengundang modal investasi ke daerah tersebut, menciptakan peluang kerja dan meningkatkan produksi ekonomi lokal. Dalam proses ini, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan daerah yang sukses menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan di mana penduduk dapat mengalami peningkatan kualitas hidup sambil menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik. Namun, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan budaya untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari pada tahun 2022 meningkat sebesar 5,36 persen (Badan Pusat Statistik, 2023). Sektor dengan laju pertumbuhan

terbesar pada kategori transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 56,82 persen. Kemudian diikuti oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,89 persen. Kondisi tersebut yang dialami Kota Kendari disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga Sektor yang memiliki dampak besar bagi Kota Kendari didominasi oleh sektor perikanan dan kelautan, pariwisata, industri dan perdagangan dan jasa. Di sisi lain, sektor lain juga memberikan kontribusi bagi laju perekonomian Kota Kendari. Meningkatkan perekonomian diperlukannya riset dan inovasi untuk berkembangnya perekonomian dalam suatu wilayah terutama Kota Kendari.

Peran riset dan inovasi dalam percepatan ekonomi daerah sangat penting dan strategis. Riset yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan dapat membuka peluang baru, meningkatkan daya saing, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui riset, daerah dapat memahami lebih baik potensi sumber daya alam dan manusia yang dimilikinya. Ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk pengembangan lebih lanjut. Inovasi, di sisi lain, melibatkan penerapan ide-ide baru, teknologi, dan praktik bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya inovasi, daerah dapat menciptakan nilai tambah dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, dan layanan. Dengan demikian, riset dan inovasi tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas produk dan layanan, dan membantu daerah bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, investasi dalam riset dan inovasi adalah investasi yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah. Melalui riset, daerah dapat mengidentifikasi peluang ekonomi yang potensial, menganalisis kebutuhan pasar, dan mengembangkan strategi pengembangan ekonomi yang tepat. Riset juga memungkinkan daerah untuk memahami perubahan tren pasar, memprediksi perkembangan masa depan, dan merumuskan kebijakan yang relevan. Data dan analisis yang diperoleh melalui riset dapat membantu pemangku kepentingan lokal membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan bukti.

Disisi lain, inovasi merupakan proses yang melibatkan pengembangan ide, penerapan teknologi, dan strategi pemasaran produk atau layanan yang dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek ekonomi. Dengan inovasi, produk atau layanan yang ada dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, menciptakan nilai tambah bagi konsumen, dan memperluas pangsa pasar. Adopsi

inovasi oleh suatu daerah memiliki potensi untuk meningkatkan daya saingnya di tingkat regional, nasional, bahkan global. Selain itu, inovasi juga dapat menjadi katalisator bagi transformasi ekonomi daerah dengan membuka peluang bagi sektor ekonomi lokal untuk beralih ke sektor yang lebih maju dan berdaya saing, seperti teknologi informasi, energi terbarukan, atau industri kreatif. Di tengah era globalisasi dan transformasi digital, kemampuan untuk berinovasi telah menjadi faktor kunci dalam meraih keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, upaya yang diberikan untuk merangsang riset dan inovasi di daerah dapat membuka pintu menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Uraian Bab ini membahas mengenai tantangan dan peluang riset dan inovasi daerah Kota Kendari yang akan diidentifikasi secara terstruktur dan komprehensif. Sumber data diperoleh melalui data sekunder, *Focus Group Discussion*, Studi Banding Hasil Hasil Kajian Relevan, dan peninjauan lapangan melalui wawancara mendalam atau pengisian permintaan data dengan *platform digital*, kepada *stakeholder* terkait meliputi:

Brida Provinsi Sulawesi Tenggara, dan OPD lingkup Kota Kendari seperti Bappeda Kota Kendari, Badan Keuangan dan Aset, BPBD, BRIDA, BKPSDM, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, DLHK, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, Damkar dan Penyelamatan Kota Kendari, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satpol PP, serta Kabag Kerjasama Setda.

Berdasarkan proses pemerolehan data dari berbagai sumber, maka ditemukan identifikasi tantangan dan peluang riset dan inovasi di wilayah studi yang memerlukan kebijakan secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Sehingga berbagai tantangan dan peluang sebagai penentu pembangunan riset dan inovasi Daerah Kota Kendari ke depan diuraikan sebagai berikut:

3.2 Tantangan

Percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan memanfaatkan riset dan inovasi memiliki sejumlah hambatan yang perlu diatasi agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Beberapa dari tantangan-tantangan ini meliputi:

A. Tantangan Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah

1. Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan kebijakan (*Policy Based Reseach*) Daerah Kota Kendari belum optimal;
2. Integrasi penataan data riset dan inovasi berbasis data digital terpadu satu pintu masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing OPD, dimana BRIDA Kota Kendari baru dibentuk;
3. Ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur dasar riset dan inovasi di daerah belum optimal, sejalan dengan penyediaan infrastruktur perkotaan di berbagai sektor secara teknis pula belum optimal yang secara kompleks meliputi:
 - a) Lingkungan (persampahan),
 - b) Penanganan banjir atau genangan dan kawasan rawan bencana serta kebakaran,
 - c) Peningkatan infrastruktur perkotaan lainnya,
 - d) Kesehatan (*stunting*),
 - e) Penanganan kawasan kumuh,
 - f) Pariwisata (CBD kawasan Teluk Kendari),
 - g) Pelayanan publik,
 - h) Pengembangan kawasan ekonomi,
 - i) Ekonomi dan jasa lingkungan,
 - j) Peningkatan kualitas pangan dan gizi,
 - k) Industri dan Ketenagakerjaan.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan Kebun Raya Kota Kendari sebagai pusat riset, pusat wisata edukasi, dampak terhadap kontribusi peningkatan PAD, serta pengembangan ekonomi dan UMKM belum optimal;
5. Brida Kota Kendari baru dibentuk, sehingga sangat memungkinkan ketersediaan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi berdasarkan program prioritas pembangunan daerah Kota Kendari belum dapat mengakomodir pelaksanaan program tahunan secara menyeluruh;
6. Belum terlaksananya salah satu peran pokok BRIDA dalam memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Daerah Kota Kendari;

7. Belum tersusunnya peraturan tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kota Kendari.
- B. Tantangan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari
1. BRIDA Kota Kendari sebagai lembaga yang mengintegrasikan riset dan inovasi daerah baru terbentuk, yang diharapkan dapat mendorong upaya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk pengembangan sektor unggulan di daerah;
 2. Jejaring stakeholder (*pentahelix*) dalam wadah kolaborasi yang berdasarkan prinsip partisipatif membangun riset dan inovasi daerah tidak dapat optimal, sebab masih dilakukan oleh masing-masing OPD secara parsial;
 3. Keterbatasan keterampilan dan keahlian (Daya Saing Sumber Daya Manusia);
 4. Ketersediaan sarana pendukung riset dan inovasi daerah belum optimal;
 5. Belum terarahnya kegiatan riset yang dilakukan untuk mendukung program prioritas pembangunan Daerah;
 6. Belum dimanfaatkannya hasil riset sebagai nilai tambah dan inovasi daerah sehingga tingkat adopsi inovasi juga rendah;
 7. Keterbatasan *Forecasting* Terhadap Riset dan Inovasi di Masa Depan.
- C. Tantangan Kemitraan Riset dan Inovasi
1. Belum tercapainya pola kerjasama kemitraan riset dan inovasi yang fleksibel di lingkup internal;
 2. Belum diketahuinya peran BRIDA sebagai perangkat daerah penyelenggara riset dan inovasi di Kota Kendari untuk mengakuisisi semua program yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah;
 3. Mitra belum memahami pemanfaatan hasil riset dan inovasi, diakibatkan oleh paradigma tingginya biaya atau pendanaan riset dan inovasi.
 4. Belum optimalnya kemitraan pada kelompok-kelompok usaha dan atau pihak swasta dalam melaksanakan riset dan inovasi misalnya maraknya pembangunan KPR, pembukaan lahan yang menyebabkan tingginya risiko bencana alam;
 5. Keterbatasan sumber daya riset dan inovasi yang dimiliki oleh daerah untuk penguatan pengembangan sektor unggulan, ekonomi biru dan hijau, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk bermitra dengan berbagai pihak, baik akademisi, pelaku usaha maupun komunitas masyarakat.
- D. Budaya Riset dan Inovasi
1. Tidak terputusnya rantai kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, anak-anak

terlantar, serta memudarnya nilai-nilai etika dan moral generasi muda atau milenial saat ini;

2. Masyarakat mengidentifikasi diri dalam kentalnya isu suku, serta kehadiran berbagai ormas yang belum memiliki kajian nyata dalam kontribusinya pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dan taraf hidup masyarakat secara horizontal;
3. Pelaku usaha dan atau masyarakat belum memiliki budaya kreatif dan inovatif untuk menghadapi masalah tingginya biaya produksi, penanganan dampak lingkungan, pengolahan hasil, dan pemasaran produk secara inovatif dan rendahnya pengetahuan digitalisasi.
4. Belum terbentuknya regulasi yang didasarkan atas *Evidence based policy* berbasis data presisi, yakni pendekatan perancangan kebijakan publik yang mengutamakan penggunaan ilmu pengetahuan, data empiris, dan riset objektif untuk memandu pengambilan keputusan-keputusan teknis dan strategis;
5. Belum membudayanya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
6. Belum terlaksananya pendampingan oleh BRIDA kepada perusahaan pemula berbasis riset dan inovasi produk dan usaha;
7. Belum terinventarisasinya perlindungan pengetahuan dan atau teknologi masyarakat oleh BRIDA.

E. Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

1. Belum terlaksananya implementasi inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah;
2. Belum sesuai kebijakan program prioritas yang diemban oleh lingkup pemerintah di bawahnya sebagai hasil musrembang, dengan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan klaster produk unggulan daerah;
3. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan program prioritas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota khususnya berkaitan dengan aktivitas berbasis riset dan inovasi daerah.

F. Penyelerasan dengan Perkembangan Global

1. Belum terarahnya perhatian terhadap fenomena dan isu-isu global yang dapat diadopsi dalam program pembangunan daerah dengan pendekatan riset dan inovasi;
2. Tantangan keberlanjutan, dalam bentuk inovasi yang harus mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem

dan genetik, dan beradaptasi dengan perubahan iklim merupakan isu global yang harus diperhatikan dalam pengembangan inovasi seperti *blue carbon and trade carbon* sebagai mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK, dan juga Pemanfaatan Teknologi Radiasi untuk Pangan Aman dan Berkualitas;

3. Secara umum, belum terbangunnya akses ruang kerjasama lingkup internasional yang lebih luas dan terbuka, terutama dalam menjamin peran daerah dalam pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

3.3 Peluang

Era globalisasi dan perubahan digital yang cepat, riset dan inovasi menjadi unsur kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Secara ideal, percepatan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada riset dan inovasi seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, untuk mencapai target ini, berbagai hambatan harus diatasi. Tantangan-tantangan ini mencakup keterbatasan dalam infrastruktur penelitian, rendahnya tingkat kolaborasi antara sektor publik dan swasta, masalah pendanaan yang terbatas, kekurangan keterampilan yang relevan, serta kesulitan dalam memastikan keberlanjutan dan adopsi inovasi. Meskipun tantangan-tantangan ini dapat menjadi hambatan, ada juga peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasinya.

A. Peluang Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah

1. Adanya regulasi yang dikeluarkan oleh BRIN terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
2. Adanya sistem teknologi digital yang dapat mengintegrasikan penataan basis data riset dan inovasi, Dimana infrastruktur pendukung dan jaringan digital merupakan peran aktif Dinas Komunikasi dan Informatika untuk implementasi riset dan inovasi di daerah;
3. Adanya perbaikan manajemen dan pengelolaan kebun raya daerah sebagai pusat riset, pusat wisata edukasi, peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi dan UMKM;
4. Adanya dukungan dari Kepala daerah dan TAPD dalam menyediakan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi daerah yang diperlukan dalam rangka menerapkan kebijakan berbasis bukti;
5. Peningkatan kompetensi SDM dan penyediaan sistem digital yang dapat

memudahkan memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah.

B. Peluang Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

1. Adanya kebijakan BRIDA menjadi Perangkat Daerah pelaksana riset satu pintu;
2. Adanya forum pelaku riset jejaring stakeholder/ pentahelix secara berkala dan berkelanjutan;
3. Peningkatan kompetensi SDM di BRIDA secara berkesinambungan;
4. Menyusun program riset berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dengan prinsip riset partisipatif berbasis masyarakat pelaku bisnis (*Community Based Participatory Research*);
5. Adanya sebuah lembaga yang bertindak sebagai inkubator bisnis sebagai upaya pengendalian proses hilirisasi riset dan inovasi daerah, meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil riset dan inovasi;
6. Adanya program penganggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana pendukung riset dan inovasi daerah.

C. Peluang Kemitraan Riset dan Inovasi

1. Adanya regulasi yang mendukung untuk kerjasama dibidang riset dan inovasi baik melalui SDM maupun pendanaan;
2. Adanya strategi promosi peran BRIDA sebagai pusat riset dan inovasi di daerah;
3. Diseminasi hasil riset dan inovasi.

D. Peluang Budaya Riset dan Inovasi

1. Adanya kebijakan pimpinan yang mengarahkan pengambilan kebijakan berbasis data presisi;
2. Adanya pemberian insentif/ pengakuan bagi pelaku riset dan inovasi serta bagi pengguna hasil riset dan inovasi;
3. Adanya forum perusahaan pemula berbasis riset;
4. Adanya system berbasis digital untuk menginventarisasi perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.

E. Peluang Keterpaduan Riset dan Inovasi

1. Pengembangan dan promosi produk unggulan berdasarkan potensi daerah;
2. Pemerintah Daerah menetapkan satu atau lebih program prioritas pembangunan berbasis pengembangan produk unggulan daerah yang akan didorong.
3. Adanya sinkronisasi program prioritas nasional, program prioritas daerah, arah kebijakan riset nasional dan arah kebijakan riset daerah.

F. Peluang Penyelerasan dengan Perkembangan Global

1. Adanya peningkatan literasi, informasi dan pengetahuan berkaitan dengan isu-isu strategis di level internasional yang relevan dengan program pembangunan daerah dan optimalisasi kolaborasi/kemitraan riset;
2. Adanya perluasan jejaring kolaborasi dan adopsi teknologi serta program-program riset dan inovasi yang dapat menjadikan daerah dapat lebih maju dan berdaya saing.

Tabel 3.1 Matriks Penguatan Ekosistem Riset Dan Inovasi Daerah Kota Kendari 2025-2030

No.	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang dihadapi Daerah	Kondisi yang diharapkan
Tema prioritas riset dan inovasi yang dipilih daerah Kota Kendari: “Membangun Riset dan Inovasi untuk SDM dan Ekonomi Berdaya Saing, Menuju Kota Layak Huni, Unggul dan Berkelanjutan”. Tema Prioritas ini ditetapkan untuk mendukung visi daerah Kota Kendari yaitu “Terwujudnya Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang Semakin Maju, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan” dengan 5 (lima) pokok misi: (1) Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter, (2) Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pelayanan, Inovasi dan Digitalisasi, (3) Mengembangkan perlindungan sosial yang adaptif dan transformasi sosial, (4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendorong perkembangan kawasan perkotaan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan tanggap bencana, dan (5) Mengembangkan perekonomian daerah yang kokoh dan berkeadilan berbasis komoditas unggulan. Sehingga ditetapkan fokus riset dan inovasi untuk mendukung program pembangunan dan pengembangan bidang: a) Lingkungan (persampahan), b) Penanganan banjir atau genangan dan kawasan rawan bencana serta kebakaran, c) Peningkatan infrastruktur perkotaan lainnya, d) Kesehatan (<i>stunting</i>), e) Kemiskinan (kemiskinan ekstream), f) Penanganan kawasan kumuh, g) Pariwisata (CBD kawasan Teluk Kendari), h) Pelayanan publik, i) Nilai-nilai sosial budaya, j) Pengembangan kawasan ekonomi dan optimalisasi PAD, k) Ekonomi dan jasa lingkungan, l) Peningkatan kualitas pangan dan gizi, m) Industri dan Ketenagakerjaan. Kondisi ekosistem riset dan inovasi yg mendukung penguatan tema prioritas;				
1.	Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari. 1. Reformasi kebijakan;	1.Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan kebijakan (<i>Policy Based Reseacrh</i>) Daerah Kota Kendari belum optimal;	1. Adanya regulasi yang dikeluarkan oleh BRIN terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi; 2. Tersusunnya Peraturan Wali	1. Dikeluarkannya kebijakan spesifik berkaitan dengan implementasi riset dan inovasi daerah berupa Perda/Perwali Kota

No.	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang dihadapi Daerah	Kondisi yang diharapkan
	2. Penataan basis data 3. Pengembangan infrastruktur dasar; 4. Pengelolaan kebun raya; 5. Penyediaan anggaran; 6. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	2. Belum tersusunnya peraturan tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kota Kendari. 3. Integrasi penataan data riset dan inovasi berbasis data digital terpadu satu pintu masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing OPD, dimana BRIDA Kota Kendari baru dibentuk; 4. Ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur dasar riset dan inovasi di daerah belum optimal, sejalan dengan penyediaan infrastruktur perkotaan di berbagai sektor secara teknis pula belum optimal yang secara kompleks; 5. Pengelolaan dan pemanfaatan Kebun Raya Kota Kendari sebagai pusat riset, pusat wisata edukasi, dampak terhadap kontribusi peningkatan PAD, serta pengembangan ekonomi dan UMKM belum optimal; 6. Brida Kota Kendari baru dibentuk, sehingga sangat memungkinkan ketersediaan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi	Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Kendari. 3. Adanya sistem teknologi digital yang dapat mengintegrasikan penataan basis data riset dan inovasi, dimana infrastruktur pendukung dan jaringan digital merupakan peran aktif Dinas Komunikasi dan Informatika untuk implementasi riset dan inovasi di daerah; 4. Ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur dasar riset dan inovasi di daerah, sejalan dengan penyediaan infrastruktur perkotaan di berbagai sektor didukung oleh Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari (2025-2029) 5. Adanya perbaikan manajemen dan pengelolaan kebun raya daerah sebagai pusat riset, pusat wisata edukasi, peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi dan UMKM;	Kendari. 2. Belum tersedia Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sementara Penyusunan). 3. Terintegrasinya data hasil riset dan inovasi melalui aplikasi teknologi digital oleh Brida Kota Kendari (SIDa) dan sebagainya. 4. Tersedianya infrastruktur yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam implementasi riset dan inovasi di daerah sejalan dengan rencana pembangunan daerah. 5. Termanfaatkannya secara optimal kebun raya daerah sebagai pusat riset, pusat wisata edukasi, peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi dan UMKM. 6. Pemerintah Daerah memprioritaskan ketersediaan sumber penganggaran dan skema

No.	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang dihadapi Daerah	Kondisi yang diharapkan
		berdasarkan program prioritas pembangunan daerah Kota Kendari belum dapat mengakomodir pelaksanaan program tahunan secara menyeluruh; 7. Belum terlaksananya salah satu peran pokok BRIDA dalam memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Daerah Kota Kendari;	6. Adanya dukungan dari Kepala daerah dan TAPD dalam menyediakan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi daerah yang diperlukan dalam rangka menerapkan kebijakan berbasis bukti; 7. Peningkatan kompetensi SDM dan penyediaan sistem digital yang dapat memudahkan memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah.	penganggaran riset dan inovasi daerah dalam rangka menerapkan kebijakan berbasis bukti dan terbuka skema penganggaran dari swasta/lembaga riset lainnya. 7. BRIDA memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah melalui sistem manajemen berbasis digital.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari: 1. Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; dan 2. Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	1. BRIDA Kota Kendari sebagai lembaga yang mengintegrasikan riset dan inovasi daerah baru terbentuk, yang diharapkan dapat mendorong upaya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk pengembangan sektor unggulan di daerah; 2. Jejaring stakeholder (<i>pentahelix</i>) dalam wadah kolaborasi yang berdasarkan prinsip partisipatif membangun riset dan inovasi daerah tidak dapat optimal, sebab masih dilakukan oleh masing-masing OPD secara	1. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kota Kendari agar BRIDA menjadi perangkat daerah pelaksana riset satu pintu; 2. Adanya forum pelaku riset jejaring stakeholder/ pentahelix secara berkala dan berkelanjutan; 3. Peningkatan kompetensi SDM di BRIDA Kota kendari secara berkelanjutan; 4. Menyusun program riset berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dengan prinsip riset	1. BRIDA menjadi Lembaga yang bisa mengintegrasikan seluruh riset dan inovasi di daerah. 2. Terbangunnya jejaring akses kerjasama/kolaborasi yang lebih luas antar organisasi riset baik dengan pusat (BRIN) maupun BRIDA, Bappeda, Balitbang lingkup Pemda Kab/Kota atau stakeholder lainnya. 3. Kapasitas SDM riset di

No.	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang dihadapi Daerah	Kondisi yang diharapkan
		parsial; 3. Keterbatasan keterampilan dan keahlian (Daya Saing Sumber Daya Manusia); 4. Ketersediaan sarana pendukung riset dan inovasi daerah belum optimal; 5. Belum terarahnya kegiatan riset yang dilakukan untuk mendukung program prioritas pembangunan Daerah; 6. Belum dimanfaatkannya hasil riset sebagai nilai tambah dan inovasi daerah sehingga tingkat adopsi inovasi juga rendah; 7. Keterbatasan <i>Forecasting</i> Terhadap Riset dan Inovasi di Masa Depan.	partisipatif berbasis <i>Community Based Participatory Research</i>; 5. Adanya sebuah lembaga yang bertindak sebagai inkubator bisnis sebagai upaya pengendalian proses hilirisasi riset dan inovasi daerah, meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil riset dan inovasi; 6. Adanya program penganggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana pendukung riset dan inovasi daerah. 7. Brida akan melakukan proses memprediksi kejadian atau nilai riset dan inovasi di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren untuk mendukung peningkatan dan evaluasi program tahunan.	BRIDA sesuai kompetensi 4. Hasil riset dijadikan acuan untuk mendukung program prioritas Pembangunan 5. Hasil riset yang memiliki nilai tambah dan bernilai inovasi bagi daerah. 6. Sarana pendukung riset dan inovasi daerah yang memadai. 7. BRIDA melaksanakan proses <i>Forecasting</i> yakni memprediksi kejadian atau nilai riset dan inovasi di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren untuk mendukung peningkatan dan evaluasi program tahunan
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi: 1. Penguatan kemitraan antar kelembagaan; 2. Peningkatan difusi inovasi;	1. Belum tercapainya pola kerjasama kemitraan riset dan inovasi yang fleksibel di lingkup internal; 2. Belum diketahuinya peran BRIDA sebagai perangkat daerah penyelenggara riset dan	1. Adanya regulasi yang mendukung untuk kerjasama dibidang riset dan inovasi baik melalui SDM maupun pendanaan; 2. Adanya strategi dan peran BRIDA sebagai pusat riset	1. Terciptanya pola Kerjasama yang fleksibel dan dapat mendukung ekosistem riset dan inovasi daerah. 2. Mitra mengetahui peran BRIDA sebagai pusat riset

No.	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang dihadapi Daerah	Kondisi yang diharapkan
	3. Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan inovasi kepada pelaku inovasi.	inovasi di Kota Kendari untuk mengakuisisi semua program yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah; 3. Mitra belum memahami pemanfaatan hasil riset dan inovasi, diakibatkan oleh paradigma tingginya biaya atau pendanaan riset dan inovasi. 4. Belum optimalnya kemitraan pada kelompok-kelompok usaha dan atau pihak swasta dalam melaksanakan riset dan inovasi misalnya maraknya pembangunan KPR, pembukaan lahan yang menyebabkan tingginya risiko bencana alam; 5. Keterbatasan sumber daya riset dan inovasi yang dimiliki oleh daerah untuk penguatan pengembangan sektor unggulan, ekonomi biru dan hijau, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk bermitra dengan berbagai pihak, baik akademisi, pelaku usaha maupun komunitas masyarakat.	dan inovasi untuk mengakuisisi semua program yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah; 3. Diseminasi hasil riset dan inovasi, dukungan penganggaran, dan adanya dukungan kebijakan atas kemudahan investasi dan penanaman modal; 4. Peningkatan kemitraan pada kelompok-kelompok usaha dan atau pihak swasta dalam melaksanakan riset dan inovasi, salah satunya melalui kewajiban pemeliharaan dan penanggulangan dampak lingkungan pada pembangunan kawasan perumahan dan pembukaan lahan oleh pemerintah Daerah Kota Kendari. 5. Adanya program yang mengharuskan peningkatan kapasitas SDM di lingkup pemerintah Kota Kendari dan BRIDA sendiri.	dan inovasi di daerah. 3. Mitra memahami dan memanfaatkan hasil riset dan inovasi. 4. Kewajiban pemeliharaan dan penanggulangan dampak lingkungan perkotaan bagi kelompok-kelompok usaha atau pihak swasta. 5. Program peningkatan kapasitas SDM di lingkup pemerintah Kota Kendari dan BRIDA melalui pelatihan dan sejenisnya, serta membuka ruang untuk pengembangan diri bagi Aparatur Sipil Negara.
4.	Budaya Riset dan Inovasi 1. Kemiskinan dan kemerosotan nilai-	1. Tidak terputusnya rantai kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, anak-anak terlantar, serta memudarnya nilai-nilai	1. Termuat program prioritas pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dan kemerosotan nilai-nilai	1. Terlaksananya program prioritas pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan

No.	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang dihadapi Daerah	Kondisi yang diharapkan
	nilai budaya dan kearifan lokal; 2. Promosi dan Kampanye Inovasi; 3. Apresiasi Prestasi Inovasi; 4. Inventarisasi Pengembangan dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	etika dan moral generasi muda atau milenial saat ini; 2. Masyarakat mengidentifikasi diri dalam kentalnya isu suku, serta kehadiran berbagai ormas yang belum memiliki kajian nyata dalam kontribusinya pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dan taraf hidup masyarakat secara horizontal; 3. Pelaku usaha dan atau masyarakat belum memiliki budaya kreatif dan inovatif untuk menghadapi masalah tingginya biaya produksi, penanganan dampak lingkungan, pengolahan hasil, dan pemasaran produk secara inovatif dan rendahnya pengetahuan digitalisasi. 4. Belum terbentuknya regulasi yang didasarkan atas <i>Evidence based policy</i> berbasis data presisi, yakni pendekatan perancangan kebijakan publik yang mengutamakan penggunaan ilmu pengetahuan, data empiris, dan riset objektif untuk memandu pengambilan keputusan-keputusan teknis	budaya dan kearifan lokal; Mendukung program pemerintah pusat dalam Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi Merah Putih dengan salah satu target yaitu mengentaskan kemiskinan ekstrem; 2. Termuat program prioritas pemerintah daerah dalam peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya melalui program pendidikan untuk semua; 3. Adanya dukungan penganggaran dalam mendukung pengembangan riset dan inovasi daerah; 4. Adanya kebijakan pimpinan yang mengarahkan pengambilan kebijakan berbasis data presisi; 5. Adanya pemberian insentif/ pengakuan bagi pelaku riset dan inovasi serta bagi pengguna hasil riset dan inovasi; 6. Adanya forum perusahaan pemula berbasis riset; 7. Adanya sistem berbasis digital untuk menginventarisasi	dan kemiskinan ekstrem, serta kemerosotan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal; 2. Terlaksananya program prioritas pemerintah daerah dalam peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya melalui program pendidikan untuk semua; 3. Dukungan riil penganggaran untuk percepatan pengembangan riset dan inovasi daerah 4. Terbentuknya regulasi yang didasarkan atas <i>Evidence based policy</i> berbasis data presisi. 5. Terbangunnya budaya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi. 6. Riset dan inovasi dapat mendukung pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset.

No.	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang dihadapi Daerah	Kondisi yang diharapkan
		dan strategis; 5. Belum membudayanya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi; 6. Belum terlaksananya pendampingan oleh BRIDA kepada perusahaan pemula berbasis riset dan inovasi produk dan usaha; 7. Belum terinventarisasinya perlindungan pengetahuan dan atau teknologi masyarakat oleh BRIDA.	perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	7. BRIDA menjadi fasilitator untuk perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah 1. Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah; 2. Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah; 3. Kesesuaian	1. Belum terlaksananya implementasi inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah; 2. Belum sesuai kebijakan program prioritas yang diemban oleh lingkup pemerintah di bawahnya sebagai hasil musrembang, dengan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan klaster produk unggulan daerah; 3. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan program prioritas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan	1. Pengembangan dan promosi produk unggulan berdasarkan potensi daerah; 2. Pemerintah Daerah menetapkan satu atau lebih program prioritas pembangunan berbasis pengembangan produk unggulan daerah yang akan didorong. 3. Adanya sinkronisasi program prioritas nasional, program prioritas daerah provinsi dan pemerintah Kota Kendari, arah kebijakan riset nasional dan arah kebijakan riset di daerah.	1. Implementasi inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah. 2. Kebijakan program prioritas pemerintah daerah Kota Kendari perlu disesuaikan dengan hasil identifikasi klaster produk unggulan daerah yang dimiliki. 3. Kebijakan daerah harus disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Berbagai program dan

No.	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang dihadapi Daerah	Kondisi yang diharapkan
	kebijakan secara hierarki antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota Kendari	Pemerintah Kota khususnya berkaitan dengan aktivitas berbasis riset dan inovasi daerah.		kegiatan strategis harus menjadi prioritas yang selaras dengan pemerintah Pusat dalam rangka mendukung program pembangunan nasional.
6.	Penyelerasan dengan Perkembangan Global 1. Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah; 2. Tantangan keberlanjutan, dalam bentuk inovasi yang harus mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem dan genetik, dan beradaptasi dengan perubahan iklim; 3. Penguatan kerjasama antar	1. Belum terarahnya perhatian terhadap fenomena dan isu-isu global yang dapat diadopsi dalam program pembangunan daerah dengan pendekatan riset dan inovasi; 2. Tantangan keberlanjutan, dalam bentuk inovasi yang harus memperhatikan dampak pada lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem dan genetik, dan beradaptasi dengan perubahan iklim merupakan isu global yang harus diperhatikan dalam pengembangan inovasi seperti <i>blue carbon and trade carbon</i> sebagai mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK, dan juga Pemanfaatan Teknologi Radiasi untuk Pangan Aman dan Berkualitas; 3. Secara umum, belum terbangunnya akses ruang	1. Adanya peningkatan literasi, informasi dan pengetahuan berkaitan dengan isu-isu strategis dilevel internasional yang relevan dengan program pembangunan daerah dan optimalisasi kolaborasi/kemitraan riset; 2. Dukungan rencana pembangunan daerah pada inovasi yang harus mempertimbangkan dampak lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem dan genetik, dan beradaptasi dengan perubahan iklim seperti <i>blue carbon and trade carbon</i> sebagai mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK, dan juga Pemanfaatan Teknologi RADIANA; 3. Adanya perluasan jejaring	1. Penetapan program prioritas Pembangunan daerah mengacu pada permasalahan/isu-isu global yang relevan dengan kondisi di daerah. 2. Inovasi yang harus mempertimbangkan dampak lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem dan genetik, dan beradaptasi dengan perubahan iklim seperti <i>blue carbon and trade carbon</i> sebagai mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK, dan juga Pemanfaatan Teknologi RADIANA; 3. Terbangunnya akses kerjasama riset dan inovasi lingkup

No.	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang dihadapi Daerah	Kondisi yang diharapkan
	daerah, nasional, dan internasional.	kerjasama lingkup internasional yang lebih luas dan terbuka, terutama dalam menjamin peran daerah dalam pencapaian tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).	kolaborasi dan adopsi teknologi serta program-program riset dan inovasi yang dapat menjadikan daerah dapat lebih maju dan berdaya saing.	internasional untuk menyelesaikan permasalahan daerah.

Sumber: Diolah Tim Ahli, 2025



ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH

Riset dan inovasi di daerah merupakan pangkal dari perencanaan dan implementasi Pemerintah Daerah. Kebijakan yang berlandaskan pada riset dan inovasi diharapkan mampu membangun efektivitas (tepat sasaran) dan efisiensi (penghematan) anggaran. Efektivitas dan efisiensi ini yang seharusnya bisa diukur (*mesurable*) melalui riset sebelum kebijakan direncanakan dan diimplementasikan. Sedangkan, inovasi berperan memberikan dampak optimal karena adanya peran rekayasa dan teknologi kebijakan publik. Ini merupakan definisi kebijakan berbasis bukti bahwa riset dan inovasi menjadi landasan perencanaan dan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.

Ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di daerah (Pasal 1 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah). Pada dasarnya, ekosistem riset dan inovasi di daerah menjadi keragaan interaksi antar elemen yang mendukung terciptanya riset dan inovasi di daerah. Melalui BRIN, Pemerintah Indonesia mendorong adanya perbaikan dan pematapan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Dengan terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang mumpuni di daerah, Pemerintah berekspektasi adanya peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui basis riset dan inovasi yang dimiliki. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat diakselerasi melalui riset dan inovasi terutama dalam implementasi inovasi teknologi.

Sebagaimana Pasal 23 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, ekosistem riset dan inovasi di daerah terbagi menjadi elemen antara lain: (1) kebijakan dan infrastruktur riset inovasi di daerah; (2) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset inovasi di daerah; (3) kemitraan riset inovasi di daerah; (4) budaya riset inovasi di

daerah; (5) keterpaduan riset inovasi di daerah; dan (6) penyelarasan dengan perkembangan global. Analisis kesenjangan pada bagian ini dibutuhkan untuk mengkaji standar ekosistem yang disarankan BRIN dengan realitas yang ada saat ini, sehingga pemerintah daerah melalui BRIDA dapat memperbaiki dan mengembangkan ekosistem berdasarkan analisis kesenjangan ini.

4.1 Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Di Daerah

Elemen pertama dalam analisis kesenjangan ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah kebijakan dan infrastruktur. Ini merupakan hal mendasar yang berkenaan dengan daya dukung pemerintah daerah untuk memasukkan agenda pengembangan ekosistem riset dan inovasi ke dalam agenda kebijakan. Hal ini juga termasuk ketersediaan infrastruktur dan upaya melengkapinya melalui kebijakan pemerintah daerah. Elemen kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah merupakan elemen utama untuk mengembangkan ekosistem riset dan inovasi. Di dalamnya, terdapat 6 indikator terkait kebijakan dan infrastruktur. Melalui 6 indikator ini, pemerintah daerah dapat memiliki acuan yang cukup untuk menentukan kekurangan (gap) antara standar ekosistem riset dan inovasi dengan realitas yang ada di daerah.

Tabel 4.1 Analisis Kesenjangan Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
1. KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH				
a)	Reformasi kebijakan	- Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan kebijakan (<i>Policy Based Reseach</i>) oleh kepala daerah belum optimal. - Belum tersusunnya peraturan tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kota Kendari.	- Dikeluarkannya kebijakan spesifik berkaitan dengan implementasi riset dan inovasi daerah berupa Perda/Perwali Kota Kendari. - Belum tersedia Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sementara Penyusunan).	Tidak tersedianya regulasi baik Perda maupun Perwali tentang pengaturan implementasi pelaksanaan riset satu pintu oleh BRIDA, akan menyebabkan pelaksanaan riset dilakukan secara parsial oleh masing-masing perangkat daerah dan pemanfaatan hasilnya tidak dapat dikoordinir secara optimal. Penyusunan RIPJ IPTEK selaras dengan RPJMD Kota Kendari dan mendukung keberhasilan program pembangunan daerah di bidang riset dan inovasi secara sistematis dan berkelanjutan.
b)	Penataan basis data	Integrasi penataan data riset dan inovasi berbasis data digital terpadu satu pintu masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing OPD, dimana BRIDA Kota Kendari baru dibentuk	Terintegrasinya data hasil riset dan inovasi melalui aplikasi teknologi digital oleh Bida Kota Kendari (SIDa) dan sebagainya	Tidak adanya media penataan basis data riset dan inovasi di internal BRIDA bertentangan dengan tujuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang inovasi daerah berbagai bidang kehidupan. Sedangkan BRIDA akan kesulitan dalam menetapkan program dan atau kegiatan secara kontinyu, mengukur kinerja dan evaluasi, sehingga lebih jauh akan berdampak terhadap hilangnya kepercayaan publik dan daerah.

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
c)	Pengembangan infrastruktur dasar;	Ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur dasar riset dan inovasi di daerah belum optimal, sejalan dengan penyediaan infrastruktur perkotaan di berbagai sektor secara teknis pula belum optimal yang secara kompleks	Tersedianya infrastruktur yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam implementasi riset dan inovasi di daerah sejalan dengan rencana pembangunan daerah	Infrastruktur dasar riset seperti gedung pusat peragaan IPTEK dan inkubasi bisnis daerah, laboratorium riset dan pusat studi lapangan atau <i>techno park</i> (Taman Sains dan Teknologi) berperan penting dalam implementasi pelaksanaan riset dan inovasi di daerah. Sehingga diperlukan kolaborasi dalam pemanfaatan bersama fasilitas infrastruktur yang sudah ada di stakeholder atau lembaga riset di daerah. Namun, untuk menunjang infrastruktur dasar riset, maka perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur dasar perkotaan berbagai sektor (dalam arti luas) secara memadai.
d)	Pengelolaan kebun raya;	Pengelolaan dan pemanfaatan Kebun Raya Kota Kendari sebagai pusat riset, pusat wisata edukasi, dampak terhadap kontribusi peningkatan PAD, serta pengembangan ekonomi dan UMKM belum optimal	Termanfaatkannya secara optimal kebun raya daerah sebagai pusat riset, pusat wisata edukasi, peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi dan UMKM	Pemanfaatan Kebun Raya daerah Kota Kendari masih terbatas pada lingkup pusat kajian pengembangan tanaman, dan sebagai tempat wisata pilihan bagi masyarakat dan kelompok pelajar. Namun dalam pengelolaannya pusat wisata edukasi tersebut belum berdampak pada peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi serta kemampuan literasi untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing.

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
e)	Penyediaan anggaran;	Brida Kota Kendari baru dibentuk, sehingga sangat memungkinkan ketersediaan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi berdasarkan program prioritas pembangunan daerah Kota Kendari belum dapat mengakomodir pelaksanaan program tahunan secara menyeluruh	Pemerintah Daerah memprioritaskan ketersediaan sumber penganggaran dan skema penganggaran riset dan inovasi daerah dalam rangka menerapkan kebijakan berbasis bukti dan terbuka skema penganggaran dari swasta/lembaga riset lainnya	Anggaran riset belum diatur dalam sebuah regulasi yang mengikat, sehingga implemetasi penganggaran secara eksisting hanya bersumber dari APBD dan persentase penggunaannya masih rendah. Tidak adanya sumber penganggaran riset lainnya menyebabkan akses semakin terbatas. Oleh karenanya perlu didorong skema penganggaran riset yang bersumber dari swasta (NGO) atau mitra lembaga riset lainnya.
f)	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum terlaksananya salah satu peran pokok BRIDA dalam memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Daerah Kota Kendari	BRIDA memfasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah melalui sistem manajemen berbasis digital	Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual merupakan tupoksi dari Kemenkumham, seiring dengan terbentuknya BRIDA, maka salah satu tupoksinya adalah membantu Kemenkumham dalam memfasilitasi pengajuan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. Dengan baru terbentuknya BRIDA Kota Kendari saat ini menyebabkan tidak tersedianya data potensi pemanfaatan kekayaan intelektual daerah yang dapat diajukan untuk mendapat perlindungan.

Sumber: Data Sekunder, diolah Tim Ahli (2025)

4.2 Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah

Ekosistem riset dan inovasi di daerah tumbuh berdasarkan kapasitas kelembagaan dan daya dukungnya. Kelembagaan dan daya dukung yang dimaksud adalah sistem dan mekanisme interaksi organisasi dengan lingkungannya yang diatur melalui tata aturan yang mengikat untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan riset dan inovasi di daerah. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi daerah ditentukan oleh dua indikator antara lain adalah penguatan kolaborasi riset dan inovasi dan penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi.

Kolaborasi riset dan inovasi di Kota kendari telah terlaksana dengan baik yaitu melibatkan seluruh perangkat daerah. Kolaborasi ini dilaksanakan pada program kegiatan kajian, riset dan inovasi juga kompetisi Kreanova (Kreasi dan Inovasi). Pada kolaborasi kajian, perangkat daerah dilibatkan pada tahap pembahasan dokumen sejak laporan pendahuluan, laporan antara, hingga laporan akhir. Akan tetapi, kolaborasi ini akan lebih baik jika kolaborasi bisa dilaksanakan lebih intensif misalnya pada tahap pelaksanaan kajian sehingga hasil kajian lebih implementatif dan teknis.

Pada indikator kolaborasi, hal yang menjadi kelemahan ekosistem riset dan inovasi di Kota kendari adalah rendahnya tingkat pemanfaatan atau implementasi hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah. Maka, implementasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi ini perlu diakselerasi untuk mewujudkan kebijakan berbasis bukti. Selanjutnya, sebagai sarana penunjang, keberadaan perpustakaan, ruang baca, pusat studi, dan teknologi informasi juga mampu mendorong ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik. Perpustakaan dan ruang baca telah menjadi kebutuhan dasar pendidikan yang berhasil diadakan oleh Pemerintah Kota kendari. Hanya saja, sarana pendukung pusat studi dan teknologi informasi yang belum tersedia dengan baik. Tentunya, hal ini selaras dengan potensi dan target sasaran pembangunan daerah Kota kendari.

Tabel 4.2 Analisis Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
2. KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA KENDARI				
a)	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	BRIDA Kota Kendari sebagai lembaga yang mengintegrasikan riset dan inovasi daerah baru terbentuk, yang diharapkan dapat mendorong upaya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk pengembangan sektor unggulan di daerah	BRIDA menjadi Lembaga yang bisa mengintegrasikan seluruh riset dan inovasi di daerah	Jaringan kolaborasi yang masih bersifat terbatas, menyebabkan akses untuk menghasilkan <i>output</i> penelitian berkualitas sangat terbatas. Jangkauan informasi dan wawasan baru berkaitan dengan riset dan inovasi kurang memadai. Oleh karena itu optimalisasi Kerjasama Multistakeholder (Organisasi riset pusat (BRIN) dan Daerah (BRIDA, Bappeda, OPD lingkup Kota Kendari atau stakeholder lainnya) tidak hanya terbatas pada proses kegiatan riset dan inovasi namun berkelanjutan pada komitmen pemanfaatan hasil riset dan inovasi menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah.
		Jejaring stakeholder (<i>pentahelix</i>) dalam wadah kolaborasi yang berdasarkan prinsip partisipatif membangun riset dan inovasi daerah tidak dapat optimal, sebab masih dilakukan oleh masing-masing OPD secara parsial	Terbangunnya jejaring akses kerjasama/kolaborasi yang lebih luas antar organisasi riset baik dengan pusat (BRIN) maupun BRIDA, Bappeda, Balitbang lingkup Pemda Kab/Kota atau stakeholder lainnya	
		Keterbatasan keterampilan dan keahlian (Daya Saing Sumber Daya Manusia)	Kapasitas SDM riset di BRIDA sesuai kompetensi	
b)	Penyediaan	Ketersediaan sarana	Hasil riset dijadikan acuan	Terbatasnya sarana pendukung berupa

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
	sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	pendukung riset dan inovasi daerah belum optimal	untuk mendukung program prioritas Pembangunan	akses pemanfaatan sarana teknologi dan digitalisasi berpengaruh terhadap ketidaktersediaan media untuk mengoptimalkan penataan basis data, publikasi dan sarana diseminasi. Diperlukan penyediaan sarana pendukung dan peningkatan kapasitas pendukung SDM riset dan inovasi daerah khususnya bidang Teknologi Informasi sebagai indikator utama pengembangan media informasi teknologi untuk menyebarluaskan hasil riset dan inovasi terbaru pada ruang publik. Kemudian diperlukan proses <i>Forecasting</i> yakni memprediksi kejadian atau nilai riset dan inovasi di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren untuk mendukung peningkatan dan evaluasi program tahunan
		Belum terarahnya kegiatan riset yang dilakukan untuk mendukung program prioritas pembangunan Daerah	Hasil riset yang memiliki nilai tambah dan bernilai inovasi bagi daerah	
		Belum dimanfaatkannya hasil riset sebagai nilai tambah dan inovasi daerah sehingga tingkat adopsi inovasi juga rendah	Sarana pendukung riset dan inovasi daerah yang memadai	
		Keterbatasan <i>Forecasting</i> Terhadap Riset dan Inovasi di Masa Depan	BRIDA melaksanakan proses <i>Forecasting</i> yakni memprediksi kejadian atau nilai riset dan inovasi di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren untuk mendukung peningkatan dan evaluasi program tahunan	

Sumber: Data Sekunder, diolah Tim Ahli (2025)

4.3 Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah

Ekosistem riset dan inovasi di daerah didukung oleh adanya kemitraan antar perangkat daerah yang solid dan harmonis. Bappeda sebagai penyelenggara pusat riset dan inovasi di daerah butuh bermitra dengan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan publik sekaligus pengguna hasil riset dan inovasi. Dalam elemen kemitraan ini, ada 3 indikator kunci dalam menciptakan kemitraan riset dan inovasi daerah yang solid dan harmonis, yaitu kemitraan antar kelembagaan, difusi inovasi, dan praktik dan diseminasi hasil riset dan inovasi.

Aktivitas riset dan inovasi di Kota kendari telah berjalan dengan baik. Kemitraan Bappeda Kota kendari dengan perangkat daerah seharusnya berlangsung sejak penyampaian usulan tema kajian, riset, dan inovasi. Sebagian usulan telah terlaksana sesuai dengan prioritas, arah kebijakan, dan isu strategis pemerintah daerah. Hal lain yang menentukan adalah prioritas kegiatan sesuai kapasitas anggaran yang dikelola. Catatan penting lainnya adalah perlu adanya peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi daerah yang telah diciptakan. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa sebagian hasil riset dan inovasi tidak diimplementasikan oleh perangkat daerah sebagai pengguna hasil riset dan inovasi bahkan sebesar 70% hasil riset dan inovasi. Kemudian, ini pula yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik berbasis hasil riset dan inovasi yang belum optimal di Kota kendari. Masalah-masalah yang muncul dari belum optimalnya implementasi hasil riset dan inovasi di Kota kendari adalah keterputusan komunikasi antar perangkat daerah, pemahaman perangkat daerah yang belum komprehensif, dan monitoring evaluasi atas implementasi hasil riset dan inovasi daerah.

Kemitraan riset juga diukur berdasarkan penyebaran isu dan atensi terhadap inovasi dan riset strategis daerah (difusi inovasi dan riset). Bappeda Kota kendari telah melakukan difusi inovasi dan riset melalui berbagai kegiatan kompetisi, pameran, dan publikasi lainnya. Hanya saja, difusi ini belum mengarah pada isu strategis yang spesifik yang sedang ditargetkan oleh Pemerintah Kota kendari. Sayangnya, diseminasi hasil riset belum dilakukan dengan mempublikasikan hasil riset dan inovasi berbasis database digital seperti website atau sejenisnya oleh Bappeda Kota kendari. Kedepan, hal ini perlu dipublikasikan lebih terbuka untuk dapat diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat. Selain itu, publikasi hasil riset dan inovasi melalui jurnal milik Bappeda Kota kendari juga perlu perbaikan terutama pada sistem informasi website, keselarasan dengan hasil riset dan inovasi daerah, konsistensi penerbitan dan perluasan kontributor jurnal

Tabel 4.3 Analisis Kesenjangan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
2. KEMITRAAN RISET DAN INOVASI				
a)	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Belum tercapainya pola kerjasama kemitraan riset dan inovasi yang fleksibel di lingkup internal	Terciptanya pola Kerjasama yang fleksibel dan dapat mendukung ekosistem riset dan inovasi daerah.	Pola kemitraan riset dan inovasi daerah masih terbangun dengan komitmen yang lemah dan berjalan satu arah, menyebabkan tidak ada hubungan timbal balik yang berkelanjutan antara dua pihak. Hubungan kemitraan kedepan diharapkan dapat lebih fleksibel, dimana BRIDA selain sebagai penyedia anggaran juga dapat mengakses manfaat atas <i>output</i> riset dari Perguruan Tinggi. Begitupula dengan skema pembiayaan, dapat menyepakati skema sharing dana kemitraan. Akses pemanfaatan peralatan pendukung juga masih terbatas.
		Belum optimalnya kemitraan pada kelompok-kelompok usaha dan atau pihak swasta dalam melaksanakan riset dan inovasi misalnya maraknya pembangunan KPR, pembukaan lahan yang menyebabkan tingginya risiko bencana alam.	Kewajiban pemeliharaan dan penanggulangan dampak lingkungan perkotaan bagi kelompok-kelompok usaha atau pihak swasta.	Pemerintah Kota Kendari mewajibkan pemeliharaan dan penanggulangan dampak lingkungan pada kelompok usaha untuk memastikan pembangunan di Kota Kendari sesuai prosedur dan tidak merusak fasilitas masyarakat. Kewajiban ini ditegaskan melalui pembentukan satgas pembangunan yang mengawasi kelompok usaha melakukan pelanggaran izin dan kerusakan lingkungan. Akan tetapi di sisi lain, kebijakan nasional dan daerah agar mempermudah perizinan berusaha yang selalu menjadi celah kelalaian dalam

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
				pelaksanaannya.
b)	Peningkatan difusi inovasi	Belum diketahuinya peran BRIDA sebagai perangkat daerah penyelenggara riset dan inovasi di Kota Kendari untuk mengakuisisi semua program yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah.	Mitra mengetahui peran BRIDA sebagai pusat riset dan inovasi di daerah	Terwujudnya perkembangan dan penyebaran isu dan atensi terhadap inovasi dan riset strategis di daerah melalui berbagai kegiatan kompetisi, pameran, dan publikasi lainnya. Hanya saja, selama ini difusi ini belum mengarah pada isu strategis yang spesifik sesuai target pemerintah Kota Kendari terutama disebabkan pelaksanaannya secara parsial oleh OPD masing-masing di lingkup Kota Kendari. Sayangnya, diseminasi hasil riset belum dilakukan dengan mempublikasikan hasil riset dan inovasi berbasis database digital seperti <i>website</i> atau sejenisnya. Ke depan, hal ini perlu dipublikasikan lebih terbuka untuk dapat diakses oleh perangkat daerah dan Masyarakat luas. Sehingga upaya peningkatan difusi inovasi tidak fokus, tidak terarah dan tidak spesifik.
c)	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi dan dukungan sumberdaya riset dan inovasi.	Mitra belum memahami pemanfaatan hasil riset dan inovasi, diakibatkan oleh paradigma tingginya biaya atau pendanaan riset dan inovasi	Mitra memahami dan memanfaatkan hasil riset dan inovasi	Publikasi hasil riset dan inovasi melalui jurnal ke depan perlu dilakukan pada sistem informasi <i>website</i> resmi, keselarasan dengan hasil riset dan inovasi daerah, konsistensi penerbitan dan perluasan kontributor jurnal. Sosialisasi/diseminasi hasil riset dan inovasi yang tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, menyebabkan Perangkat Daerah tidak mengetahui dan memahami dengan jelas substansi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan,

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
				sehingga berdampak pada penetapan program yang tidak berdasarkan data hasil kajian.
		Keterbatasan sumber daya riset dan inovasi yang dimiliki oleh daerah untuk penguatan pengembangan sektor unggulan, ekonomi biru dan hijau, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk bermitra dengan berbagai pihak, baik akademisi, pelaku usaha maupun komunitas masyarakat.	Program peningkatan kapasitas SDM di lingkup pemerintah Kota Kendari dan BRIDA melalui pelatihan dan sejenisnya, serta membuka ruang untuk pengembangan diri bagi Aparatur Sipil Negara.	Keterbatasan sumber daya riset dan inovasi yang dimiliki oleh daerah untuk penguatan pengembangan sektor unggulan, ekonomi biru dan hijau, harus didukung oleh sumberdaya mumpuni perangkat daerah itu sendiri, untuk memastikan penyelenggaraan riset dan inovasi yang melibatkan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat dapat dilakukan pendampingan dan pengawasan secara maksimal sampai tahapan akhir pelaksanaan program atau kegiatan.

Sumber: Data Sekunder, diolah Tim Ahli (2025)

4.4 Budaya Riset dan Inovasi di Daerah

Budaya riset dan inovasi di daerah memegang peran penting untuk menciptakan keberlanjutan riset dan inovasi di daerah. Budaya ini memastikan pola perilaku dan nilai yang dianut dalam konteks ekosistem riset dan inovasi di daerah terus berlangsung dan berkembang. Sebagaimana definisi budaya sebagai nilai yang dilimpahkan turun temurun, budaya riset dan inovasi di daerah juga diharapkan mampu membangun nilai ekosistem riset dan inovasi di daerah yang tersebar di masyarakat dan dilimpahkan turun temurun. Oleh karena itu, indikator dari elemen ini antara lain promosi dan kampanye inovasi, apresiasi prestasi inovasi, pengembangan perusahaan pemula berbasis riset, dan inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi di masyarakat.

Pembentukan budaya riset dan inovasi di daerah dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme. Salah satunya dengan promosi dan kampanye riset dan inovasi di daerah. Promosi dan kampanye ini bertujuan untuk menciptakan partisipasi dan perilaku untuk mengembangkan riset dan inovasi di daerah. Bappeda Kota Kendari telah melakukan promosi dan kampanye melalui program kompetisi Kreanova, pameran inovasi, dan diseminasi hasil riset dan inovasi. Ini pun dilakukan meluas bagi perangkat daerah dan masyarakat umum, dan berjenjang dari masyarakat umum dan pelajar di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Ini diharapkan mampu mendorong budaya riset dan inovasi di daerah yang terus tumbuh dan berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, apresiasi terhadap prestasi para inovator juga dilakukan sesuai dengan kebijakan dan kapasitas anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Dalam rangka menguatkan budaya riset dan inovasi, keberadaan berbagai institusi riset dan inovasi yang lebih beragam dapat meningkatkan kualitas ekosistem riset dan inovasi. Saat ini, perkembangan perusahaan pemula berbasis riset tengah mendapat atensi dan animo yang besar di masyarakat. Pemerintah daerah dapat mendorong penciptaan dan pengembangan perusahaan pemula berbasis riset dengan membangun kemistriaan yang lebih dinamis. Perusahaan pemula berbasis riset ini terutama jika berada di daerah tentunya kebijakan ini harus didasarkan pada potensi dan kapasitas pemerintah daerah. Terakhir, inventarisasi data karya pengetahuan dan teknologi masyarakat yang telah terealisasi perlu dipertahankan secara berkelanjutan. Hal lain yang urgen untuk ditambahkan dan ditingkatkan adalah perlindungan terhadap hasil pengetahuan dan teknologi masyarakat. Sebagaimana dibahas di beberapa bagian sebelumnya, pengetahuan dan teknologi masyarakat termasuk hasil riset dan inovasi perlu perlindungan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, hak merek, dan sebagainya. Ini menjamin hasil riset dan inovasi dapat digunakan secara jangka panjang. Selain itu, ini juga menjamin hak

karya bagi para pencipta dan inovator yang telah berkarya sebagai bentuk apresiasi
yang terbaik.

Tabel 4.4 Analisis Kesenjangan Budaya Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
3. BUDAYA RISET DAN INOVASI				
a)	Kemiskinan dan kemerosotan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Tidak terputusnya rantai kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, anak-anak terlantar, serta mudarnya nilai-nilai etika dan moral generasi muda atau milenial saat ini	Terlaksananya program prioritas pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta kemerosotan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Misi pemerintah daerah (Misi ke-3) untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kaum marginal sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui program bantuan sosial, pembentukan koperasi kelurahan, MBG, Sekolah Rakyat dan Pembangunan perumahan, pangan dan gizi, Kesehatan untuk semua, Pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan UMKM, namun efektivitas berbagai proram tersebut belum dapat dianalisa kontribusinya dalam memutus rantai kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Kendari, meksipun tingkat kemiskinan tercatat menurun setiap tahunnya yakni dari 4,23% tahun 2024, dan target menjadi 3,65% tahun 2030. Disisi lain, terjadi pergeseran nilai-nilai etika dan moral generasi muda atau milenial saat ini di Kota Kendari, salah satunya tercatat sebanyak 592 kasus tahun 2024.
b)	Promosi dan Kampanye Inovasi	Masyarakat mengidentifikasi diri dalam kentalnya isu suku, serta kehadiran berbagai ormas yang belum	Terlaksananya program prioritas pemerintah daerah dalam peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya melalui	Upaya promosi dan kampanye yang belum massif dilakukan, menyebabkan belum tersosialisasikan dengan baik pentingnya implementasi inovasi di daerah sehingga

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
		memiliki kajian nyata dalam kontribusinya pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dan taraf hidup masyarakat secara horizontal	program pendidikan untuk semua	stakeholder khususnya perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi masih sangat sedikit yang mengimplementasikan inovasi.
c)	Apresiasi Prestasi Inovasi	Pelaku usaha dan atau masyarakat belum memiliki budaya kreatif dan inovatif untuk menghadapi masalah tingginya biaya produksi, penanganan dampak lingkungan, pengolahan hasil, dan pemasaran produk secara inovatif dan rendahnya pengetahuan digitalisasi	Dukungan riil penganggaran untuk percepatan pengembangan riset dan inovasi daerah	Belum optimalnya ajang pemberian penghargaan dan apresiasi inovasi kepada pelaku inovasi menyebabkan animo/perhatian terhadap ide-ide inovasi sangat kurang. Inovasi hanya berhenti sebatas ide, gagasan dan imlementasi jangka pendek tidak sampai dengan implementasi jangka panjang yang dapat berdampak langsung untuk masyarakat.
d)	Inventarisasi Pengembangan dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum terbentuknya regulasi yang didasarkan atas <i>Evidence based policy</i> berbasis data presisi, yakni pendekatan perancangan kebijakan publik yang mengutamakan penggunaan ilmu pengetahuan, data empiris, dan riset objektif untuk memandu pengambilan keputusan-keputusan teknis dan strategis	Terbentuknya regulasi yang didasarkan atas <i>Evidence based policy</i> berbasis data presisi	Regulasi yang didasarkan atas <i>Evidence based policy</i> berbasis data presisi sangat diperlukan, untuk merancang dan melahirkan kebijakan publik yang mengutamakan penggunaan ilmu pengetahuan, data empiris, dan riset objektif untuk memandu pengambilan keputusan-keputusan teknis dan strategis. Hal ini pula untuk mendukung membudayanya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
		Belum membudayanya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Terbangunnya budaya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	BRIDA belum melakukan pendampingan secara berkala untuk menjangkau kebutuhan riset perusahaan pemula. Hal ini menyebabkan tidak terbangunnya jaringan kolaborasi dengan <i>Community</i> khususnya dalam aktivitas pengembangan bisnis berbasis riset. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak khususnya OPD teknis yang mempunyai tupoksi dalam pembinaan kepada UMKM dan OPD yang membina Riset dan Inovasi Daerah.
		Belum terlaksananya pendampingan oleh BRIDA kepada perusahaan pemula berbasis riset dan inovasi produk dan usaha	Riset dan inovasi dapat mendukung pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	
		Belum terinventarisasinya perlindungan pengetahuan dan atau teknologi masyarakat oleh BRIDA	BRIDA menjadi fasillitator untuk perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tidak adanya data inventarisasi perlindungan pengetahuan atau teknologi dimasyarakat menyebabkan belum maksimalnya peran Pemerintah Daerah dalam melibatkan unsur-unsur stakeholder terkait dalam koordinasi Inventarisasi pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan atau teknologi masyarakat.

Sumber: Data Sekunder, diolah Tim Ahli (2025)

4.5 Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

Riset dan inovasi terbaik adalah keselarasan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah, produk unggulan yang menjadi target sasaran, dan solutif terhadap permasalahan di daerah. Elemen keterpaduan riset dan inovasi di daerah menjadi elemen yang penting untuk diukur. Elemen ini merupakan ukuran kegiatan riset dan inovasi di daerah telah selaras dengan kondisi di daerah. Sumber daya berupa infrastruktur dan sarana penunjang akan efektif dan efisien jika peruntukannya sejalan dengan kebutuhan, permasalahan, dan produk unggulan daerah. Ekosistem riset dan inovasi bukan sekedar menciptakan kondisi dan kondimen di dalamnya, akan tetapi lebih dari itu, ekosistem riset dan inovasi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah melalui penciptaan solusi atas berbagai masalah di daerah.

Bappeda Kota kendari telah memprakarsai berbagai program kegiatan riset dan inovasi daerah, antara lain program kajian dan riset, dan inovasi melalui kompetisi Kreanova. Kajian dan riset telah dijalankan berdasarkan usulan perangkat daerah dan target sasaran pemerintah daerah. Perbaikan perlu dilakukan pada program kompetisi Kreanova yang terlihat memiliki lingkup yang sama dari beberapa tahun terakhir. Artinya, penyelarasan dan keterpaduan program kompetisi Kreanova dengan kebutuhan dan permasalahan di daerah belum optimal dilakukan. Penyelarasan dan keterpaduan ini dapat meningkatkan serapan hasil riset dan inovasi untuk diimplementasikan oleh perangkat daerah sehingga hasil riset dan inovasi lebih implementatif dan berdampak bagi penyelesaian masalah di daerah.

Indikator berikutnya adalah pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah. Pemerintah Kota kendari telah memiliki dokumen peta potensi dan investasi produk unggulan daerah untuk menjadi pedoman pemangku kebijakan. Sayangnya, dokumen ini belum dilengkapi dengan analisis produk unggulan daerah. Analisis produk unggulan daerah hanya menggunakan analisis sektor basis yang mengukur indikator makroekonomi di daerah berupa sektor-sektor basis yang potensial dan beberapa indikator produksi dan produktivitas. Maka, penyempurnaan dokumen berupa analisis produk unggulan penting untuk dilakukan. Setelah, analisis produk unggulan dilakukan, riset dan inovasi lanjutan dapat dilakukan dengan klasterisasi riset dan inovasi berbasis produk unggulan tersebut. Analisis dan klasterisasi riset dan inovasi produk unggulan ini yang belum terealisasi di Kota kendari yang kedepan perlu untuk dilakukan untuk optimalisasi potensi daerah dan efektivitas arah kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 4.5 Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
4. KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH				
a)	Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Belum terlaksananya implementasi inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah	Implementasi inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan pengembangan produk unggulan daerah	Pengembangan produk unggulan daerah di Kota kendari belum dilakukan berbasis riset, inovasi dan teknologi, sehingga produktivitas dan kualitas produk belum dapat bersaing dengan pasar yang luas. disamping itu potensi produk unggulan juga belum dapat menjadi objek perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat.
b)	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum sesuainya kebijakan program prioritas yang diemban oleh lingkup pemerintah di bawahnya sebagai hasil musrembang, dengan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan klaster produk unggulan daerah	Kebijakan program prioritas pemerintah daerah Kota Kendari perlu disesuaikan dengan hasil identifikasi klaster produk unggulan daerah yang dimiliki	Belum terjalinnya kolaborasi dan sinergi para aktor inovasi dan unsur pentahelix berdampak pada belum optimalnya pengembangan klaster berbasis produk unggulan daerah di Kota kendari.
c)	Kesesuaian kebijakan secara hierarki antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota Kendari	Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan program prioritas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota khususnya berkaitan dengan aktivitas berbasis riset dan inovasi daerah	Kebijakan daerah harus disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Berbagai program dan kegiatan strategis harus menjadi prioritas yang selaras dengan pemerintah Pusat dalam rangka mendukung program pembangunan nasional	Implementasi kebijakan dan program pembangunan di daerah belum sepenuhnya mendukung sasaran dan prioritas program dan kebijakan Pemerintah Pusat menyebabkan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota hanya sedikit berkontribusi dalam pencapaian program-program riset dan inovasi nasional dan provinsi.

Sumber: Data Sekunder, diolah Tim Ahli (2025)

4.6 Penyelarasan Dengan Perkembangan Global

Pada bagian akhir ini, ekosistem riset dan inovasi daerah butuh mengakomodir isu internasional yang dapat mempengaruhi kondisi di daerah. Keterkaitan dengan dunia internasional cukup penting untuk dilakukan bukan hanya mengantisipasi kemungkinan krisis dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kerangka pikir riset dan inovasi, ketekaitan dengan isu internasional termasuk mengakomodir metode riset dan inovasi terbaru, seperti perkembangan teknologi dan pendekatan ilmiah lainnya. Elemen penyelarasan dengan perkembangan global perlu dipertimbangkan untuk memberikan perspektif yang beragam dalam melaksanakan riset dan inovasi di daerah.

Upaya penyelarasan riset dan inovasi daerah dengan perkembangan global belum dikembangkan secara optimal. Adaptasi isu internasional tampaknya belum menjadi variabel utama dalam penentuan arah kebijakan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Kerjasama internasional juga belum terlaksana karena berbagai kendala akses. Realisasi penyelarasan dengan perkembangan global yang belum tercapai dikarenakan oleh berbagai faktor di daerah. Pertama, kapasitas anggaran yang tidak memungkinkan untuk memperoleh kerjasama internasional. Kedua, kapasitas sumber daya manusia riset dan inovasi di perangkat daerah yang telah kelebihan beban kinerja sehingga tidak memungkinkan untuk mengembangkan jaringan kerjasama internasional. Ketiga, jaringan kerjasama dan kemitraan yang belum meluas hingga internasional. Sebenarnya, jaringan kerjasama dan kemitraan dapat dikembangkan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menjadikan daerah Kota kendari sebagai obyek riset dan inovasi dalam kerjasama internasional. Hal ini telah dilakukan oleh Bappeda Kota kendari salah satunya terlihat dengan keberhasilannya menyelenggarakan kerjasama riset dengan skema Kedaireka antara Bappeda Kota kendari dan Perguruan Tinggi Prov. Sulawesi Tenggara. Ini merupakan langkah awal yang baik untuk dapat mengoptimalkan riset dan inovasi dengan sumber pendanaan eksternal. Termasuk pengembangan jaringan kerjasama kemitraan dengan dunia internasional dapat berawal dari kerjasama seperti ini.

Tabel 4.6 Analisis Kesenjangan Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global di Kota Kendari

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
5. PENYELERASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL				
a)	Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah.	Belum terarahnya perhatian terhadap fenomena dan isu-isu global yang dapat diadopsi dalam program pembangunan daerah dengan pendekatan riset dan inovasi.	Penetapan program prioritas pembangunan daerah mengacu pada permasalahan atau isu-isu global yang relevan dengan kondisi di daerah.	Penyesuaian fokus tema atau isu riset dan inovasi daerah dengan tema atau isu riset inovasi global yang belum searah menyebabkan kebijakan pimpinan daerah belum mengarah pada fokus tema atau isu riset dan inovasi daerah yang mengacu pada tema atau isu riset global.
b)	Tantangan keberlanjutan, dalam bentuk inovasi yang harus mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem dan genetik, dan beradaptasi dengan perubahan iklim.	Tantangan keberlanjutan, dalam bentuk inovasi yang harus memperhatikan dampak pada lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem dan genetik, dan beradaptasi dengan perubahan iklim merupakan isu global yang harus diperhatikan dalam pengembangan inovasi seperti <i>blue carbon and trade carbon</i> sebagai mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK, dan juga Pemanfaatan Teknologi Radiasi untuk Pangan Aman dan Berkualitas.	Inovasi yang harus mempertimbangkan dampak lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem dan genetik, dan beradaptasi dengan perubahan iklim seperti <i>blue carbon and trade carbon</i> sebagai mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK, dan juga Pemanfaatan Teknologi RADIANA.	Inovasi riset dan teknologi yang harus mempertimbangkan dampak lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem dan genetik, dan beradaptasi dengan perubahan iklim seperti <i>blue carbon and trade carbon</i> untuk mengurangi emisi GRK, merupakan target global yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Kendari dalam mewujudkan target SDGs. RADIANA (Radiasi Aman Pangan Nasional), sebuah program yang diinisiasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memanfaatkan teknologi iradiasi nuklir demi memperpanjang masa simpan produk pangan, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendukung daya saing industri pangan nasional sebagai wujud inovasi teknologi terbaru yang harus didukung oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan misi

No.	Indikator	Kondisi Eksisting	Kondisi Riil Yang Diinginkan	Kesenjangan
				pembangunan daerah.
c)	Penguatan kerjasama antar daerah, nasional, dan internasional.	Secara umum, belum terbangunnya akses ruang kerjasama lingkup internasional yang lebih luas dan terbuka, terutama dalam menjamin peran daerah dalam pencapaian tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).	Terbangunnya akses kerjasama riset dan inovasi lingkup internasional untuk menyelesaikan permasalahan daerah.	Pola kerjasama antara lembaga riset dan inovasi daerah dengan lembaga riset dan inovasi internasional yang belum terbangun menyebabkan tidak adanya komitmen kerjasama internasional dalam bidang riset dan inovasi daerah.

Sumber: Data Sekunder, diolah Tim Ahli (2025)



STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Peta Jalan riset dan inovasi daerah Kota kendari memuat sasaran strategis dan fokus pada 6 (enam) hal yakni:

- 1) Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Di Daerah;
- 2) Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah;
- 3) Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah;
- 4) Budaya Riset dan Inovasi di Daerah;
- 5) Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah; dan
- 6) Penyelarasan Dengan Perkembangan Global

Dalam penyusunan peta jalan riset dan inovasi yang mencakup 6 (enam) hal tersebut di atas, maka diselaraskan dengan sasaran strategis atau prioritas yang perlu dicapai oleh daerah pada akhir periode dokumen perencanaan pembangunan, sasaran antara yang perlu dicapai oleh daerah setiap tahunnya sampai dengan sasaran strategis dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan kebutuhan penyusunan Rencana Induk, maka disusunlah Peta Jalan yang berisi Sasaran Strategis dimulai tahun awal perencanaan (2025), sampai dengan akhir periode RPJMD selanjutnya tahun 2029, yang dijabarkan sebagai berikut:

5.1 Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Elemen penting pengembangan arah kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi Daerah Kota Kendari memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi, khususnya pada aspek infrastruktur riset dan inovasi. Namun permasalahan ini bukan saja dialami oleh Daerah Kota kendari, tetapi umumnya juga dialami daerah lainnya. Hal ini disebabkan infrastruktur riset dan inovasi membutuhkan anggaran yang besar yang erat kaitannya dengan pembangunan fisik. Selain itu, pengadaan dan pengembangan infrastruktur ini harus dianalisis dan disesuaikan dengan keperluannya khususnya untuk skala riset dan inovasi di Kota Kendari secara terstruktur dan berkesinambungan. Jika demikian, strategi pengadaan dan pengembangan infrastruktur ini tidak serta merta harus diadakan secara keseluruhan. Akan tetapi, perekrasan dan pemanfaatan sumber daya infrastruktur yang ada akan menjadi faktor utama dalam meningkatkan keberadaan infrastruktur di Kota Kendari. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur riset dan inovasi dengan tetap melakukan efisiensi anggaran dan sumber daya yang dimiliki Kota Kendari sesuai dengan visi pemerintahan yakni **“Terwujudnya Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang Semakin Maju, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera dan**

Berkelanjutan” yang secara eksplisit selaras dengan misi Wali Kota Kendari Tahun 2025-2029 (Misi ke 4) yaitu **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendorong perkembangan kawasan perkotaan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan tanggap bencana”**. Hal ini diuraikan bahwa untuk mewujudkan Kota Kendari dengan infrastruktur dasar yang merata, handal serta berwawasan lingkungan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi, dan meningkatkan mobilitas bagi pertumbuhan ekonomi, serta mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi salah satunya melalui **Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset Dan Inovasi di Daerah secara sistematis dan berkelanjutan.**

Berdasarkan uraian sejumlah permasalahan Pembangunan di daerah Kota Kendari terkait hal ini, disebutkan bahwa **Belum optimalnya penyediaan infrastruktur perkotaan** meliputi persampahan, air minuman, sanitasi, drainase, jalan, transportasi massal. Meskipun tidak secara spesifik disebutkan terkait infrastruktur riset dan inovasi, namun diuraikan bahwa keseluruhan kondisi yang menggambarkan pembangunan infrastruktur di Kota Kendari masih perlu dikelola secara lebih terpadu, tepat sasaran, dan berorientasi jangka panjang melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung keberlanjutan penyediaan infrastruktur dasar yang layak. Sebab, peningkatan kualitas dan cakupan layanan infrastruktur tidak hanya menjadi kunci dalam menciptakan kota yang sehat dan nyaman, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan **daya saing** kota di masa mendatang.

Hal lain pula terdapat pada pembahasan isu strategis meliputi isu global, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi, era industry 5.0, pergeseran budaya dampak dari Teknologi Informasi, serta isu strategis nasional dalam 17 program prioritas RPJMN (point 8) menyebutkan bahwa diperlukan Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi, tentunya untuk menghadapi era kemajuan IPTEK. Sehingga dalam studi ini dilakukan pengkajian mengenai indikator, analisa kesenjangan, dan strategi kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi daerah Kota Kendari sebagai berikut.

Tabel 5.1 Strategi Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari

No.	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah Kota Kendari	• Belum tersedia peraturan daerah mengenai pemajuan IPTEK dan Riset Inovasi daerah. • Belum tersedia rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK, riset, dan inovasi daerah	• Penyusunan dan penerbitan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Kota Kendari untuk memberikan kepastian hukum dan dinamika kinerja antar perangkat daerah . • Penyusunan dan

		terbaru.	penerbitan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Kota Kendari sesuai dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2025-2029.
2.	Tata kelola basis data terpusat riset dan inovasi daerah Kota Kendari	• Belum tersedia database hasil riset dan inovasi yang terbuka dan mudah diakses secara menyeluruh.	• Menyediakan database diseminasi hasil riset dan inovasi daerah. • Membuka akses dan melakukan pembaharuan berkala hasil riset dan inovasi daerah.
3.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi daerah Kota Kendari	• Belum tersedia infrastruktur dasar riset meliputi laboratorium, kebun raya, studio riset, dan fasilitas pendukung lainnya.	• Menyediakan infrastruktur dasar riset meliputi laboratorium, kebun raya, studio riset, pusat kajian, dan fasilitas pendukung lainnya di bawah Badan/Bidang Riset dan Inovasi Daerah. • Pengembangan kebun raya di hutan Kota atau taman yang telah dimiliki.
4.	Pengelolaan kebun raya daerah	• Belum tersedia dan terlaksana tata kelola kebun raya daerah dalam sinkronisasi pengembangan riset dan inovasi daerah secara terstruktur dan terintegrasi.	• Menginisiasi tata kelola kebun raya Kota Kendari atau Taman Kota yang telah ada dengan kolaborasi bersama stakeholder terkait yang mengelola flora dan fauna khas, serta untuk mendukung penyusunan profil keanekaragaman hayati Kota Kendari secara kontinyu.
5.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	• Belum tersedia laboratorium dan/atau inkubator kekayaan intelektual di daerah.	• Penyediaan laboratorium dan/atau pusat hak kekayaan intelektual di daerah dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada atau di fasilitasi bidang kelitbangan yang sudah dimiliki Kota Kendari.

Sumber: Tim Ahli, 2025

5.2 Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah

Kapasitas kelembagaan riset dan inovasi di daerah berkaitan dengan kolaborasi penyelenggara riset dan inovasi yaitu Bappedalitbang dengan perangkat daerah di Kota Kendari. Kolaborasi ini membutuhkan peningkatan intensitas terutama pada

keterlibatan dalam riset dan inovasi yang diselenggarakan oleh Bappedalitbang atau OPD terkait. Strategi ini misalnya dengan peneliti campuran (*blended researcher*) bahwa perangkat daerah dimasukkan dalam setiap proses riset dan inovasi. Hal ini memperluas perspektif dan meningkatkan kualitas riset dan inovasi yang lebih implementatif. Selain itu, peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi Kota Kendari perlu dilakukan dengan salah satu upaya melauai evaluasi dan pengukuran hasil riset yang telah terimplementasi dan yang belum. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan perbaikan penyelenggaraan riset dan inovasi Bappeda-litbang atau OPD terkait di Kota Kendari secara berkelanjutan.

Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi ini sesuai dengan visi pemerintahan yakni **“Terwujudnya Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang Semakin Maju, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan”** yang secara eksplisit selaras dengan misi Wali Kota Kendari Tahun 2025-2029 (Misi ke 2) yaitu **“Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pelayanan, Inovasi dan Digitalisasi”**.

Tabel 5.2 Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari

No.	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah Kota Kendari dengan pemangku kepentingan Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pelayanan, Inovasi dan Digitalisasi	• Terdapat kolaborasi tata kelola riset dan inovasi daerah antara Bappeda dengan pemangku kepentingan. • Rendahnya tingkat pemanfaatan dan implementasi hasil riset dan inovasi.	• Peningkatan peran dan keterlibatan pemangku kepentingan riset dan inovasi. • Peningkatan pemanfaatan implementasi hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah. • Inisiasi evaluasi capaian implementasi hasil riset dan inovasi di daerah. • Penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja OPD dengan riset dan inovasi Kota Kendari. • Pengadaan pelatihan metode riset bagi perangkat daerah.
2.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	• Adanya kekurangan sarana pendukung riset dan inovasi terutama pusat studi dan teknologi informasi.	• Peningkatan sarana pendukung terutama pusat studi dan teknologi informasi.

Sumber: Tim Ahli, 2025

5.3 Strategi Peningkatan Kemitraan Riset Dan Inovasi Daerah

Riset dan inovasi memiliki cakupan yang luas dan membutuhkan sumber daya yang besar. Maka, BRIN memberikan keleluasaan penyelenggaraan riset dan inovasi melalui berbagai institusi riset baik swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat yang disinergikan oleh BRIDA. Kota kendari juga perlu meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak antara lain lembaga riset swasta, perguruan tinggi, perangkat daerah, dan masyarakat. Intensitas kemitraan yang perlu ditingkatkan adalah dengan perguruan tinggi terutama pada mekanisme kerjasama pendanaan eksternal. Sedangkan, kemitraan juga perlu dikuatkan pada implementasi hasil riset dan inovasi dengan tujuan meningkatkan nilai manfaat hasil riset dan inovasi daerah. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Kota kendari harus lebih banyak lagi yang dilandaskan pada hasil riset dan inovasi.

Pada sisi difusi inovasi dan diseminasi hasil riset, Bappeda-litbang sebagai pengelola data hasil riset dan inovasi perlu membuka akses data dan hasil riset yang telah dibuat. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada perangkat daerah dan masyarakat Kota Kendari menggunakan hasil riset dan inovasi untuk berbagai kepentingan. Perangkat daerah dapat mengoptimalkan dokumen tersebut untuk merencanakan kebijakan berbasis urusan dan penyelenggaraan program. Sedangkan, masyarakat dapat mengembangkan budaya riset karena akses literatur yang cukup dari difusi inovasi dan diseminasi hasil riset yang telah dipublikasikan oleh Bappeda-litbang.

Peningkatan Kemitraan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Kendari ini sesuai dengan visi pemerintahan yakni **“Terwujudnya Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang Semakin Maju, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan”** yang secara eksplisit selaras dengan misi Wali Kota Kendari Tahun 2025-2029 (Misi ke 2) yaitu **“Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pelayanan, Inovasi dan Digitalisasi”**.

Tabel 5.3 Strategi Peningkatan Kemitraan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Kendari

No.	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1.	Penguatan kemitraan antarlembagaan	• Terselenggara kerjasama antara lembaga riset daerah, OPD terkait, dan lembaga riset profesional lainnya. • Kurangnya intensitas kemitraan Bappeda-litbang dengan perangkat daerah terkait untuk pelaksanaan dan implementasi hasil	• Pengembangan jaringan kerjasama riset dan inovasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi untuk meningkatkan pendanaan dan kegiatan riset dan inovasi eksternal. • Peningkatan peran dan keterlibatan pemangku kepentingan riset dan inovasi.

		riset dan inovasi.	• Peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah. • Inisiasi evaluasi capaian implementasi hasil riset dan inovasi di daerah
2.	Peningkatan difusi inovasi	• Belum merata perkembangan dan penyebaran informasi dan atensi terhadap pengembangan inovasi di daerah	• Pemetaan kebutuhan inovasi di daerah . • Penyebaran informasi tentang rencana inovasi prioritas di daerah
3.	Peningkatan praktik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	• Publikasi hasil riset dan inovasi yang terbatas . • Belum optimal implementasi kebijakan publik berbasis hasil riset dan inovasi.	• Publikasi terbuka diseminasi hasil riset dan inovasi Kota Kendari sehingga dapat diakses secara luas oleh perangkat daerah dan masyarakat. • Peningkatan implementasi hasil riset dan inovasi melalui evaluasi dan monitoring penggunaan hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah.

Sumber: Tim Ahli, 2025

5.4 Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah

Budaya menjadi salah satu aspek dalam mempertahankan ekosistem riset dan inovasi di daerah, dimana budaya masyarakat yang berkembang dan terbuka dengan ilmu pengetahuan akan memastikan ekosistem riset dan inovasi terus eksis dan berkembang di Kota Kendari. Ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan riset dan inovasi di daerah. Oleh karena itu, budaya riset dan inovasi di daerah perlu terus digalakkan dan Kota kendari telah memulai budaya ini dengan baik melalui berbagai kegiatan kompetisi, riset, pameran inovasi, dan sebagainya.

Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi Daerah ini sesuai dengan visi pemerintahan yakni **“Terwujudnya Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang Semakin Maju, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan”** yang secara eksplisit selaras dengan misi Wali Kota Kendari Tahun 2025-2029 (Misi Pertama dan ke 3) yaitu **“Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter”** dan **“Mengembangkan perlindungan sosial yang adaptif dan transformasi sosial”**.

Tabel 5.4 Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari

No.	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1.	Promosi dan kampanye	• Terselenggara promosi dan	• Perluasan dan penguatan promosi dan

No.	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
	inovasi	kampanye inovasi di lingkungan Pemerintah Kota kendari dan masyarakat.	kampanye inovasi melalui artikel media website pemerintah.
2.	Apresiasi prestasi inovasi	Terselenggara kegiatan kompetisi dan apresiasi hasil inovasi Perangkat Daerah dan masyarakat.	Peningkatan apresiasi hasil inovasi dengan publikasi dan penghargaan lainnya.
3.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	- Terinventarisasi data karya pengetahuan dan teknologi masyarakat - Terdapat kegiatan untuk mendorong pengembangan pengetahuan dan teknologi masyarakat. - Terdapat kegiatan untuk melindungi hasil pengetahuan dan teknologi masyarakat.	- Peningkatan keterbukaan akses hasil riset dan inovasi di daerah. - Penguatan keterpaduan kegiatan kompetisi Kreanova dengan sasaran kebijakan Pemerintah Kota Kendari dan arah kebijakan riset dan inovasi daerah. - Inisiasi studio hak kekayaan intelektual dan layanan pendaftaran paten, merk, hak cipta, dan HAKI lainnya.

Sumber: Tim Ahli, 2025

5.5 Strategi Penguatan Keterpaduan Riset Dan Inovasi Daerah

Kegiatan riset dan inovasi yang baik adalah ketika sejalan dan selaras dengan potensi, produk unggulan, dan permasalahan di daerah. Hal ini karena riset dan inovasi bertujuan memberikan solusi yang tepat sasaran sesuai kondisi yang ada. Oleh karena itu, penguatan keterpaduan riset dan inovasi daerah perlu dilakukan guna mengoptimalkan riset dan inovasi daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Kendari.

Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah ini sesuai dengan visi pemerintahan yakni **“Terwujudnya Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang Semakin Maju, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan”** yang secara eksplisit selaras dengan misi Wali Kota Kendari Tahun 2025-2029 (Misi ke 5) yaitu **“Mengembangkan perekonomian daerah yang kokoh dan berkeadilan berbasis komoditas unggulan”**.

Tabel 5.5 Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari

No.	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan di	Terdapat konsepsi untuk menyelaraskan kegiatan pengembangan riset	Penyelarasan tema dan arah riset dan inovasi dengan kegiatan riset inovasi di Bappeda-litbang salah satunya

No.	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
	daerah untuk promosi produk unggulan daerah, Mengembangkan perekonomian daerah yang kokoh dan berkeadilan berbasis komoditas unggulan	dan inovasi dengan kebutuhan dan/atau permasalahan di daerah. Basis komoditas unggulan daerah belum terukur dan terupdate secara kontinyu untuk unggulan sektor pariwisata, perikanan, perdagangan dan jasa.	kegiatan Kreanova untuk perangkat daerah dan masyarakat. Tema dan arah riset dan inovasi harus sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Kendari.
2.	Penyelenggaraan pengembangan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	- Peta produk unggulan di Kota Kendari belum terupdate, serta belum pula terealisasi peta potensi dan investasi yang didasari oleh RTRW dan RUPM Kota Kendari. - Belum terselenggara kegiatan riset dan inovasi berbasis produk unggulan daerah.	- Analisis dan pemetaan produk unggulan daerah sebagai arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah. - Inisiasi dan pengembangan riset dan inovasi dengan menindak lanjuti analisis dan peta produk unggulan daerah. - Inisiasi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah.
3.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Terdapat kesesuaian dan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	Umumnya sudah direalisasikan

Sumber: Tim Ahli, 202

5.6 Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah Kota kendari dengan Perkembangan Global

Riset dan inovasi daerah butuh mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang berkembang secara global. Biasanya, riset dan inovasi di negara maju lebih dulu mengembangkan inovasi dan ilmu pengetahuan. Maka, Bappeda-litbang dapat memasukkan persyaratan atau aspek kebaruan inovasi dan ilmu pengetahuan dari dunia internasional ke dalam berbagai kegiatan riset dan inovasi.

Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah Kota kendari dengan Perkembangan Global ini sesuai dengan visi pemerintahan yakni **“Terwujudnya Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang Semakin Maju, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan”** yang secara eksplisit selaras dengan misi Wali Kota Kendari Tahun 2025-2029 (Misi ke 5) yaitu **“Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter”**.

Tabel 5.6 Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah Kota kendari dengan Perkembangan Global

No.	Indikator	Analisis Kesenjangan	Strategi
1.	Peningkatan kepedulian terhadap isu global yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah Kota Kendari	Adaptasi dan penyelarasan isu global terhadap kegiatan riset dan inovasi di daerah	- Penyelarasan secara proporsional tema dan arah riset dan inovasi Kota Kendari dengan isu global. - Menginfiltrasikan literatur, teori, konsep, dan inovasi internasional terbaru dalam setiap agenda riset dan inovasi di Kota kendari secara berkelanjutan.

Sumber: Tim Ahli, 202

5.7 Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan uraian strategi pada 6 (enam) jalan pembangunan riset dan inovasi di daerah tersebut di atas, maka secara keseluruhan sasaran strategis daya saing dan unggulan daerah berbasis riset dan inovasi daerah Kota Kendari 2025-2030 berdasarkan langkah perumusan, implemetasi dan evaluasi dijelaskan lebih detail pada matriks atau Tabel 5.7.

Tabel 5.7. Sasaran Strategis Daya Saing dan Unggulan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari 2025-2030

Sasaran Strategis dan Fokus	Tahun 1 dan 2	Tahun 3 dan 4	Tahun ke- 5 (Akhir Periode/Tahun)
Kebijakan Riset dan Inovasi	Perumusan	Implementasi	Evaluasi
Pengembangan Unggulan dan Daya Saing Daerah	Pendampingan ▪ Memfasilitasi dan mendampingi Satuan Perangkat Daerah Terkait dalam rangka pengembangan prioritas unggulan daerah. ▪ Memfasilitasi dan mendampingi Satuan Perangkat Daerah Terkait dalam rangka pengembangan fasilitas infrastruktur dasar perkotaan untuk menunjang infrastruktur riset dan inovasi daerah.	Pendampingan ▪ Memfasilitasi dan mendampingi Satuan Perangkat Daerah Terkait dalam rangka pengembangan prioritas unggulan daerah. ▪ Memfasilitasi dan mendampingi Satuan Perangkat Daerah Terkait dalam rangka pengembangan fasilitas infrastruktur dasar perkotaan untuk menunjang infrastruktur riset dan inovasi daerah.	Evaluasi ▪ Evaluasi Hasil Fasilitasi dan Pendampingan upaya pengembangan prioritas unggulan daerah. ▪ Evaluasi Hasil Fasilitasi dan Pendampingan pengembangan fasilitas infrastruktur dasar perkotaan untuk menunjang infrastruktur riset dan inovasi daerah.
2. KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH			
a) Reformasi	- Identifikasi dan Penetapan	- Implementasi dan Evaluasi	- Penguatan Regulasi

Sasaran Strategis dan Fokus	Tahun 1 dan 2	Tahun 3 dan 4	Tahun ke- 5 (Akhir Periode/Tahun)
Kebijakan Riset dan Inovasi	Perumusan	Implementasi	Evaluasi
kebijakan b) Penataan basis data c) Pengembangan infrastruktur dasar; d) Pengelolaan kebun raya; e) Penyediaan anggaran; f) Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	1. Merumuskan Perda/Perwali tentang RIPJ IPTEK, dan merumuskan Draft Perda tentang Inovasi Daerah. 2. Menginventarisasi data riset dan inovasi baik yang bersumber dari BRIDA Provinsi, OPD internal penyelenggara sebelumnya, Pemkab/Pemkot lainnya, Perguruan Tinggi dan ataupun BRIN yang dinilai potensial untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan pembangunan daerah. 3. Mengidentifikasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk dapat menunjang implementasi riset dan inovasi di daerah (Dalam arti luas). 4. Mengidentifikasi potensi pengelolaan kebun raya yang dapat berdampak pada pemanfaatan Iptek	1. Mensosialisasikan Perda/Perwali tentang RIPJ IPTEK dan Inovasi daerah kepada <i>stakeholders</i> . 2. Membuat <i>platform digital</i> untuk penataan seluruh data riset dan inovasi yang telah diinventarisasi sebelumnya (publikasi). 3. Membangun gedung Pusat Peragaan IPTEK dan inkubasi bisnis daerah, laboratorium riset dan pusat studi lapangan dan mengevaluasi potensi infrastruktur riset dan inovasi yang dimiliki oleh <i>stakeholders</i> untuk dapat dimanfaatkan secara terintegrasi oleh pelaku riset dan inovasi. 4. Mengkaji pengelolaan kebun raya yang telah dilakukan, untuk dapat dibuatkan rekomendasi kebijakan yang strategis dalam mendorong pemanfaatan Iptek dan peningkatan ekonomi. 5. Menggunakan anggaran riset yang tersedia untuk	1. Menilai hasil implementasi inovasi yang telah diinisiasi oleh OPD, dan hasil inovasi lingkup Kabupaten/Kota, untuk dijadikan bahan evaluasi kebijakan selanjutnya. 2. Menyempurnakan konten dan kualitas dari <i>platform digital</i> untuk penataan data riset dan inovasi yang telah dibuat sebelumnya dan juga pemanfaatannya. 3. Menjalin kolaborasi dengan <i>stakeholders</i> , dalam pemanfaatan dan pengembangan gedung Pusat Peragaan IPTEK dan optimalisasi inkubasi bisnis dengan seluruh pelaku usaha, khususnya yang membutuhkan intervensi teknologi. 4. Membuat kebijakan berkaitan dengan integrasi dan pemanfaatan infrastruktur riset (mis: laboratorium, dan perpustakaan daerah). 5. Mengimplementasikan rekomendasi kebijakan sejalan

Sasaran Strategis dan Fokus	Tahun 1 dan 2	Tahun 3 dan 4	Tahun ke- 5 (Akhir Periode/Tahun)
Kebijakan Riset dan Inovasi	Perumusan	Implementasi	Evaluasi
	dan peningkatan ekonomi. 5. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan jumlah kebutuhan anggaran riset sesuai dengan yang diperlukan. 6. Menginventarisasi potensi Haki yang ada di daerah, baik potensi Haki komunal dan personal untuk didorong dalam mendapatkan pemanfaatan dan perlindungan Haki.	pelaksanaan program dan kegiatan prioritas riset dan inovasi yang telah tertuang dalam rencana aksi untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah. 6. Mendampingi dan memfasilitasi pemilik Haki komunal dan personal dalam pengurusan pemanfaatan dan perlindungan Haki.	dengan pemanfaatan anggaran dalam riset dan inovasi daerah. 6. Melakukan pendampingan dan pembinaan pemanfaatan Haki secara berkelanjutan, dan mendokumentasikan nya dalam sebuah penataan data Haki yang dimiliki daerah.
3. KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA KENDARI			
a) Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan, b) Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan	- Pengenalan dan Pemahaman 1. BRIDA Kota Kendari yang baru terbentuk, dapat mendorong upaya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk pengembangan sektor unggulan di daerah melalui sosialisasi	- Penguatan Kapasitas 1. Membentuk forum sosialisasi terstruktur dan rutin dimana BRIDA menjadi Lembaga yang bisa mengintegrasikan seluruh riset dan inovasi di daerah, untuk membahas langkah strategis yang dapat diimplementasikan dalam program	- Penguatan Regulasi 1. Membentuk regulasi perda/ perwali tentang pembentukan tim percepatan implementasi riset dan inovasi di daerah. 2. Menindaklanjuti hasil kesepakatan setiap forum diskusi pelaku inovasi dan/atau pelaku usaha.

Sasaran Strategis dan Fokus	Tahun 1 dan 2	Tahun 3 dan 4	Tahun ke- 5 (Akhir Periode/Tahun)
Kebijakan Riset dan Inovasi	Perumusan	Implementasi	Evaluasi
daerah	terstruktur. 2. Menjaring kolaborasi yang berdasarkan prinsip partisipatif membangun riset dan inovasi daerah tidak dapat optimal, dengan pelaku usaha. 3. Sosialisasi pengembangan keterampilan dan keahlian (Daya Saing Sumber Daya Manusia). 4. Mengkaji kebutuhan daerah terhadap ketersediaan sarana pendukung riset dan inovasi daerah. 5. Mengarahkan kegiatan riset yang dilakukan untuk mendukung program prioritas pembangunan Daerah; Sosialisasi pemanfaatan hasil riset sebagai nilai tambah inovasi daerah. Sosialisasi peningkatan <i>Forecasting</i> Terhadap Riset dan Inovasi di Masa Depan	kegiatan untuk mendorong riset dan inovasi di daerah. 2. Mengadakan forum pelaku inovasi dan/atau pelaku usaha untuk mendiskusikan strategi peningkatan nilai tambah suatu produk. 3. Mengikutsertakan SDM riset dan inovasi lingkup BRIDA untuk pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 4. Membangun sarana pendukung baik berupa Gedung Pusat Iptek dan inkubator bisnis dan sarana operasional jaringan berbasis digital. Menginisiasi program inkubasi bisnis, dimana BRIDA sebagai pengelola yang menghubungkan pelaku usaha dengan stakeholder lainnya untuk meningkatkan nilai tambah inovasi daerah melalui analisis tren untuk mendukung peningkatan dan evaluasi	3. Menyusun SOP pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung riset dan inovasi berbasis digital. SDM lingkup BRIDA untuk melaksanakan kegiatan pengembangan diri sesuai kompetensi.

Sasaran Strategis dan Fokus	Tahun 1 dan 2	Tahun 3 dan 4	Tahun ke- 5 (Akhir Periode/Tahun)
Kebijakan Riset dan Inovasi	Perumusan	Implementasi	Evaluasi
		program tahunan (<i>Forecasting</i>).	
4. KEMITRAAN RISET DAN INOVASI			
a) Penguatan kemitraan antar kelembagaan. b) Peningkatan difusi inovasi. c) Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi dan dukungan sumberdaya riset dan inovasi.	- Identifikasi dan Penetapan 1. Mengidentifikasi dan menetapkan kelembagaan mitra yang akan diprioritaskan. 2. Menentukan jumlah anggaran riset yang dibutuhkan setiap tahunnya. 3. Menganalisis pola komunikasi dan koordinasi untuk menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga. 4. Memetakan Potensi kerjasama kemitraan dalam jangka panjang. 5. Mengkaji potensi difusi inovasi yang dapat diimplementasikan dan memanfaatkan media digital. 6. Mengidentifikasi data hasil riset dan inovasi yang diprioritaskan untuk didesiminasikan dalam	- Implementasi dan Evaluasi 1. Membuat MoU dengan lembaga yang diprioritaskan untuk menjalankan kemitraan/ kerjasama. 2. Melaksanakan riset dan inovasi prioritas yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kelitbangan. 3. Melaksanakan kerjasama riset dan inovasi dengan berbagai lembaga yang telah ditentukan berdasarkan konsep skema kerjasama yang telah dibuat. 4. Mendifusikan dan mendiseminasikan teknologi, alih teknologi, komersialisasi hasil riset BRIDA, Perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dengan mengadakan event pameran	- Penguatan Regulasi 1. Mengevaluasi/merevisi poin-poin strategis dalam dokumen perjanjian/MoU. 2. Menyusun dokumen rekomendasi kebijakan/“ <i>Policy Brief</i> ” berdasarkan hasil riset dan hasil evaluasi implementasi inovasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kota Kendari. 3. Membuat dokumen evaluasi hasil pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kemitraan ke depan. 4. Memperluas ruang diseminasi dengan melibatkan <i>stakeholders</i> .

Sasaran Strategis dan Fokus	Tahun 1 dan 2	Tahun 3 dan 4	Tahun ke- 5 (Akhir Periode/Tahun)
Kebijakan Riset dan Inovasi	Perumusan	Implementasi	Evaluasi
	menyelesaikan permasalahan daerah.		
4. BUDAYA RISET DAN INOVASI			
a) Kemiskinan dan kemerosotan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. b) Promosi dan Kampanye Inovasi c) Apresiasi Prestasi Inovasi d) Inventarisasi Pengembangan dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	- Pengenalan dan Pemahaman 1. Mengkaji kondisi dan dinamika kemiskinan dan kemerosotan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 2. Sosialisasi program promosi dan kampanye inovasi kepada stakeholders. 3. Mengidentifikasi jenis lomba inovasi (produk) yang akan digelar. 4. Mengkaji pengembangan pertumbuhan UMKM yang memerlukan intervensi riset dan inovasi. 5. Menginventarisasi potensi Iptek di masyarakat, dan memastikannya untuk mendapatkan perlindungan.	- Penguatan 1. Kolaborasi stakeholders dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstream melalui analisa perwujudan kebijakan dan program pemerintah nasional, provinsi dan daerah. 2. MoU penguatan kolaborasi dengan media cetak dan media <i>online</i> serta pemanfaatan media sosial dalam promosi dan kampanye inovasi. 3. Menyusun SOP kegiatan pagelaran lomba inovasi dan kegiatan apresiasi inovasi. 4. Menginventarisasi seluruh data perusahaan start up/UMKM yang membutuhkan intervensi riset dan inovasi, sentra UMKM dan ekonomi kreatif di wilayah tingkat kecamatan/kelurahan.	- Implementasi dan Pemberdayaan 1. Indeks kemiskinan, angka kriminalitas, dan hasil kajian kemerosotan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. 2. Diseminasi program inovasi dengan memanfaatkan kolaborasi dengan media cetak dan media online/media sosial. 3. Menggelar kegiatan lomba inovasi dan kegiatan apresiasi inovasi berupa <i>innovation award</i> setiap tahun. 4. Mendampingi dan memfasilitasi start up pemula/UMKM untuk mendapatkan dukungan riset dan inovasi dalam pengembangan usaha, centra usaha dan peningkatan nilai tambah ekonomi. 5. Membentuk dan/atau menguatkan komunitas Start

Sasaran Strategis dan Fokus	Tahun 1 dan 2	Tahun 3 dan 4	Tahun ke- 5 (Akhir Periode/Tahun)
Kebijakan Riset dan Inovasi	Perumusan	Implementasi	Evaluasi
		5. Menyusun regulasi Perda/Perwali tentang perlindungan Iptek masyarakat.	up/UMKM dalam rangka upaya pemberdayaan berbasis riset dan inovasi. 6. Melakukan pendataan dan mendokumentasikan berupa jumlah paten dan jumlah merek) yang telah mendapat perlindungan dari Kemenkumham, serta memastikan seluruh potensi Iptek dimasyarakat dapat memperoleh perlindungan.
5. KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
a) Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah b) Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	- Identifikasi dan Pembelajaran 1. Mengidentifikasi hasil-hasil kajian riset dan inovasi yang telah dan belum ditindaklanjuti oleh OPD lingkup Kota Kendari. 2. Menginventarisasi Produk unggulan daerah yang memerlukan penciptaan nilai tambah produk melalui dukungan teknologi. 3. Menganalisis kendala	- Implementasi dan Evaluasi 1. Mendorong OPD untuk menindaklanjuti hasil-hasil riset dan inovasi. 2. Mendampingi dan memfasilitasi pelaku usaha untuk menciptakan nilai tambah pada suatu produk dengan menjalin kolaborasi dengan OPD teknis. 3. Memfasilitasi hilirisasi produk unggulan daerah Kota Kendari. 4. Menyusun klaster potensi	- Penguatan Regulasi 1. Membuat dokumen rekomendasi kebijakan yang berkualitas sesuai dengan hasil riset dan inovasi. 2. Menyusun regulasi tentang penciptaan nilai tambah produk berbasis teknologi. 3. Menyusun atau memperkuat regulasi penetapan produk unggulan daerah. 4. Fokus program pengembangan

Sasaran Strategis dan Fokus	Tahun 1 dan 2	Tahun 3 dan 4	Tahun ke- 5 (Akhir Periode/Tahun)
Kebijakan Riset dan Inovasi	Perumusan	Implementasi	Evaluasi
c) Kesesuaian kebijakan secara hierarki antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota Kendari	hilirisasi produk unggulan daerah yang belum melibatkan unsur <i>pentahelix</i>. 4. Mengkaji model klaster inovasi yang tepat untuk diterapkan di Kota Kendari. 5. Mengkaji rancangan model bisnis dari setiap produk unggulan daerah sesuai dengan analisis rantai nilai, rantai pasok dan adopsi teknologi dari hulu ke hilir. 6. Mengidentifikasi program prioritas dan arah riset dan inovasi nasional, untuk dapat diselaraskan dengan program arah riset dan inovasi di daerah.	inovasi lingkup wilayah Kota Kendari. 5. Mensosialisasikan hasil analisis rantai nilai, rantai pasok dan adopsi teknologi dari hulu ke hilir kepada stakeholder dan pelaku usaha. 6. Melaksanakan program prioritas kelitbangan, riset dan inovasi di daerah yang searah dengan program riset dan inovasi ditingkat nasional.	riset dan inovasi di daerah akan diarahkan pada pengembangan produk unggulan daerah dan daya saing.
6. PENYELERASAN PERKEMBANGAN GLOBAL			
a) Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan	- Pengenalan dan Pemahaman 1. Mengkaji isu-isu strategis internasional yang searah dan dapat	- Penyelarasan 1. Melaksanakan program prioritas riset dan inovasi daerah yang linear dengan isu-isu nasional	- Pengembangan 1. Mengembangkan program riset dan inovasi pada isu-isu SDGs.

Sasaran Strategis dan Fokus	Tahun 1 dan 2	Tahun 3 dan 4	Tahun ke- 5 (Akhir Periode/Tahun)
Kebijakan Riset dan Inovasi	Perumusan	Implementasi	Evaluasi
ekosistem Riset dan Inovasi di daerah. b) Tantangan keberlanjutan, dalam bentuk inovasi yang harus mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, ekosistem dan genetik, dan beradaptasi dengan perubahan iklim. c) Penguatan kerjasama antar daerah, nasional, dan internasional.	diimplementasikan dengan program prioritas riset dan inovasi di daerah. 2. Penyusunan kajian atau dokumen wajib lingkungan, profil Kehati, kajian genetika, Inventarisasi emisi GRK, pemahaman kajian <i>sink and source carbon</i>, <i>trade carbon</i>, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim kaitannya dengan Ketahanan Pangan, Air, dan Energi Berkelanjutan, dan lain sebagainya. 3. Menganalisis peluang-peluang kerjasama yang dimungkinkan untuk kolaborasi kegiatan riset dan inovasi lingkup internasional.	dan internasional. 2. Membangun skema koordinasi dan komunikasi dengan BRIN kaitannya dengan fasilitasi dalam penyelenggaraan kerjasama pelaksanaan riset nasional dan skala internasional.	2. Melibatkan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi dan BRIN dalam implementasi kerjasama nasional riset, dan skala internasional yang akan dilakukan.

Sumber: Data Sekunder, diolah Tim Ahli (2025)



PETA JALAN RISET DAN INOVASI DAERAH

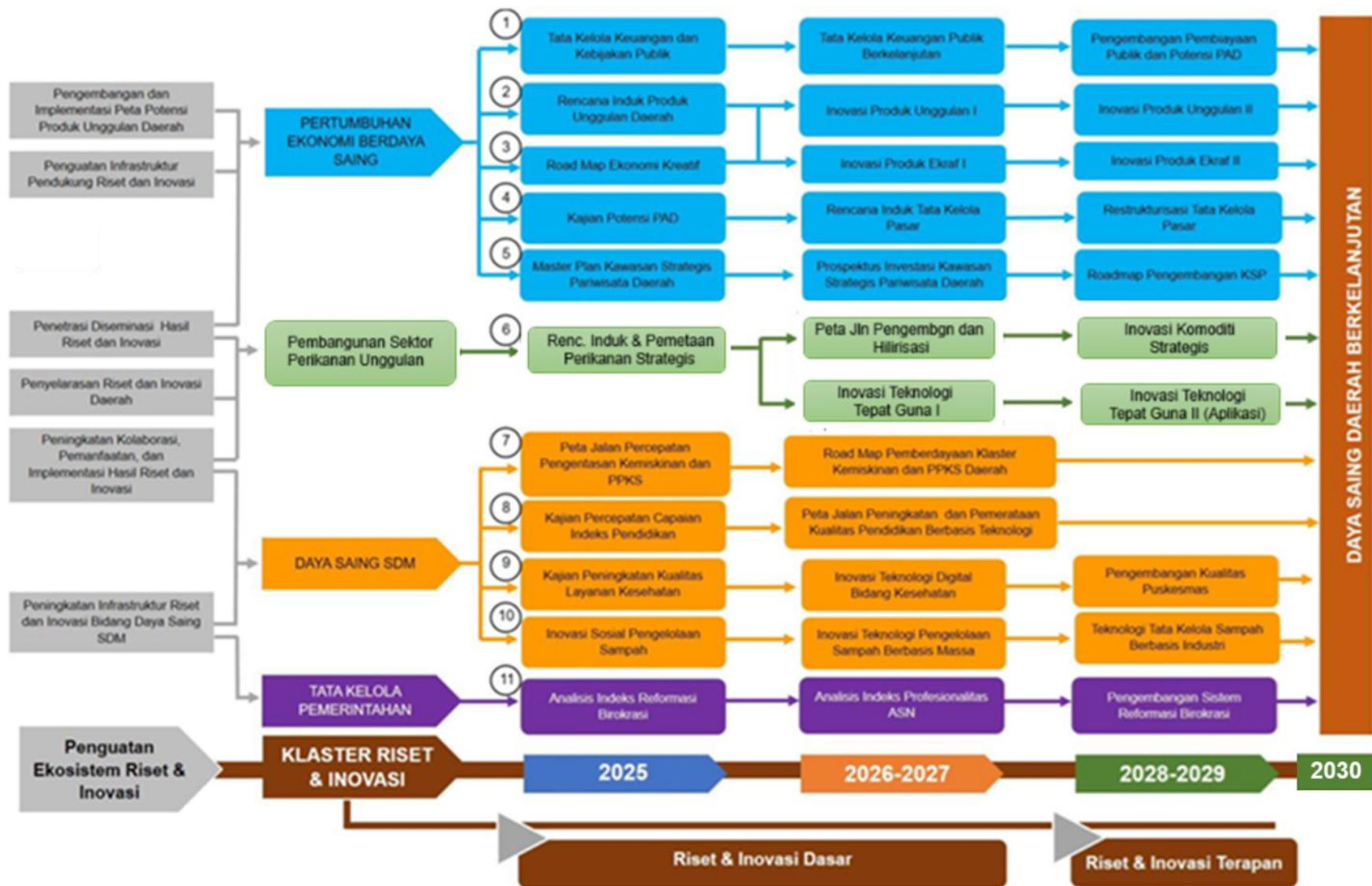
Keberhasilan pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan proses perencanaan dan kualitas kebijakan pembangunan yang keduanya harus didasarkan pada data dari riset dan inovasi sebelumnya. Maka, proses perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Kendari. Adapun ciri dari kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang bersifat aplikatif dan disusun berdasarkan bukti-bukti (*evidence*) yang bersifat terkini, relevan, representatif, dan valid. Kegiatan riset dan inovasi idealnya dilakukan untuk menyediakan bukti secara ilmiah terhadap permasalahan pembangunan, sehingga implementasi kebijakan lebih tepat sasaran dan sesuai target yang hendak dicapai.

Kegiatan riset dan inovasi idealnya juga linear dengan isu strategis dan sasaran utama RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD di Kota Kendari, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata, data yang relevan, dan mampu mendukung sistem pengambilan keputusan untuk kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan pembuktian (*science and evidence*). Selain itu, riset dan inovasi Kota Kendari mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi, menghasilkan riset dan inovasi yang berdampak, dan meningkatkan manfaat riset bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, sistem difusi inovasi dan diseminasi riset juga dikembangkan dalam rangka menyediakan bahan acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan perangkat daerah di Kota Kendari.

Hasil riset dan inovasi yang bertumpu pada data di masyarakat, analisis yang mendalam, dan inovasi pengembangan mendukung Pemerintah Kota Kendari dalam menentukan arah pembangunan daerah masa datang (*delivery mechanism*). Dalam konsep ini, Masyarakat juga dilibatkan untuk turut serta dalam proses pelaksanaan riset dan inovasi secara partisipatif sehingga

budaya riset dan inovasi tetap bertahan dan berkembang di Kota Kendari. Dalam kaitan itu, Bappedalitbang Kota Kendari (sebagai pelaksana tata kelola riset dan inovasi di Kota Kendari) dapat menyediakan masukan berupa hasil riset dan inovasi yang relevan dengan sasaran utama kebijakan Pemerintah Kota Kendari bekerjasama dengan perangkat daerah dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah. Ini bertujuan agar *evidence and knowledge-based policy* bisa dihasilkan untuk pencapaian target sasaran Pemerintah Kota Kendari.

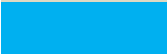
6.1 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2030



Gambar 6.1 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2030



Strategi penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah



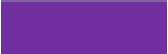
Klaster Riset dan Inovasi “Pertumbuhan Ekonomi Berdaya Saing”



Klaster Riset dan Inovasi “Pembangunan Sektor Perikanan dan kelautan Unggulan”



Klaster Riset dan Inovasi “Daya Saing Sumber Daya Manusia”



Klaster Riset dan Inovasi “Tata Kelola Pemerintahan”

Baseline Riset dan Inovasi Kota Kendari Tahun Dasar:

- 
1. Strategi Penguatan SDM Berdaya Saing melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja di Kota Kendari
 2. Inovasi Layanan Terpadu di Mal Pelayanan Publik: Meningkatkan Efisiensi, Transparansi, dan Kepuasan Masyarakat
 3. Membangun Ekosistem Inovasi Daerah untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Partisipatif
 4. Model Intervensi Multi-Sektor dalam Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
 5. Strategi Terpadu Pencegahan Stunting melalui Intervensi Gizi, Sanitasi, dan Edukasi Keluarga
 6. Pengelolaan Infrastruktur Hijau dan Drainase Berbasis Ekosistem untuk Mitigasi Banjir dan Genangan
 7. Perencanaan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan: Integrasi Transportasi, Ruang Terbuka Publik, dan Aksesibilitas
 8. Transformasi Kawasan Kumuh menjadi Permukiman Layak Huni melalui Pendekatan Partisipatif
 9. Penerapan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Sirkular Ekonomi di Sumber untuk Mewujudkan Kota Kendari yang Bersih dan Berkelanjutan
 10. Strategi Peningkatan Pendapatan melalui Identifikasi dan Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
 11. Penguatan Kawasan Ekonomi Lokal melalui Kolaborasi UMKM, Pertanian Peri-Urban, dan Digitalisasi Pasar Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya Lokal sebagai Penggerak Ekonomi Berkelanjutan di Kota Kendari



Sasaran Akhir “Daya Saing Daerah Berkelanjutan”

Sumber: Data Sekunder, diolah dan Analisis Tim Ahli (2025)

6.2 Program Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2030

Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang akan dicapai pemerintah daerah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur beserta targetnya. Sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Berbagai program yang dituangkan dalam rencana Pembangunan daerah merupakan jalan membuka pengembangan bidang riset dan inovasi daerah Kota Kendari.

Sasaran utama kebijakan Pemerintah Kota Kendari diuraikan berdasarkan 5 (lima) tujuan Pembangunan Kota Kendari yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berkarakter dengan sasaran sebagai berikut: Meningkatnya kualitas pendidikan; meningkatya kualitas pelayanan kesehatan, dan meningkatnya manusia yang berbudaya.
2. Tujuan 2: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, Inovasi dan Digitalisasi dengan sasaran sebagai berikut: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; Meningkatnya pembangunan daerah yang bersih dan transparan; Meningkatnya pelayanan publik berbasis digital; dan terwujudnya Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan demokrasi politik, ekonomi dan Sosial budaya.
3. Tujuan 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkesinambungan, dengan sasaran meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan berkeadilan.
4. Tujuan 4: Menciptakan kota yang nyaman, ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan sasaran: Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan; dan meningkatnya infrastruktur perkotaan.
5. Tujuan 5: Meningkatnya perekonomian unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan sasaran: Meningkatnya sektor ekonomi unggulan berbasis potensi daerah; dan menurunnya pengangguran di Kota Kendari.

6.2.1 Klaster Riset Inovasi: Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Peta Jalan - Meningkatkan Kualitas Pendidikan:

- Penelitian yang diarahkan pada penguatan pendidikan berbasis peningkatan modal sosial, kerukunan antar etnis dan agama, serta karakter dan kearifan lokal;
- Penelitian yang mengukur dan mengevaluasi keseluruhan kualitas fasilitas pendidikan, kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta kelembagaan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- Riset dan inovasi yang mengarah pada pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi terhadap Pembangunan;
- Penelitian meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai kebudayaan dan norma dalam masyarakat
- Penelitian yang mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempercepat pencapaian indikator-indikator pendidikan, terutama rata-rata lama sekolah, angka putus sekolah, dan angka partisipasi kasar/murni.
- Melibatkan analisis sosial, analisis kurikulum, infrastruktur pendidikan, dan penerapan teknologi digital dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Melibatkan analisis akses teknologi, pelatihan guru, dan integrasi teknologi dalam kurikulum.
- Meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pendidikan, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan menciptakan generasi yang lebih terampil dan berpengetahuan.

2. Peta Jalan - Meningkatkan Kualitas Kesehatan Melalui Pelayanan

Dasar yang Berkualitas:

- Pemenuhan kebutuhan layanan dan jaminan kesehatan yang terjangkau dan sesuai standar, dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan, upaya promotif dan preventif hidup sehat, dan penguatan kapasitas tenaga Kesehatan.

- Penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan dengan menganalisis aspek-aspek seperti aksesibilitas, kualitas, ketanggapan, responsibilitas, dan efektivitas program kesehatan.
- Melibatkan evaluasi fasilitas kesehatan, tata kelola layanan kesehatan, tenaga kesehatan, sistem informasi kesehatan, dan persepsi kepuasan masyarakat.
- Bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan keterjangkauan layanan kesehatan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. Maka salah satu sasaran utamanya adalah penurunan prevalensi stunting dan pencegahan dini risiko stunting di masyarakat.
- Inovasi teknologi digital bidang kesehatan, melalui:
 - a) Penelitian yang mengeksplorasi penerapan teknologi digital dalam bidang kesehatan, mencakup *telemedicine*, manajemen data kesehatan, dan pengembangan aplikasi kesehatan.
 - b) Melibatkan evaluasi keefektifan teknologi, privasi data, dan penerimaan masyarakat terhadap inovasi.
 - c) Meningkatkan akses layanan kesehatan, mempercepat diagnosis, dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan.

6.2.2 Klaster Riset Inovasi: Tata Kelola pemerintahan Berorientasi pada Pelayanan, Inovasi, dan Digitalisasi

- Penelitian yang mengarahkan pada upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berbasis digital secara efektif, efisien dan terintegrasi.
- Penelitian yang menganalisis indikator dan metode untuk mengukur efektivitas dan kemajuan reformasi birokrasi, termasuk perbaikan proses administratif, kebijakan, dan kualitas layanan publik. Termasuk penilaian kebijakan reformasi, partisipasi masyarakat, dan dampak pada pelayanan publik.
- Riset yang mampu mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan dan bebas korupsi, serta

bagaimana profesionalitas ASN, kebijakan pengembangan ASN, partisipasi dalam pelatihan, dan implementasi kode etik, serta penciptaan lingkungan kerja yang produktif.

- Riset dan inovasi untuk pengembangan sistem reformasi birokrasi diantaranya analisis perkembangan dan efektivitas sistem dalam mendukung reformasi birokrasi, mencakup infrastruktur teknologi informasi, kebijakan, dan strategi pengembangan SDM. Kemudian evaluasi implementasi sistem, kesiapan teknologi, dan dampak pada kinerja birokrasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang adaptif.
- Inovasi memperkuat ketangguhan wilayah dan stabilitas ekonomi makro, dengan meningkatkan kondusivitas wilayah.
- Tata kelola keuangan dan kebijakan publik, yang merupakan:
 - a) Kajian mendalam terhadap cara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya keuangan publik. Penelitian ini berfokus pada tata kelola penganggaran, *forecasting* dan proyeksi anggaran dan realisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam eksekusi kebijakan fiskal daerah.
 - b) Penelitian ini melibatkan analisis kebijakan publik terkait penganggaran, alokasi fiskal, pelaporan keuangan, pengawasan masyarakat, dan pemenuhan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial.
 - c) Bertujuan memastikan kondusivitas dan stabilitas tata kelola fiskal daerah. Berikutnya, fiskal daerah dapat berkelanjutan dengan sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik dalam rangka mencapai tujuan, target, dan sasaran pemerintah daerah.
- Tata Kelola Keuangan Publik Berkelanjutan
 - a) Penelitian tentang strategi dan konsep implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan publik, menjaga stabilitas, mengendalikan anggaran dan realisasi belanja, dan capaian *output* dan *outcome* yang terukur.

- b) Ini melibatkan perumusan standar anggaran dan alokasi, sistem penganggaran dana untuk kebijakan berkelanjutan, dan pengendalian melalui mekanisme tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik.
- c) Bertujuan untuk menciptakan fiskal yang sehat, stabil, berkelanjutan, dan meminimalkan risiko-risiko fiskal terhadap pembangunan dan layanan masyarakat.

6.2.3 Klaster Riset Inovasi: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Kota Tanggap Bencana

- Penelitian yang mengarahkan pada analisis kebutuhan pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan yang terintegrasi, efisien dan ramah lingkungan, serta peningkatan konektivitas, jaringan logistik, dan penguatan infrastruktur layanan dasar kewilayahan.
- Penguatan riset dan inovasi terhadap aksi penurunan emisi GRK melalui transformasi komoditas unggulan daerah menuju ekonomi rendah karbon, meliputi: 1) Kajian aktivitas Pembangunan dan perlunya dokumen lingkungan hidup, (2) Kajian ketersediaan ruang terbuka hijau, (3) Kajian pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, dan (4) Kajian tentang sanitasi untuk mendukung data atau buku putih sanitasi daerah.
- Kajian mitigasi dan kesiapsiagaan bencana daerah berbasis pemenuhan infrastruktur dan lingkungan.
- Bidang persampahan, perlu inovasi sosial pengelolaan sampah, melalui peta jalan kajian:
 - a) Penelitian mengeksplorasi inovasi sosial dalam pengelolaan sampah, melibatkan pendekatan partisipatif masyarakat, pemilahan sampah, dan penerapan teknologi hijau.
 - b) Termasuk analisis sikap masyarakat, efektivitas program, dan pengaruh inovasi pada lingkungan. Dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, mendorong kesadaran masyarakat, dan menciptakan pola konsumsi yang berkelanjutan.

- c) Inovasi penelitian berbasis teknologi dan geospasial, melalui:
- 1) Penelitian yang memfokuskan pada pengembangan inovasi teknologi untuk pengelolaan sampah dalam skala besar, termasuk daur ulang, penggunaan energi terbarukan, dan pemrosesan sampah organik.
 - 2) Melibatkan analisis teknologi yang ramah lingkungan, biaya implementasi, dan integrasi dalam kebijakan daur ulang. Inovasi dan teknologi yang dirancang terutama untuk mengolah sampah organik yang tidak bisa diolah oleh rumah tangga. Pembagian pengelolaan yaitu sampah organik oleh rumah tangga dan sampah anorganik oleh pemerintah atau organisasi pemerintah yang dibentuk.
 - 3) Mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
- d) Teknologi Tata Kelola Sampah Berbasis Industri, melalui:
- 1) Penelitian mengembangkan tata kelola sampah yang telah distimulus oleh inovasi teknologi menjadi skala industri yang lebih besar. Ini termasuk tata kelola sampah, sistem manajemen limbah, teknologi pengolahan, dan pendekatan berkelanjutan hingga pemasaran dan penjualan hasil pengolahan sampah.
 - 2) Melibatkan analisis tata kelola, efisiensi teknologi, dampak lingkungan, dan integrasi dengan sistem industri serta pemasaran produk pengolahan sampah.
 - 3) Mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah, dan menciptakan model tata kelola sampah yang efektif.

6.2.4 Klaster Riset Inovasi: Perlindungan dan Transformasi Sosial

- Kajian peningkatan dan evaluasi pelayanan sosial dan kesejahteraan Masyarakat Kota Kendari, melalui update DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu, kelompok marjinal, menuju kemandirian sosial dan ekonomi.

- Kajian kinerja dan peran pemerintah, BLK dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang kompetitif, serta afirmasi *reskilling* dan *upskilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang potensial perekonomian.
- Menyusun *road map* Pemberdayaan Klaster Kemiskinan dan PPKS Daerah melalui:
 - a) Penelitian yang mengembangkan peta jalan untuk pemberdayaan klaster kemiskinan dan penanggulangan masalah sosial di tingkat daerah, melibatkan koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.
 - b) Termasuk identifikasi klaster kemiskinan, model pemberdayaan yang relevan dengan setiap jenis klaster kemiskinan, alokasi sumber daya dan keuangan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.
 - c) Meningkatkan efektivitas program pemberdayaan, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, dan memberikan solusi berbasis komunitas.

6.2.5 Klaster Riset Inovasi: Ekonomi Daerah yang Kokoh dan Berkeadilan Berbasis Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah

- Penelitian yang mengarahkan pada capaian target dan realisasi penanaman modal daerah guna pengembangan kawasan ekonomi berkualitas melalui RUPM, Pemetaan Potensi Investasi, Strategi Promosi Penanaman Modal, dan IPRO suatu komoditas unggulan daerah Kota Kendari.
- Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian berbasis kawasan ekonomi yang terintegrasi.
- Kajian tentang optimalisasi kemudahan modal dan perijinan, perlindungan dan pemberdayaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, penguatan sektor hilirisasi komoditas potensial daerah, dan penguatan ekonomi syariah daerah dalam mendukung ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
- Studi yang diarahkan pada:
 - a) Perencanaan strategis untuk indeksasi, menentukan dan memetakan produk unggulan daerah sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyusun strategi pengembangan produk unggulan unggulan yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif ekonomi daerah Kota Kendari.

- b) Ini melibatkan identifikasi produk unggulan, analisis pasar, pengembangan infrastruktur pendukung, pengembangan sumber daya manusia, dan pembentukan jejaring kerjasama.
- c) Bertujuan untuk menciptakan diferensiasi dan keunggulan bersaing daerah, menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
- d) Penelitian lebih lanjut terkait pengembangan inovasi dalam produk-produk tertentu yang diidentifikasi sebagai produk unggulan dan, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, kualitas, efisiensi, dan pemasaran. Selain pengembangan inovasi dan teknologi lanjutan, riset ini juga dapat berupa penciptaan inovasi dan teknologi pada komoditas produk unggulan lainnya selain produk unggulan yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan. Termasuk riset dan pengembangan inovasi dan teknologi produksi, pemasaran inovatif, digitalisasi bisnis, dan adaptasi terhadap tren pasar. Memperkuat posisi produk unggulan daerah di pasar global, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan daya saing produk.

- *Road Map* Ekonomi Kreatif

- a) Penelitian ini merupakan identifikasi, analisis holistik, dan langkah strategis pengembangan dan pelebagaan sektor ekonomi kreatif.
- b) Termasuk identifikasi subsektor ekonomi kreatif, pelibatan komunitas kreatif, fasilitasi inovasi, dan pengembangan kebijakan yang mendukung 17 sub sektor ekonomi kreatif.
- c) Ini akan mampu mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya tarik budaya serta ekonomi daerah sehingga ekonomi lebih bernilai tambah dan akseleratif.

- d) Pengembangan inovasi produk-produk unggulan daerah tertentu dengan melibatkan riset dan pengembangan teknologi tepat guna, penggunaan teknologi baru, dan strategi pemasaran inovatif, untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan global, menciptakan stimulus pertumbuhan ekonomi secara agregat, dan menciptakan lapangan kerja.
- e) Penelitian inovasi dan teknologi tepat guna dalam mengembangkan produk dan layanan pada 17 subsektor ekonomi kreatif dengan produksi yang lebih efisien karena dukungan inovasi dan teknologi, termasuk identifikasi tren kreatif, kolaborasi antar industri, dan pengembangan ekosistem inovasi. Ini bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja dalam sektor ekonomi kreatif di Kota kendari.
- Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah
 - a) Penelitian tentang potensi sumber-sumber pendapatan lokal yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, identifikasi dan penetapan standar minimum pendapatan asli daerah yang bisa didapatkan agar memiliki target capaian yang jelas.
 - b) Melibatkan analisis wajib dan objek pajak, mekanisme pajak dan retribusi daerah, investasi, dan kerjasama sektor swasta.
 - c) Penelitian ini bertujuan menciptakan diversifikasi pendapatan daerah, meningkatkan kapasitas keuangan keuangan, dan meminimalkan ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat.
- Master Plan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
 - a) MP merupakan rencana induk pengembangan kawasan strategis pariwisata. Analisis ini memetakan daya dukung lahan, lingkungan alam, ketersediaan infrastruktur layanan umum, aktivitas ekonomi dan sosial, dan potensi pengembangan objek wisata.

- b) Terutama mengidentifikasi daya tarik wisata, pengembangan kawasan inti atau penyangga atau pendukung atau pelayanan, fasilitas, pengelolaan risiko, dan partisipasi masyarakat.
 - c) Bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan menjadi katalisator ekonomi daerah yang dapat menarik sektor lainnya melalui sektor pariwisata sebagai lokomotif, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mempromosikan budaya lokal di Kota Kendari.
 - d) Penelitian mengenai perencanaan dan *roadmap* untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata, mencakup tahapan pengembangan, prioritas infrastruktur, dan upaya pemasaran, melibatkan analisis potensi pariwisata, ketersediaan infrastruktur, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, meningkatkan daya tarik wisata, dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal. Selain itu, ini juga mengoptimalkan investasi yang telah ada sehingga memperluas dan menambah dampak ekonomi bagi masyarakat
- Rencana Induk Tata Kelola Pasar
 - a) Penelitian perencanaan dan implementasi tata kelola pasar yang efektif, mencakup peran pemerintah, regulasi, infrastruktur, dan partisipasi sektor swasta dalam menciptakan pasar yang adil, efisien, dan berdaya saing.
 - b) Melibatkan analisis regulasi pasar, transparansi, perlindungan konsumen, serta inovasi dalam sistem tata kelola.
 - c) Meningkatkan daya saing pasar lokal, melibatkan sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.
 - d) Penelitian tentang restrukturisasi tata kelola pasar. Ini mengenai evaluasi struktur tata kelola, perumusan tata kelola terbaik, perumusan strategi pengelolaan pasar yang lebih adaptif, responsif, dan akseleratif. Hal ini dimisalkan sebagian

pasar yang dikelola Pemerintah Kota Kendari dijadikan BUMD sehingga memiliki mekanisme kinerja yang lebih profesional.

- e) Analisis ini meliputi tata kelola, penataan ruang, perilaku ekonomi pedagang, ergonomi pengunjung, potensi ekonomi sosial, dan risiko-risiko berbasis sosial masyarakat. Dengan demikian, kebijakan restrukturisasi pasar bisa dijalankan dengan holistik dan tepat sasaran. Kemudian meningkatkan daya saing pasar, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan.

6.3 Program, Rencana Aksi, dan Target Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2030

Tabel 6.1. Program, Rencana Aksi, dan Target Riset Dan Inovasi Daerah Kota Kendari 2025-2030

Visi & Misi Pemerintahan Kota Kendari Tema Riset dan Inovasi	Prioritas Permasalahan Pembangunan Daerah dan Perurusan	Indikator Tujuan/ Sasaran (Program Prioritas)	Kegiatan / Sub Kegiatan Riset & Inovasi Berdasarkan RIPJP IPTEK	Tema/ Judul Kegiatan	Tahun						Sasaran Akhir	Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI: TERWUJUDNYA KOTA KENDARI SEBAGAI KOTA LAYAK HUNI YANG SEMAKIN MAJU, BERDAYA SAING, ADIL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN												
TEMA RISET & INOVASI: “Membangun Riset dan Inovasi untuk SDM dan Ekonomi Berdaya Saing, Menuju Kota Unggul dan Berkelanjutan”												
1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter	Belum optimalnya daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berkarakter	- Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi Daerah - Pengembangan infrastruktur dasar (dalam arti luas) - Penguatan kolaborasi / kemitraan Riset dan Inovasi di daerah - Penyediaan anggaran - Budaya riset dan inovasi (dalam arti luas)	Penyusunan Rancangan Perwali Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Peng. dan Teknologi Kota Kendari Tahun 2025-2030	√							BAPPEDA
		a) Meningkatnya kualitas pendidikan		a. Strategi Penguatan SDM Berdaya Saing melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja di Kota Kendari. b. Evaluasi Persebaran Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari. c. Strategi Peningkatan Kualitas Guru dan Pendidikan Karakter berbasis <i>lifelong learning</i>, <i>Skills Future</i>, untuk Meningkatkan Konsistensi Kebijakan Jangka Panjang Pendidikan di Kota Kendari d. Kajian Motivasi Belajar, Model-Model Pembelajaran, Media Pembelajaran, Pemanfaatan Teknologi, dan Sosialisasi AI, <i>Semantic Scholar</i>, pada Tingkat Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.		√			√			BRIDA Dikbud Perguruan Tinggi

Visi & Misi Pemerintahan	Perioritas Permasalahan	Indikator Tujuan/ Sasaran (Program	Kegiatan / Sub Kegiatan Riset &	Tema/	Tahun						Sasara n Akhir	Pelaksana
							√					
		b) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan		a. Evaluasi kebijakan terkait penyediaan layanan kesehatan yang bermutu b. Kajian Analisis Pengendalian Persediaan darah di Unit Transfusi Darah RSUD Kota Kendari c. Evaluasi Layanan Prima Kesehatan pada RS atau Puskesmas, Posyandu, Polindes di Kota Kendari d. Kajian layanan kesehatan primer dan strategi peningkatan kesehatan modern menuju Kendari Kota Sehat e. Analisis Komparasi Data Kejadian Stunting Kawasan Pusat Perkotaan dan Kawasan Pinggiran (<i>Periphery</i>), serta Kajian Intervensi Gizi Spesifik, Pola Infeksi Berulang, serta Pola Hidup, dan Penerapan Teknologi Informasi untuk Eduksi Gizi dalam Mendukung Program Penurunan Stunting di Kota kendari		√						BRIDA Dinkes
		c) Meningkatnya manusia yang berbudaya		a. Penguatan pendidikan berbasis peningkatan modal sosial, kerukunan antar etnis dan agama, serta karakter dan		√		√		√		BRIDA Dikbud

Visi & Misi Pemerintahan	Perioritas Permasalahan	Indikator Tujuan/ Sasaran (Program	Kegiatan / Sub Kegiatan Riset &	Tema/	Tahun						Sasara n Akhir	Pelaksana	
				kearifan lokal b. Riset dan inovasi yang mengarah pada pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi terhadap Pembangunan c. Penelitian peningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai kebudayaan dan norma dalam masyarakat				√				√	Dinsos BKPSDM
2. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pelayanan, Inovasi dan Digitalisasi	Pelayanan Dasar, Inovasi dan Digitalisasi masih perlu ditingkatkan	Meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis inovasi dan digitalisasi	- Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi Daerah - Penataan basis data riset dan inovasi - Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi - Penguatan kolaborasi / kemitraan Riset dan Inovasi di daerah - Peningkatan difusi inovasi - Inventarisasi Pengembangan dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. - Budaya riset dan	a. Inovasi Layanan Terpadu di Mal Pelayanan Publik: Meningkatkan Efisiensi, Transparansi, dan Kepuasan Masyarakat Kota Kendari b. Kajian tentang Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI- WBK) untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi c. Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan terpadu berbasis IT (perencanaan, pengendalian dan monev) d. Kajian Budaya kerja dan etos kerja pegawai Kota kendari e. Analisis Kebutuhan Diklat untuk Mengetahui Jenis Diklat yang Dibutuhkan dalam Pengembangan Kompetensi ASN Lingkup Kota Kendari f. Penelitian lain yang		√						BRIDA Komunikas i dan Informatika Dikbud BKPSDM BKAD	
		a) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah			√								
						√							

Visi & Misi Pemerintahan	Perioritas Permasalahan	Indikator Tujuan/ Sasaran (Program	Kegiatan / Sub Kegiatan Riset &	Tema/	Tahun						Sasara n Akhir	Pelaksana
			inovasi (dalam arti luas)	mengarahkan pada upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berbasis digital secara efektif, efisien dan terintegrasi			√					
								√				
									√	√	√	
		b) Meningkatkan pembangunan daerah yang bersih dan transparan		Membangun Ekosistem Inovasi Daerah untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Partisipatif di Kota Kendari		√						BRIDA
				Analisis kebijakan publik terkait penganggaran, alokasi fiskal, pelaporan keuangan, pengawasan masyarakat, dan pemenuhan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial					√	√		BKAD Komunikasi dan Informatika
				Kajian mendalam terhadap cara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya keuangan publik. Penelitian ini berfokus pada tata kelola penganggaran, <i>forecasting</i> dan proyeksi anggaran dan realisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam eksekusi kebijakan fiskal daerah.					√	√		Discapil
		c) Meningkatkan pelayanan		Kajian optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dan				√				BRIDA

Visi & Misi Pemerintahan	Perioritas Permasalahan	Indikator Tujuan/ Sasaran (Program)	Kegiatan / Sub Kegiatan Riset &	Tema/	Tahun						Sasara n Akhir	Pelaksana
		publik berbasis digital		penerimaan daerah lainnya								BKAD
				Pengembangan pelayanan				√				Dishub
				pendapatan dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah								Komunikas i dan Informatika
				Kajian Inovasi memperkuat ketangguhan wilayah dan stabilitas ekonomi makro, dengan meningkatkan kondusivitas wilayah					√			
		d) Terwujudnya Kehidupan bermasyaraka t yang berlandaskan Demokrasi Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya		a. Seminar Kebudayaan di Kota Kendari b. Kajian efektivitas keberadaan Kekayaan Ormas terhadap kontribusinya pada Pembangunan Kota Kendari c. Rencana Induk Tata Kelola Pasar: Analisis ini meliputi tata kelola, penataan ruang, perilaku ekonomi pedagang, ergonomi pengunjung, potensi ekonomi sosial, dan risiko-risiko berbasis sosial masyarakat. Kebijakan restrukturisasi pasar bisa dijalankan dengan holistik dan tepat sasaran. Kemudian meningkatkan daya saing pasar, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.				√				BRIDA Dikbud BKPSDM Dinsos Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
3. Mengembangkan perlindungan sosial yang adaptif dan transformasi sosial	Belum optimalnya perlindungan dan transformasi sosial	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan Berkesinambungan	- Budaya riset dan inovasi (dalam arti luas)	a. Model Intervensi Multi-Sektor dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Perkotaan di Kota Kendari b. Strategi Terpadu Pencegahan Stunting melalui Intervensi Gizi, Sanitasi, dan Edukasi Keluarga di Kota Kendari		√						BRIDA Dinkes Dinsos BKPSDM

Visi & Misi Pemerintahan	Perioritas Permasalahan	Indikator Tujuan/ Sasaran (Program	Kegiatan / Sub Kegiatan Riset &	Tema/	Tahun						Sasara n Akhir	Pelaksana	
		a) Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif dan berkeadilan b) Transformasi Sosial		c. Kajian Dokumentasi Hak Kekayaan Intelektual Komunal Suku Tolaki di Kota Kendari d. Kajian memudarnya nilai-nilai etika dan moral generasi muda atau milenial saat ini di Kota Kendari e. Kajian Pengembangan Kelembagaan Nelayan dan Petani Budidaya atau Kelembagaan Petani f. Inventarisasi potensi Haki personal dan Haki komunal yang dapat difasilitasi untuk mendapat perlindungan Haki khususnya terkait produk ekonomi kreatif g. Kajian Strategi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif h. Kajian Pemajuan Kebudayaan Lokal dan <i>Heritage</i> i. Kajian peningkatan dan evaluasi pelayanan sosial dan kesejahteraan Masyarakat Kota Kendari, melalui update DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang tepat sasaran, dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu, kelompok marjinal, menuju kemandirian sosial dan ekonomi. j. Kajian kinerja dan peran pemerintah, BLK dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang kompetitif, serta afirmasi <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja, terutama di bidang potensial perekonomian. k. Menyusun <i>road map</i> Pemberdayaan Klaster Kemiskinan dan PPKS			√		√		√		Dinas Perindust. Dan TK (BLK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Discapil Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Pariwisata dan Ekraf

[illegible]

Visi & Misi Pemerintahan	Perioritas Permasalahan	Indikator Tujuan/ Sasaran (Program	Kegiatan / Sub Kegiatan Riset &	Tema/	Tahun						Sasara n Akhir	Pelaksana
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendorong perkembangan kawasan perkotaan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan tanggap bencana		Menciptakan kota yang nyaman dan ramah lingkungan	Penyelerasan dengan Perkembangan Global (dalam arti luas)	a. Pengelolaan Infrastruktur Hijau dan Drainase Berbasis Ekosistem untuk Mitigasi Banjir dan Genangan di Kota Kendari b. Kajian mitigasi dan kesiapsiagaan bencana daerah berbasis pemenuhan infrastruktur dan lingkungan c. Kajian inovasi sosial pengelolaan sampah terpadu, Inovasi penelitian berbasis teknologi dan geospasial, dan Teknologi Tata Kelola Sampah Berbasis Industri d. Kewajiban Penyusunan Dokumen atau Kajian Lingkungan Hidup sesuai Skala Pembangunan		√	√					BRIDA BPBD PUPR BAPPEDA DLHK
		a) Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan										
		b) Meningkatnya infrastruktur perkotaan				√	√	√	√	√		PUPR BRIDA Perhubungan

Visi & Misi Pemerintahan	Perioritas Permasalahan	Indikator Tujuan/ Sasaran (Program	Kegiatan / Sub Kegiatan Riset &	Tema/	Tahun						Sasara n Akhir	Pelaksana
				Transformasi Kawasan Kumuh menjadi Permukiman Layak Huni melalui Pendekatan Partisipatif di Kota Kendari		√						BRIDA Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Penerapan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Sirkular Ekonomi di Sumber untuk Mewujudkan Kota Kendari yang Bersih dan Berkelanjutan		√						BRIDA DLHK
				Kajian Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan, Air, dan Energi Berkelanjutan						√		BRIDA BPBD DLHK Pertanian Ketahanan Pangan
				Kajian Pengutan Kapasitas dan mitigasi bencana alam (Banjir/Genangan, Longsor, Kebakaran Lahan)						√		BRIDA BPBD DLHK
				Kajian Pemetaan Timbulan Sampah Liar dan Optimalisasi Pengelolaan dengan Membuat Peta Alur Layanan Persampahan Terintegrasi di Kawasan <i>Periphery</i> Kota Kendari						√		BRIDA DLHK
				Kajian Pengelolaan Timbulan Sampah Perkotaan						√		BRIDA DLHK
				Inventarisasi Emisi GRK dan <i>Trade Carbon</i>				√				BRIDA DLHK

Visi & Misi Pemerintahan	Perioritas Permasalahan	Indikator Tujuan/ Sasaran (Program	Kegiatan / Sub Kegiatan Riset &	Tema/	Tahun						Sasara n Akhir	Pelaksana
				Penyusunan Profil Kenakeragaman Hayati, dan RIP Kehati				√				BRIDA DLHK
				Kajian Kondisi Perikanan Budidaya Nelayan Tambak di Kota Kendari						√		BRIDA Perikanan
				Kajian pengembangan aspal ramah lingkungan baik berbasis aspal buton maupun limbah di Kota Kendari.						√		BRIDA
				Kajian pengembangan transportasi yang terintegrasi, berkeselamatan dan berkelanjutan						√		BRIDA Perhubung an
				Kajian kebijakan pengembangan ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan limbah						√		BRIDA DLHK Perdagangan, Koperasi dan UKM Perindustrian & TK
				Penyusunan regulasi pembangunan yang menerapkan prinsip berkelanjutan (SDGs)						√		BRIDA DLHK
				Kajian kebutuhan air domestik dan pemetaan potensi keberadaan air untuk pengadaan sumur bor berbasis geolistrik				√				BRIDA PUPR
				Kajian tentang penanganan lingkungan dan permukiman				√				BRIDA Perumahan, Kawasan

Visi & Misi Pemerintahan	Perioritas Permasalahan	Indikator Tujuan/ Sasaran (Program	Kegiatan / Sub Kegiatan Riset &	Tema/	Tahun						Sasara n Akhir	Pelaksana
				kumuh.								Permukiman dan Pertanahan
				Kajian Penerapan Skema Perumahan Modern Mengusung Konsep <i>Live Well, Live Green, Live Connected</i> di Kota Kendari secara Inklusif, Hijau dan Berkelanjutan.			√					BRIDA Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan BAPPEDA PUPR
				Kajian Keberlanjutan Daya Dukung Kebun Raya Kendari sebagai kawasan konservasi, penelitian, jasa lingkungan, dan rekreasi			√					BRIDA BAPPEDA DLHK
5. Mengembangkan an perekonomian daerah yang kokoh dan berkeadilan berbasis komoditas unggulan		Meningkatnya perekonomian unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah (dalam arti luas)	Strategi Peningkatan Pendapatan melalui Identifikasi dan Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah		√						
		a) Meningkatkan sektor ekonomi unggulan berbasis potensi daerah		a. Penguatan Kawasan Ekonomi Lokal melalui Kolaborasi UMKM, Pertanian Peri-Urban, dan Digitalisasi Pasar di Kota Kendari		√				√		BRIDA Perdagangan, Koperasi dan UKM
				b. Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya Lokal sebagai Penggerak Ekonomi Berkelanjutan di Kota Kendari c. Pemanfaatan CBD Teluk Kendari Sebagai Kawasan Pariwisata Unggulan d. Kajian Pengembangan		√					BRIDA Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Komunikas	

[illegible]

Visi & Misi Pemerintahan	Perioritas Permasalahan	Indikator Tujuan/ Sasaran (Program	Kegiatan / Sub Kegiatan Riset &	Tema/	Tahun						Sasara n Akhir	Pelaksana
								√	√			DPMPTSP

Visi & Misi Pemerintahan	Perioritas Permasalahan	Indikator Tujuan/ Sasaran (Program	Kegiatan / Sub Kegiatan Riset &	Tema/	Tahun					Sasara n Akhir	Pelaksana
		b) Menurunnya Pengangguran di Kota Kendari		a. Pengaruh Program Pembedayaan dan pengembangan UMKM terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Kendari b. Kajian Keberadaan BLK terhadap kondisi pengangguran Kota Kendari c. Kajian Kantong Kemiskinan di Kota Kendari dalam rangka penumbuhan wirausaha baru berbasis komoditi unggulan d. Kajian Identifikasi Sektor-Sektor Ekonomi Yang membutuhkan Tenaga Kerja Dengan Tingkat Keterampilan Tertentu. e. Penyusunan <i>Road Map</i> Ekonomi Kreatif Kota kendari: f. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah g. Master Plan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah: Identifikasi daya tarik wisata, pengembangan kawasan inti atau penyangga atau pendukung atau pelayanan, fasilitas, pengelolaan risiko, dan partisipasi masyarakat. Serta Perencanaan dan <i>roadmap</i> untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata, mencakup tahapan pengembangan, prioritas infrastruktur, dan upaya pemasaran, melibatkan analisis potensi pariwisata, ketersediaan infrastruktur, serta faktor-faktor pendorong dan				√			BRIDA BAPPEDA Dinas Perindustri an dan Tenaga Kerja Perdaganga n, Koperasi dan UKM Dinas Pariwisata dan Ekraf

Visi & Misi Pemerintahan	Perioritas Permasalahan	Indikator Tujuan/ Sasaran (Program	Kegiatan / Sub Kegiatan Riset &	Tema/	Tahun						Sasara n Akhir	Pelaksana
				penghambat					√			
									√			

Sumber: Data Sekunder, diolah dan Analisis Tim Ahli (2025)



BAB 7 PENUTUP

Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kota Kendari Tahun 2025 – 2030 merupakan penjabaran dan program prioritas Visi Misi Pemerintah Kota Kendari, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Arah Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045. Dokumen ini dibuat dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pembangunan Daerah yaitu **“Terwujudnya Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni yang Semakin Maju, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan”** dengan 5 (lima) pokok misi: (1) Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter, (2) Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang berorientasi pelayanan, Inovasi dan Digitalisasi, (3) Mengembangkan perlindungan sosial yang adaptif dan transformasi sosial, (4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendorong perkembangan kawasan perkotaan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan tanggap bencana, dan (5) Mengembangkan perekonomian daerah yang kokoh dan berkeadilan berbasis komoditas unggulan.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai arah pengembangan inovasi, evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir sebagai refleksi dan pembelajaran, berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya untuk keselarasan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga keduanya memiliki hubungan strategis dalam upaya mendorong pembangunan berbasis inovasi, menjadi panduan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Integrasi antara RPJMD dan RIPJPID memastikan bahwa pengembangan sektor IPTEK selaras dengan arah kebijakan Pembangunan daerah, sehingga mampu mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan memperkuat kapasitas inovasi masyarakat, dalam menciptakan pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis pengetahuan untuk menjawab tantangan masa depan.

7.1 Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pembangunan Daerah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan komponen penting dalam kemajuan daerah khususnya Kota Kendari, digunakan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hidup masyarakat pada berbagai bidang kehidupan, serta perlindungan lingkungan hidup. Landasan pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut:

- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- Pasal 31 ayat ke 5 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sisnas Ilmu pengetahuan dan teknologi telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada undang-undang ini dinyatakan beberapa hal mengenai pengembangan Sisnas Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai berikut:

Pada Pasal 6 menyatakan:

- 1) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkedudukan sebagai modal dan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional untuk:
 - a. meningkatkan kualitas hidup manusia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. meningkatkan kemandirian;
 - d. memajukan daya saing bangsa;
 - e. memajukan peradaban bangsa;
 - f. menjaga kelestarian alam;
 - g. melindungi dan melestarikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - h. menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan.

- 2) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan melalui Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
- 3) Sistem perencanaan pembangunan. Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat {2) meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Pasal 41 (1) menyatakan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

Dari pasal ini dapat dimaknai bahwa:

- 1) Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan modal dan investasi pembangunan nasional;
- 2) Pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi harus selaras dengan rencana pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; dan
- 3) Perumusan kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada hasil Litbangjirap.

7.2 Peran BRIDA Kota Kendari Dalam Pembangunan Daerah Melalui Penumbuhkembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

Pembentukan BRIDA Kota Kendari diusulkan melalui revisi Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Hal ini menyusul penetapan Kebun Raya Kendari sebagai kawasan konservasi, penelitian, jasa lingkungan, dan rekreasi oleh BRIN. Wali Kota Kendari menegaskan bahwa Pembentukan BRIDA merupakan langkah penting untuk memaksimalkan potensi riset dan inovasi di daerah, memperkuat sinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan akan menjadi tulang punggung riset daerah mengelola potensi lokal secara ilmiah dan terencana. Sehingga diharapkan keberadaan BRIDA dapat meningkatkan inovasi dan daya saing daerah di berbagai sektor.

Dalam Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dinyatakan bahwa BRIDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk daerah. Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tersebut dinyatakan pula bahwa pada tahap perencanaan pembangunan daerah, BRIDA berperan memberikan masukan pemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam

perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Sehingga sebagai perangkat daerah yang menangani urusan penelitian dan pengembangan disamping melakukan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah juga memiliki tugas memberikan materi muatan peran Riset dan Inovasi dalam dokumen RIPJPID 2025-2030 dan RPJMD 2025-2029.

Terkait pemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi daerah, di dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, peran dari Pemerintah Daerah melalui BRIDA adalah melaksanakan penumbuhkembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Pasal 23, ayat 1). Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sendiri adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah. Pelaksanaan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah ini juga dikoordinasikan oleh BRIDA (Pasal 23, ayat 9). Tujuan dari pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah ini adalah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Elemen-elemen Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah (Pasal 23, ayat 2) meliputi:

- a) elemen kebijakan dan infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah;
- b) elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
- c) elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
- d) elemen budaya Riset dan Inovasi;
- e) elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah;
- f) elemen penyelarasan dengan perkembangan global.

7.3 Substansi Riset dan Inovasi Daerah di Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Untuk mendukung peran Brista Kota Kendari dalam penumbuhkembangkan Riset dan Inovasi di daerah maka dalam dokumen RIPJPID 2025-2030 dan RPJMD 2025-2029 dapat dimasukkan substansi Riset dan Inovasi di daerah. Adapun substansi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Substansi peran Riset dan Inovasi dalam kerangka dokumen RIPJPID 2025-20430

Subtansi peran riset dan inovasi yang dijadikan pedoman dalam kerangka dokumen perencanaan jangka panjang antara lain:

- 1) Analisis Isu Strategis, memasukkan substansi terkait peran Riset dan Inovasi dalam pembangunan daerah, terutama dalam hal mendorong:
 - Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kegiatan ekonomi lokal, daya saing produk unggulan daerah, dan penciptaan lapangan usaha.
 - Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk solusi permasalahan daerah.
 - Riset atau kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence based-policy*).
- 2) Visi dan Misi
 - Di dalam Misi SDM Berdaya Saing, Misi Ekonomi dan Sosial Budaya, menekankan pentingnya pengembangan sektor tersebut berbasis pengetahuan (*knowledge based-economy*). Riset dan Inovasi berperan dalam meningkatkan produktivitas dan peningkatan kegiatan ekonomi lokal, melalui pengembangan dan penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk pengembangan produk unggulan daerah, transformasi sosial, dan SDM berdaya saing.
 - Di dalam misi lainnya memasukkan tentang pentingnya Ekosistem Riset dan Inovasi dalam pengembangan misi Wali Kota Kendari, secara menyeluruh dimasukkan fokus kajian:
 - n) Lingkungan (persampahan),
 - o) Penanganan banjir atau genangan dan kawasan rawan bencana serta kebakaran,
 - p) Peningkatan infrastruktur perkotaan lainnya,
 - q) Kesehatan (*stunting*),
 - r) Kemiskinan (kemiskinan ekstream),
 - s) Penanganan kawasan kumuh,
 - t) Pariwisata (CBD kawasan Teluk Kendari),
 - u) Pelayanan publik,
 - v) Nilai-nilai sosial budaya,
 - w) Pengembangan kawasan ekonomi dan optimalisasi PAD,
 - x) Ekonomi dan jasa lingkungan,
 - y) Peningkatan kualitas pangan dan gizi,
 - z) Industri dan Ketenagakerjaan.

- 3) Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan, menekankan pentingnya peran riset dan inovasi di dalam arah kebijakan dan rumusan sasaran pokok pembangunan, sesuai dengan yang termuat di dalam analisis isu strategis dan visi-misi.

b. Substansi peran Riset dan Inovasi di dalam kerangka dokumen RPJMD 2025-2029

Dengan ini memasukkan 3 substansi utama dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah (RIPJPID), yaitu:

- 1) Kajian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti terhadap program prioritas pembangunan daerah. Kajian dilaksanakan oleh Bappeda saat ini dan ke depan akan diselenggarakan oleh BRIDA yang baru terbentuk. Terdapat dua bentuk luaran yang dapat dihasilkan dari kegiatan kajian tersebut, yaitu: *Policy brief* dan *Policy paper*.
- 2) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk mendorong tumbuhnya ekonomi lokal melalui penguatan IKM dan penumbuhan wirausaha baru berbasis Produk Unggulan Daerah atau pengembangan kawasan/tema ekonomi tertentu. Program tematik ini merupakan kolaborasi lintas urusan (*cross cutting program*).
- 3) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk menyelesaikan permasalahan utama daerah (bisa terkait dengan permasalahan ekonomi bisa juga tidak terkait langsung dengan ekonomi, seperti penyelesaian kemiskinan, kemiskinan ekstrim, stunting, dsb). Program tematik ini juga merupakan kolaborasi lintas urusan (*cross cutting program*).

7.4 Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2030

Tema prioritas riset dan inovasi yang dipilih daerah Kota Kendari:

“Membangun Riset dan Inovasi untuk SDM dan Ekonomi Berdaya Saing, Menuju Kota Unggul dan Berkelanjutan”.

Baseline Riset dan Inovasi Kota Kendari Tahun Dasar (2026) adalah sebagai berikut:

12. Strategi Penguatan SDM Berdaya Saing melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja di Kota Kendari

13. Inovasi Layanan Terpadu di Mal Pelayanan Publik: Meningkatkan Efisiensi, Transparansi, dan Kepuasan Masyarakat
14. Membangun Ekosistem Inovasi Daerah untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Partisipatif
15. Model Intervensi Multi-Sektor dalam Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
16. Strategi Terpadu Pencegahan Stunting melalui Intervensi Gizi, Sanitasi, dan Edukasi Keluarga
17. Pengelolaan Infrastruktur Hijau dan Drainase Berbasis Ekosistem untuk Mitigasi Banjir dan Genangan
18. Perencanaan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan: Integrasi Transportasi, Ruang Terbuka Publik, dan Aksesibilitas
19. Transformasi Kawasan Kumuh menjadi Permukiman Layak Huni melalui Pendekatan Partisipatif
20. Penerapan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Sirkular Ekonomi di Sumber untuk Mewujudkan Kota Kendari yang Bersih dan Berkelanjutan
21. Strategi Peningkatan Pendapatan melalui Identifikasi dan Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
22. Penguatan Kawasan Ekonomi Lokal melalui Kolaborasi UMKM, Pertanian Peri-Urban, dan Digitalisasi Pasar Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata dan Budaya Lokal sebagai Penggerak Ekonomi Berkelanjutan di Kota Kendari
23. Sasaran Akhir Tahun Rencana “Daya Saing Daerah Berkelanjutan”.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri/Peraturan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang Prosedur Tahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Riset dan Inovasi Tahun 2024-2026.
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2029.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2025-2045.

Buku/Jurnal

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2019). Introduction to modern economic growth. Princeton University Press.

Albury, David. Inovasi di Sektor Publik. PT Elex Media Komputindo. Jakarta, 2003.

Asrori, DKK. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, bina praja press, Jakarta Pusat, 2020.

Badan Pusat Statistika Kota Kendari, Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2021.

Badan Pusat Statistika Kota Kendari, Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2022.

Badan Pusat Statistika Kota Kendari, Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2023.

Badan Pusat Statistika Kota Kendari, Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2024.

Badan Pusat Statistika Kota Kendari, Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2025.

Barlow, J., Roehrich, J. K., & Wright, S. (2018). Europe sees mixed results from public-private partnerships for building and managing health care facilities and services. *Health Affairs*, 37(2), 192-198.

Hutagalung Simon Sumanjoyo. Membangun Inovasi Daerah. Deepublish, Yogyakarta 2018.

Khan, A. H. (2019). Agriculture and rural development in a globalizing world: Challenges and opportunities. Routledge.

McCann, P. (2019). Urban and regional economics. Oxford University Press.

Putera, P. B. (2015). *Teori dan Aplikasi pada Kebijakan IPTEK dan Inovasi*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik. STIA-LAN Press.

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN